

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pergulaan nasional menjadi isu yang dianggap penting dan selalu menarik untuk dibahas bagaimana tidak industri gula merupakan industri perkebunan tertua di Indonesia yang pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-an. Saat itu pabrik gula yang beroperasi adalah 179 pabrik gula (PG), produktivitas sekitar 14,8 persen dan rendemen mencapai 11-13,8 persen. Ekspor gula pernah mencapai sekitar 2,4 juta ton dengan produksi puncak mencapai sekitar 3 juta ton (Sudana *et al.*, 2000).

Pada tahun 2008 produksi gula dunia sebesar 166,3 juta ton dimana Indonesia produksinya sebesar 2,67 juta ton gula putih dan 1,256 juta ton untuk gularafinasi. Rata-rata stok gula dunia sebesar 3,3 juta ton. Sedangkan konsumsi gula dunia sekitar 163 juta ton. Produksi gula dunia adalah 70% dari tebu sisanya dari beet (Dirjen Industri Agro Kimia, 2009). Keberhasilan industri gula baik ditunjang dari bahan baku tebu (*saccharum officinarum L.*) didasarkan pada aspek *off farm* dan *on farm* dimana aspek *off farm* yang meliputi bagian pasca panen, tebu digiling hingga teknologi yang digunakan, akan tetapi keberhasilan tidak sepenuhnya ada pada penerapan teknologi yang baik ataupun mekanisasi akan tetapi aspek *on farm* yang meliputi penerapan kaidah teknologi pertanaman yang baik dan benar mulai dari persiapan lahan, pengolahan dan penanaman yang mengikuti kaidah masa tanam optimal, & proses kerjasama petani mitra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan yang dimaksud sehingga pengiriman tebu ke pabrik dapat sesuai kriteria MBS (manis, bersih dan segar).

Dalam rangka pembangunan pertanian dengan konsep agribisnis, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian dijabarkan pada PP No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Aturan tersebut antara lain ditujukan untuk mengatasi masalah – masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil, peningkatan mutu produk dan masalah pemasaran. (Departemen Pertanian, 2003). Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan, dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan

memperkuat. Pola kemitraan adalah bentuk – bentuk kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar. Pola kemitraan sebagai suatu inovasi mengandung pengertian bahwa telah terjadi proses pembaharuan (inovasi = sesuatu yang baru) terhadap pola kemitraan dalam banyak hal dalam artian pola kemitraan bukan sesuatu yang baru sama sekali di dunia petani, tetapi telah mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu hingga saat ini, dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan di salah satu pihak.

Kabupaten Magetan merupakan daerah yang strategis dimana sebagian besar penggunaan lahan adalah di sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan serealia, hortikultura serta perkebunan, dengan karakteristik wilayah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai menunjang dalam program pemerintah dalam sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Magetan terdapat 2 Pabrik Gula diantaranya adalah PG. Poerwodadie dan PG. Redjosari. Keadaan geografis yang mendukung usaha perkebunan tebu menjadi pengusahaan utama setelah tanaman padi, ini dikarenakan dari sektor biaya usahatani tebu yang lebih murah karena perlakuan intensif hanya pada awal budidaya, ditambah lagi usaha perkebunan tebu yang prospektif didukung dengan *stakeholder* dan sistem bagi hasil dari kemitraan tebu dengan Pabrik Gula.

PG. Poerwodadie dalam melakukan proses kemitraan mengacu pada sistem bagi hasil yang terjalin dalam kesepakatan Tebu Rakyat dimana Pabrik Gula memberikan jaminan pemberian kredit dan hasil tebangan disetorkan pada PG yang memberikan fasilitas kredit. Berbagai jenis pola kemitraan yang dijalin melalui pengucuran kredit usahatani tebu hingga pengembangan sumberdaya manusia melalui *transfer knowledge* yang ada dalam bimbingan teknis yang diberikan oleh PG. Poerwodadie menjadikan hubungan yang terjalin dari Pabrik Gula dan Petani menjadi harmonis sehingga keteraturan akan pengiriman bahan baku tebu, kualitas serta jaminan harga terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Salah satu program kemitraan yang terjalin adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN, jalanya program tersebut di PG. Poerwodadie menjadi 2 bagian, yang pertama merupakan bentuk program kemitraan dimana PG. Mengucurkan modal kredit sebagai salah satu bentuk hak dan kewajiban dari petani yang menyerahkan bahan baku berupa tebu kepada PG sebagai pihak yang memebrikan kredit, selanjutnya adalah dengan program Bina Lingkungan yang meliputi berbagai program pengabdian kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja PG. Poerwodadie, seperti bantuan modal UKM, pembangunan fasilitas umum, pengerasan jalan, bakti sosial, dll.

Dengan adanya kebijakan program tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam memberikan respon positif kepada petani dan masyarakat dalam memberikan perhatian kepada PG. Poerwodadie dalam keteraturan pasokan bahan baku serta persepsi pandangan yang positif terhadap kebijakan yang berjalan di PG. Poerwodadie

Penerapan pola kemitraan yang dijalankan belum sepenuhnya memberikan manfaat seutuhnya bagi kedua pihak yang bermitra, hal ini berdasarkan pada pasokan bahan baku masa giling tebu dimana PG mengalami kekurangan pada akhir periode giling bahan baku utama tebu yang berasal dari Tebu Rakyat yang pengelolaanya Petani menggantungkan bantuan kredit dari PG. Poerwodadie justru memindahkan pasokan bahan baku ke PG lain, dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar kemitraan dimana dalam pola kemitraan yang ideal tidak merugikan dari salah satu pihak yang sudah terjalin kerjasama.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya memperoleh masukan sejauh mana pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku di PG. Poerwodadie, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

1.2 Perumusan Masalah

Visi Pembangunan Pertanian ke depan adalah mewujudkan pertanian yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional, mensejahteraan masyarakat dan memiliki daya saing tinggi. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan pertanian

tersebut, maka salah satu program pembangunan pertanian adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan (Nuhung, 2006).

PG. Poerwodadie merupakan unit kerja pabrik penghasil gula dibawah naungan BUMN PTPN XI dengan 16 Pabrik Gula lainnya dimana wilayah kerjanya tersebar di Jawa Timur dan mendukung program pemerintah dalam rangka swasembada gula pada tahun 2014. Salah satu tanaman perkebunan yang memiliki arti penting pada industri gula adalah tebu. Hal ini disebabkan tebu merupakan bahan baku dalam pembuatan gula (Rahardi, 1993). Menurut Masyhuri (2005), meningkatnya kebutuhan gula domestik sangat mempengaruhi pengembangan perkebunan tebu. Pengembangan tanaman tebu ditujukan untuk menambah pasokan bahan baku pada industri gula dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tebu dengan cara partisipasi aktif petani tebu tersebut.

Pada hakekatnya adanya kemitraan yang terjalin merupakan suatu penghubung dalam menjalin kerjasama yang menguntungkan dari kedua pihak baik dari perusahaan maupun dari petani sendiri, adanya kewajiban yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak mengharuskan program kemitraan berjalan sesuai dengan tujuan awal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata akan tetapi lebih pada aspek *benefit* yang menciptakan hubungan harmonis, selaras dan seimbang yang secara tidak langsung akan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan produksi gula, kontinuitas produksi, pasokan bahan baku serta dari segi pendapatan petani.

Pola kerjasama yang dilakukan oleh PG. Poerwodadie dan petani mitra maupun dengan masyarakat di wilayah kerjanya tentu tidak terlepas dari hambatan yang meliputi dari aspek lingkungan maupun internal dalam menjalin kemitraan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak yaitu dari PG. Poerwodadie serta petani mitra dan masyarakat di wilayah kerja perusahaan sehingga menjadi batu loncatan (*stepping stone*) di dalam tuntutan dalam peningkatan produktivitas serta pendapatan petani melalui program yang telah direncanakan.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PG. Poerwodadie?
2. Bagaimana biaya, penerimaan, pendapatan dan efisiensi usahatani tebu petani yang mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
3. Bagaimana Mengembangkan Model konseptual berdasarkan *root definition* di lokasi penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di lokasi penelitian.
2. Menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan dan efisiensi usahatani tebu petani yang mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
3. Mengembangkan Model konseptual berdasarkan *root definition* di lokasi penelitian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi PG. Poerwodadie dalam menjalankann Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sehingga pelaksanaan program tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.
2. Sebagai masukan bagi petani tebu mitra PG. Poerwodadie mengenai manfaat mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program kemitraan telah banyak dilakukan oleh peneliti yang meliputi berbagai banyak aspek objek penelitian, akan tetapi hasil yang diperoleh belum dapat menyimpulkan samapi seberapa jauh pengaruhnya pada tingkat pendapatan serta hak yang diperoleh petani mitra. Pola kemitraan dibentuk dengan tujuan menghasilkan keuntungan sebagai akibat dari proses pelaksanaan dari program – program yang telah dilakukan dengan tawaran berbagai macam konsep mulai dari pendampingan, bantuan modal kredit, jaminan pasar serta proses transfer teknologi.

Catur (1999) dalam penelitiannya mengenai studi pola kemitraan perusahaan benih jagung manis menyatakan bahwa hasil kemitraan yang dibentuk mengacu pada model kemitraan Pola Inti Plasma (PIP) dimana petani adalah petani mitra usaha perusahaan, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam surat perjanjian kerjasama produksi benih.

Siti asnah (2003) dalam penelitian yang mengambil judul analisis pola kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula dalam hal bagi hasil melibatkan berbagai pihak dalam dalam menentukan kesepakatan penetapan upah giling tebu yaitu antara pihak PG. Kebon Agung, perwakilan dari Bank Bukopin serta dari KUD petani tebu yang tergabung dalam FMTK.

Masih pendapat yang sama dalam kharisma (2011) penelitian yang mengambil kajian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit pola kredit primer untuk anggota dimana sebuah proses kemitraan berlangsung karena diawali terjadinya konflik atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh PT. Malaya Sawit Katulistiwa dengan lahan milik penduduk di Desa Rapak Lumbur, adapun proses pembentukan kemitraan usaha perkebunan kelapa saawit di Desa Rapak Lumbur meliputi tahap persiapan yang terdiri atas masa konstruksi, masa pembangunan penyerahan kebun hingga pelunasan kebun dengan Bank pelaksana BPD Kaltim yang ditunjuk oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditas bank Indonesia (KLBI).

Elis (2007) dalam penelitian mengenai analisis pola kemitraan petani tebu dengan pabrik gula berdasarkan pendekatan biaya transaksi terdapat tingkat pendapatan, penerimaan, biaya produksi total usahatani petani kemitraan lebih tinggi dibandingkan dengan petani non kemitraan sehingga dari pola kemitraan mampu meningkatkan pendapatan petani tebu kemitraan.

Sejalan dengan penelitian selanjutnya oleh Leni (2009) mengemukakan dalam penelitian partisipasi petani dalam program tebu rakyat kemitraan (TRK) dan faktor – faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya yang meliputi merencanakan kegiatan TRK pelaksanaan kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil yang ada diketahui bahwa partisipasi petani dalam program TRK tergolong tinggi yang menunjukkan bahwa petani di daerah penelitian sepenuhnya aktif dalam mengikuti program TRK dan terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program TRK diartikan bahwa responden dapat menerima program dari pemerintah selama hal tersebut menguntungkan petani.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan dari beberapa peneliti mengenai pelaksanaan pola kemitraan, akan tetapi dari perbedaan tersebut dapat diambil suatu maksud yang sama dalam memikirkan serta merumuskan langkah – langkah strategis yang perlu dilakukan agar petani dapat meningkatkan pendapatannya melalui pola kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait.

2.2 Kemitraan

2.2.1 Definisi Kemitraan

Kemitraan dalam Fahrudhah (2005), kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dengan kata lain kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tugas atau tujuan tertentu.

Menurut Hafsah dalam Yusnitasari (2006) Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan. Jadi dalam model kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak (perusahaan dengan kelompok tani) untuk mencapai strategi bisnis diperlukan “win-win solution” sehingga tercapai keuntungan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dikemukakan juga oleh Laili (2007) bahwa kemitraan adalah hubungan usaha antara usaha kecil dan atau koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai dengan bantuan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pemasaran, peningkatan teknis produksi, peningkatan modal kerja dan peningkatan teknik perbankan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Sumardjo (2004) dalam Laili (2007) kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antar perusahaan mitra dan kelompok perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Sedangkan pengertian kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 bab 1 dalam Nurmiyanto (2008), dikatakan sebagai kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan landasan pengembangan usaha.

Di lain pihak Lan Lion (1995) dalam Nurmiyanto (2008) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya,

dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Dalam buletin yang dikeluarkan oleh FAO (2001) berpendapat tentang kemitraan/*contract farming* sebagai berikut:

“Contract farming can be defined as an agreement between farmers and processing and/or marketing firms for the production and supply of agricultural products under forward agreements, frequently at predetermined prices”.

(Kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan antara petani dan perusahaan pengolah dan atau perusahaan pemasaran untuk produksi dan persediaan produk pertanian dibawah kesepakatan/ perjanjian, termasuk diantaranya penentuan harga).

Sedangkan menurut Mayers dan Vermulen (2002) dalam Maturana (2005) berpendapat kemitraan Hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat.

Sistem pertanian kontrak (*contract farming*) menurut Daryanto (2007) merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.

Mohanty (2007) dalam artikelnya mendefinisikan kemitraan sebagai berikut:

“Contract farming is a business deal between farmers and another party that allows for the other party (traders and business houses) to ask for specific produce from the farmer for a specific rate determined a priori”.

(Pertanian kontrak adalah suatu kesepakatan bisnis antara petani dan pihak lain yang memungkinkan pihak lain (pedagang dan perusahaan) untuk meminta untuk produksi tertentu dari petani dengan ukuran tertentu sebagai sebuah hak istimewa).

Glyuver dan Kusteter (1990) dalam Bakhrie (2006), menyatakan program kemitraan atau yang sering disebut dengan contract farming secara definitif, diartikan sebagai usahatani yang didasarkan pada kontrak antara satu lembaga atau perusahaan yang berperan sebagai pengolah dan atau pemasar hasil-hasil pertanian dari yang berperan sebagai produsen primer hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan ini petani berperan sebagai produsen primer yang akan menjual atau menyediakan sejumlah atau seluruh hasil produksinya kepada lembaga atau perusahaan.

Syafi'i (1995) dalam Yusnitasari (2006) menyatakan bahwa pola kemitraan adalah hubungan bisnis antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan dan membentuk kerjasama sistem kontrak/ perjanjian tertentu yang disepakati bersama. Unsur- unsur yang bermitra adalah:

1. Petani sebagai mitra tani yang menghasilkan produksi pertanian.
2. Lemaga formal seperti KUD, BUMN, supplier swasta sebagai mitra media.
3. Industry pengolahan dan usaha pemasaran yang menampung hasil dan mitra media.

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006) menyatakan bahwa contract farming yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

Contract farming adalah salah satu bentuk pengorganisasian produksi dalam agroindustri yang membuat petani-petani kecil terlibat dan terintegrasi secara vertikal ke atas di tengah pasar global melalui firma-firma swasta atau lembaga-lembaga publik, meskipun petani tersebut tidak ikut bermain secara langsung. Dengan cara ini diharapkan petani-petani tersebut, di tengah segala keterbatasannya, dapat memetik beberapa nilai tambah karena terlibat dalam permainan dan kompetisi pasar yang lebih luas ketimbang pasar lokal dan tradisional, dan perekonomian wilayah dan nasional dapat turut terangkat melalui peningkatan nilai tambah dari komoditas yang diperjualbelikan (Bachriadi,1996 dalam Ekawati, 2005).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau contract farming adalah suatu bentuk kerjasama antara kelompok tani dengan perusahaan besar dalam jangka waktu tertentu dan saling menguntungkan.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Kemitraan

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah “Win-Win Solution Partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti pada partisipan dalam keadaan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran serta masing-masing.

Masih menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), dengan kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional.
5. Memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan besar dan petani adalah :

1. Membantu peningkatan produksi dalam program swasembada pangan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja.

3. Memberi kepastian pada petani dalam memasarkan produknya dengan jaminan harga yang wajar.
4. Mempercepat alih teknologi maju perusahaan besar pada petani dan meningkatkan efisiensi perusahaan pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya.
5. Mengikutsertakan modal swasta dalam pembangunan pertanian.

D.J. McConnell dalam Kristanto (1988) dalam *contract farming* atau kontrak usahatani ada beberapa tujuan di dalamnya baik dari pihak perusahaan maupun petani, antara lain:

1. Tujuan dari pihak perusahaan;
 - a. Memperoleh bahan, bilamana usahatani kontrak telah berkembang pesat, umumnya minat utama perusahaan adalah ingin mendapatkan hak kepemilikan atas komoditi yang bersangkutan.
 - b. Pengawasan kredit, ikatan-ikatan kontrak yang agak rumit yang terdapat pada beberapa industri, serta sistem kredit produksi di antara pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan alasan akan timbulnya hak-hak atas komoditi yang eksklusif.
 - c. Efisiensi pabrik pengolahan, dalam berbagai situasi tujuan perusahaan yang mengadakan kontrak bukanlah hanya menuntut akan hak-hak istimewa namun efisiensi perekayasaan yang maksimal dalam pabrik pengolahan.
 - d. Pengendalian mutu, merupakan dasar untuk kontrak-kontrak penawaran komoditi, namun hal ini tidak memerlukan hak-hak eksklusif.
 - e. Penjualan faktor produksi, tujuan perusahaan menawarkan kontrak-kontrak kepada petani ialah memaksa mereka memasuki pasar.
2. Tujuan dari pihak petani;
 - a. Stabilitas harga, stabilitas harga yang ditawarkan dalam kebanyakan kontrak adalah berjangka pendek. Jadi kontrak hanya memberikan stabilitas harga yang terbatas.
 - b. Saluran pasar, tujuan yang lebih penting lagi dari sebagian besar kontrak yang dilakukan berkaitan dengan peluangnya untuk memasuki pasar jika pasar itu tertutup bagi petani.

- c. Memperoleh faktor-faktor produksi dan teknologi, produksi berdasarkan kontrak terutama berkembang pada industri-industri pertanian yang terspesialisasi dan mempunyai kedudukan monopolistik atas masukan-masukan usahatani yang penting.
- d. Meraih modal usahatani dan memasuki sektor industri, dalam tipe kontrak produksi produk pertanian dengan pengawasan ketat, disediakan perlengkapan khusus kepada petani. Menyajikan alternatif bagi investasi perorangan pada pos-pos yang ada, menyewa alat ini biasanya lebih murah dari pada memilikinya.
- e. Memasuki bidang pertanian, jenis-jenis kredit yang disediakan melalui beberapa bentuk kontrak dapat menghilangkan sebagian hambatan yang dihadapi beberapa keluarga yang ingin memasuki bidang pertanian.

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan utama kemitraan adalah meningkatkan kesejahteraan usaha kecil (kelompok tani).

2.2.3 Manfaat Kemitraan

Keuntungan yang diperoleh dalam kemitraan dapat dinikmati oleh petani dan perusahaan menurut salah satu buletin FAO (2001), sebagai berikut:

1. Advantages for farmers:

- a. *Inputs and production services are often supplied by the sponsor*
- b. *This is usually done on credit through advances from the sponsor*
- c. *Contract farming often introduces new technology and also enables farmers to learn new skills*
- d. *Farmer's price risk is often reduced as many contracts specify prices in advance*
- e. *Contract farming can open up new markets which would otherwise be unavailable to small farmers*

2. Advantage for Firms/ sponsor:

- a. *Contract farming with small farmers is more politically acceptable than, for example, production on estates*
- b. *Working with small farmers overcomes land constraints*

- c. *Production is more reliable than open-market purchases and the sponsoring company faces less risk by not being responsible for production*
- d. *More consistent quality can be obtained than if purchases were made on the open market*

Lain halnya dengan apa yang dikatakan Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), ada 6 manfaat yang dapat diperoleh melalui kemitraan antara lain sebagai berikut:

1. Produktivitas

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi petani peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan mengurangi/menekan faktor input seperti sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaan maka sarana produksi akan dapat ditekan karena pihak perusahaan yang menyediakan dalam bentuk pinjaman. Sedangkan pihak perusahaan dapat mengurangi input dengan pengurangan tenaga kerja, model ini dilaksanakan dalam program PIR dimana biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR.

2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenaga maka kemitraan pihak perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitra kerja dalam hal ini petani. Sebaliknya petani dapat mempercepat dan memperluas areal tanaman dengan tenaga tersedia dan sarana produksi yang disediakan oleh pihak perusahaan.

3. Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas

Produk akhir dari kemitraan ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya mutu yang diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani maka diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan.

4. Resiko

Dengan kemitraan resiko yang besar dapat ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh pihak perusahaan maka resiko akan kerugian akibat penurunan harga dapat dihindarkan.

5. Sosial

Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan yang menguntungkan melainkan dampak memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaan dan kecemburuan sosial serta memepererat persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

6. Ketahanan ekonomi nasional

Dengan adanya kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Selanjutnya menurut Anonymous (1995) dalam Yusnitasari (2006), pola kemitraan yang dilakukan harus dapat memunyai manfaat yang sebesar-besarnya pada :

1. Petani : dalam hal-hal tertentu dapat membantu segi permodalan, sarana produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinerja usahatani serta adanya jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.
2. Perusahaan : dapat tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari petani mitra usaha dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sehingga keuntungan meningkat.
3. Pemerintah : meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usahatani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustrial serta meningkatkan penerimaan negara dari usahatani dan perusahaan pertanian.

Dari beberapa manfaat kemitraan di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak, baik kelompok tani, perusahaan maupun pemerintah.

2.2.4 Asas Kemitraan

Masih dalam Hafsah (1999) *dalam* Bakhrie (2006), prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha yang kuat dengan pengusaha kecil yang didasari kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

Oleh karena itu dalam asas kemitraan semua pihak sejajar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat mencapai tujuan bersama antara kelompok tani dengan perusahaan.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Kemitraan

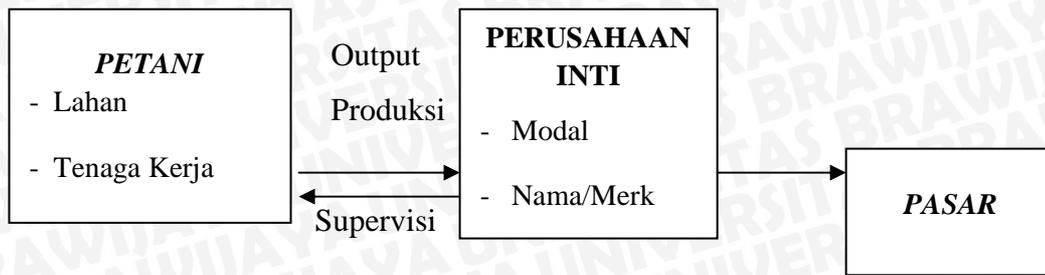
Berdasarkan Anonymous (1995) *dalam* Yusnitasari (2006), kemitraan agribisnis akan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan jika memperhatikan beberapa prinsip dasar kemitraan agribisnis, yaitu:

1. Adanya pelaku-pelaku kemitraan agribisnis adalah petani (kelompok tani), pengusaha, perusahaan (perusahaan budidaya, agroindustri dan sebagainya), dan pemerintah. Sebagai pelaku utama adalah petani dan perusahaan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai Pembina.
2. Adanya kebutuhan dan kepentingan bersama. Motivasi kemitraan agribisnis adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari pelaku-pelaku agribisnis yang dilandasi motif ekonomi/bisnis.
3. Adanya kerjasama dan keterkaitan yang seimbang, wajar, serasi, harmonis yang saling menguntungkan.

4. Hubungan kerjasama dan keterkaitan yang seimbang, wajar, serasi, harmonis antar pelaku agribisnis dalam pengadaan saprodi, produksi, pengolahan dan pemasaran serta faktor-faktor penunjang usaha agribisnis ditujukan untuk memperkuat struktur usaha, proses tawar-menawar dan kesamaan visi.

Kontrak usaha pertanian adalah salah satu cara dalam hubungan produksi yang hanya bisa dipraktekan apabila paling tidak ada dua pihak yang melakukan kerjasama untuk satu kesatuan waktu tertentu yang diatur dalam satu kesepakatan tertulis maupun lisan. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak menggunakan sumberdaya yang mereka kuasai. Pihak pertama dalam hubungan tersebut bisa berupa unit pengolah atau unit pemasaran. Unit pengolah atau pemasaran ini, berdasarkan status kepemilikannya bisa berupa perusahaan negara, swasta atau perusahaan patungan antar negara dan swasta, swasta dengan swasta, baik asing maupun domestik. Unit ini kemudian akan bertindak sebagai perusahaan inti. Sedangkan pihak kedua adalah para tani yang bertindak sebagai satelit. (Sayogyo,1997 dalam Puspitasari, 2003)

Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ini adalah modal, kadang-kadang juga nama merk atau jaminan pasar, sedangkan sumber daya yang dikuasai oleh petani adalah lahan dan tenaga kerja. Agak berbeda dengan hubungan jual beli biasa, dalam usaha pertaniankontrak beberapa hal yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sudah ditentukan didepan. Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi serta penggunaan input produksi. Sementara pemasarannya menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pemberian output produksi yang dihasilkan oleh petani. Selain jaminannya dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, pinjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan atau nasehat teknis lainnya (Sayogyo,1997 dalam Puspitasari, 2003).



Gambar 1. Skema Prinsip Kerjasama Dasar Hubungan Usaha Pertanian Kontrak

Prinsip dalam kemitraan harus dijalankan dan diperhatikan karena dengan itu maka kemitraan akan berjalan dengan baik sehingga tujuan awal dari kemitraan tersebut juga akan tercapai.

2.2.6 Peranan Para Pelaku dalam Kemitraan Usaha

Dalam Ekawati (2005), terdapat beberapa pihak yang terkait dalam kemitraan usaha yaitu perusahaan dan petani sebagai pelaku aktif dan pemerintah sebagai aktivator, dinamisator, dan stabilisator.

1. Pemerintah : menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong berkembangnya usaha (peraturan-peraturan kebijaksanaan perkreditan, pajak dan sebagainya) dan berperan sebagai penengah bila terjadi perselisihan serta sebagai pembina dan motivator baik terhadap perusahaan maupun petani.
2. Perusahaan : sebagai penyedia modal, sebagai pembimbing petani dalam pelaksanaan usahatani, menyediakan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan usahatani, menjamin atau menampung hasil dengan harga yang wajar.
3. Petani : menerapkan rekomendasi teknologi dalam usahatani, memanfaatkan teknologi dan sarana produksi seoptimal mungkin, menyiapkan hasil pertanian dengan harga kesepakatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam model kemitraan peran antara petani, perusahaan, dan pemerintah sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

2.2.7 Jenis Kemitraan

Sedangkan menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006) menyatakan beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan di Indonesia antara lain:

1. Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pihak inti dibentuk sebagai *nucleus estate* yang mencakup sebuah perusahaan yang dikelola sendiri dan sebuah unit pengelolaan dimana sejumlah petani di sekitarnya (*outgrower*) menjanjikan akan menyediakan hasil pertaniannya kepada inti.

a) Program Kemitraan PKBL

Program Kemitraan adalah program pemberdayaan usaha mikro dan/atau usaha kecil yang dilakukan BUMN dalam bentuk pemberian pinjaman dalam rangka penguatan modal usaha yang disertai dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk bantuan manajerial, bantuan produksi dan bantuan pemasaran. Pada tahun 2007, BUMN telah menyalurkan pinjaman dana Program Kemitraan senilai Rp 944,9 milyar yang diserap oleh + 47 ribu unit usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan jumlah pengeluaran dana pendampingan untuk capacity building yang bersifat hibah adalah sebesar Rp 72,2 milyar. Nilai penyaluran tersebut (pinjaman dan hibah) mencapai 94,9% dari target tahun 2007 sebesar Rp 1.071,3 milyar. Pencapaian target penyaluran pada tahun 2007 tersebut lebih baik jika dibanding pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 pencapaian target penyaluran hanya sebesar 65,3% sedangkan pada tahun 2004 sebesar 60,9%. Apabila dirinci menurut BUMN pelaksana (BUMN Pembina), terdapat 5 (lima) perusahaan dengan nilai penyaluran pinjaman diatas Rp 50 milyar dalam tahun 2007, yaitu PT Telkom tbk, PT Pertamina, PT Bank BRI tbk, PT Bank Mandiri tbk, dan PT Perkebunan Nusantara X. Penyaluran pinjaman lima BUMN ini mencapai Rp 489,6 milyar atau 53% dari penyaluran dana Program Kemitraan nasional tahun 2007. Adapun BUMN Pembina yang menyalurkan pinjaman antara Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan

dengan total penyaluran Rp 267,5 milyar atau 29% dari jumlah penyaluran nasional. BUMN lain menyalurkan dibawah Rp 10 milyar.

Darigambaran penyaluran dana Program Kemitraan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 terdapat 22 (duapuluh dua) BUMN sebagai pelaku utama pelaksana Program Kemitraan. Penyaluran dana Program Kemitraan 22 BUMN tersebut mencapai 82% dari penyaluran dana Program Kemitraan secara nasional.

Dari sisi UMK yang menyerap dana, penyaluran dana pinjaman pada tahun 2007 terbesar diserap oleh UMK yang bergerak atau berusaha di sektor perdagangan (29,7%) di ikuti oleh sektor jasa (14,2%) dan sektor industri (12,0%). Sektor yang paling sedikit menyerap Pinjaman Dana Program Kemitraan adalah sektor perkebunan (0,7%) dan sektor perikanan(1,2%).

Beberapa penyebab rendahnya penyerapan sektor perkebunan, perikanan dan peternakan antara lain :

- a) Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha di sektor tersebut relatif cukup besar;
- b) Resiko usaha di sektor tersebut relatif cukup tinggi mengingat usaha sangat tergantung pada kondisi alam;
- c) Keterbatasan kemampuan pengelola PKBL dalam melakukan pembinaan sektor tersebut.

Jika BUMN Pembina dikelompokkan menurut kelompok/sektornya, maka terdapat 5 (lima) sektor BUMN dengan nilai penyaluran pinjaman diatas Rp 50 milyar, yaitu BUMN sektor Perbankan, BUMN sektor Telekomunikasi, BUMN sektor Energi, BUMN sektor Perkebunan dan BUMN sektor Asuransi. Penyaluran 5 kelompok BUMN tersebut mencapai 74% dari total penyaluran dana pinjaman Program Kemitraan nasional pada tahun 2007. Disamping 5 (lima) kelompok BUMN tersebut, terdapat 11 kelompok BUMN yang menyalurkan pinjaman antara Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar.

2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha yang mkemproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan sebagai komponen produksi.

3. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang menyuplai kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis khususnya hortikultura banyak menerapkan pola ini, seperti kemitraan antara toko swalayan dengan petani.

4. Pola Waralaba

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen.

5. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari pengusaha besar sebagai mitranya.

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006), mengenalkan konsep agribisnis dengan *contract farming* yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberi kontrak untuk menyediakan saprodi pada sebuah usaha sentral dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh perusahaan, sistem ini dijuluki dengan model “INTI SATELIT”, dan di Indonesia lebih dikenal dengan model PIR “Perusahaan Inti Rakyat”.

1. Pola Inti Swasta

Yaitu adanya perubahan sebagai inti dan plasma. Pola inti plasma adalah berupa hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah bertindak sebagai inti, sedangkan usaha kecil sebagai plasma

2. Pola Pengusaha Penghela

Yaitu produk plasma yang diserap oleh perusahaan inti namun bukan bagian dari perusahaan inti sebagai pemasar produk dari plasma. Pola ini merupakan keterkaitan contoh tidak langsung karena plasma dengan inti tidak memiliki hubungan secara langsung.

3. Pola Vendor

Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan inti namun bukan bagian dari produk perusahaan inti. Pola ini merupakan kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar dan menengah dalam penyediaan barang dalam manajemen usahanya.

4. Pola Subkontrak

Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan inti serta merupakan bagian produk dari inti. Pola ini bapak angkat dan anak angkat terjalin hubungan dalam suatu kontrak, baik dalam penyediaan saprodi dan penyediaan produksinya pengusaha kecil. Dengan adanya jaminan pasar yang jelas serta harga yang layak diharapkan usaha kecil dapat berkembang dengan pesat.

5. Pola Koordinasi Vertikal

Yaitu dimana semua tahapan produksi dirangkul dalam suatu perusahaan dan peran pasar tidak berarti. Saprodi dan bahan input disediakan oleh perusahaan inti sehingga petani mirip sebagai manajer atau seorang pekerja borongan.

Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat digolongkan menjadi:

1. Kemitraan Jangka Panjang

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu relatif lama dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini merupakan saling ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalan, kualitas kontrol, manajemen

2. Kemitraan Jangka Menengah

Kemitraan ini adalah bentuk kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan dapat dilakukan dengan atau tanpa kemitraan.

3. Kemitraan Insidental

Merupakan bentuk kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi dalam jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan tersebut selesai. Kemitraan ini dijalin dengan atau tanpa kesepakatan kontrak kerja. Seperti dalam penyediaan saprodi dan pemasaran produk.

Berdasarkan sumber dan pengaturan modal, pola kemitraan dapat dibedakan menjadi:

1. Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil

Merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu perusahaan pembimbing dengan petani dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sumber permodalan dalam kerjasama ini berasal dari perusahaan pembimbing yang berupa saprodi.

2. Kerjasama melalui Kredit Komersial

Pola kerjasama ini merupakan kerjasama antara tiga pihak yaitu perusahaan, petani/koperasi, dan perbankan. Perbankan merupakan pihak kreditur serta pemegang jaminan terhadap produk yang dihasilkan.

3. Kerjasama melalui Laba BUMN

Koperasi atas nama petani memperoleh pinjaman dalam bentuk saprodi dari bentuk BUMN. Peran aktif pemerintah tetapi tidak secara terbuka kepada pihak petani namun melalui badan-badan usaha yang dimiliki oleh negara.

Hubungan kemitraan terbentuk dengan berbagai pola dan setiap pola berkaitan dengan kondisi daerah dan kemampuan masing-masing unsur. Beberapa pola kemitraan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi daerah adalah :

1. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Pengelola (PKP3)

Hubungan kemitraan ini antara Perusahaan Pembimbing yang berfungsi memberikan bimbingan teknologi, pengelolaan usahatani, bantuan sarana produksi, kredit dan pemasaran hasil produksi kepada petani binaannya melalui petani atau gabungan kelompok tani. Untuk melaksanakan bimbingan dan pemberian bantuan tersebut, perusahaan pembimbing bekerjasama dengan mitra media yang akan berhubungan langsung dengan kelompok tani. PKP3 ini pada dasarnya menyediakan modal kerja untuk pengolaan usahatani bagi petani yang bersumber dari mitra usaha. Untuk meringankan beban petani maka disediakannya modal berupa Kredit Usahatani (KUT), agar petani dapat memperbaiki proses produksi usahatannya. Dalam hal ini mitra usaha memberikan rekomendasi kepada bank pemberi kredit sebelum direalisasi. Rekomendasi ini sebagai jaminan pengembalian kredit oleh petani melalui pembayaran penjualan produksi para petani kepada perusahaan.

2. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Penghela (PKP2H)

Dalam pola ini mitra usaha yaitu Perusahaan memberi bimbingan teknologi, pengelolaan usahatani, dan pemasaran hasil kepada kelompok tani. Bantuan sarana produksi dan kredit diperoleh petani dari pihak lain atau secara swadana. Dalam membimbing teknologi dan pemasaran, pihak mitra usaha tetap menggunakan mitra media yang akan berhubungan langsung dengan kelompok tani.

3. Pola Kemitraan dengan Perusahaan system Yarnen (PKY)

Pola kemitraan ini mudah dilakukan oleh petani bersama mitranya yaitu perusahaan, BUMN, Koperasi, Pengusaha kios sarana produksi, penjual jasa pengolah hasil pertanian, pelepas uang, penampung hasil pertanian atau tengkulak dan sebagainya. Pola kerjanya amat sederhana, Perusahaan mempunyai debitur (petani) tetap sekitar 40-50 orang (1-2 kelompok tani) dengan memberikan pinjaman modal kerja yang akan dibayar setelah panen dalam bentuk natura atau tunai. Pemberian modal kerja kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produksi sehingga petani mampu mengembalikan pinjaman dengan atau tanpa bunga. Prosedurnya amat sederhana harga jual biasanya ditentukan oleh perusahaan atau menurut harga umum.

a) Program Bina Lingkungan

Pada tahun 2007 telah disalurkan bantuan Bina Lingkungan sebesar Rp405,5 milyar yang disalurkan dalam bentuk bantuan bagi korban bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan kesehatan, bantuan perbaikan prasarana/sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam dan BUMN Peduli.

Bantuan bencana alam Tahun 2007 diberikan kepada masyarakat korban bencana alam, antara lain bantuan kepada pengungsi akibat meletusnya Gunung Gamkonora (Halmahera Barat) oleh PT Bank Mandiri tbk dan PT Aneka Tambang tbk, korban gunung Kelut, bantuan banjir di Halmahera Selatan oleh PT Aneka Tambang tbk, banjir di Kampung Landuh dan Kampung Benua Raja (Aceh Tamiang) oleh PT Pertamina, bantuan korban gempa bumi di Sumbar dan Bengkulu, dan lainnya. Bantuan diberikan dalam bentuk air bersih, tenaga medis dan obat-obatan, perahu karet, dan sebagainya.

Bantuan pendidikan/pelatihan diberikan dalam bentuk beasiswa, pemagangan/studi banding, bantuan sarana/prasarana belajar dan lainnya. Beberapa bantuan yang telah diberikan antara lain workshop kewirausahaan kepada 500 orang wirausaha muda oleh Bank Mandiri, renovasi 50 SD sepanjang Pantura serta bantuan beasiswa kepada 9786 siswa SD, 2744 siswa SMP, 1914 siswa SMA dan 448 mahasiswa oleh PT Pertamina.

Bantuan prasarana/sarana umum diberikan dalam bentuk penyediaan sarana air bersih, rehabilitasi saluran air, rehabilitasi/perbaikan jalan umum/jembatan, penyediaan MCK umum, dan lain sebagainya, bantuan ibadah diberikan dalam bentuk rehabilitasi rumah ibadah/rumah panti asuhan dan sebagainya.

Bantuan Kesehatan diberikan dalam bentuk pengobatan gratis, khitanan massal, renovasi Posyandu, pengasapan (fogging), dan sebagainya. Bantuan yang telah diberikan antara lain pemberian pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan gizi untuk 3000 balita dan 116 ibu hamil oleh PT Pertamina. Pelayanan kesehatan gratis kepada Balita dan ibu hamil oleh PT Pertamina tersebut diakui dunia melalui penghargaan Millenium Development Goals Award (MDGA) Tahun 2007 dari PBB untuk kategori pengurangan angka kematian balita dan ibu hamil.

Bantuan pelestarian antara lain dalam bentuk penghijauan kembali lahan-lahan kritis baik yang berada disekitar wilayah operasi perusahaan maupun sekitar wilayah usaha.

Bantuan BUMN Peduli antara lain diberikan dalam bentuk Program Rehabilitasi Sumbar Pasca gempa dengan membangun 6 (enam) sekolah dasar/menengah, dan Program Desa Mandiri Energi yaitu program pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka menengah berupa penyediaan energi alternatif melalui pengembangan perkebunan jarak seluas 3750 Ha di Grobogan Jawa Tengah.

Komposisi bantuan terkecil Program Bina Lingkungan adalah bentuk bantuan pelestarian alam, hal ini disebabkan karena jenis bantuan pelestarian alam mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-07/MBU/2007 tentang PKBL.

Pada tahun 2007 terdapat 6 (enam) BUMN dengan penyaluran bantuan Bina Lingkungan diatas Rp 30 milyar, yaitu PT BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT

PLN, PT Telkom Tbk, PT Pertamina dan PT BRI Tbk. Nilai penyaluran Bina Lingkungan 6 (enam) BUMN tersebut mencapai 70,0% dari total penyaluran bantuan Bina Lingkungan seluruh BUMN di tahun 2007.

Disamping 6 BUMN tersebut, pada tahun 2007 terdapat 8 (delapan) BUMN dengan nilai penyaluran bantuan Bina Lingkungan antara Rp 5 milyar s/d Rp 15 milyar serta terdapat 19 (Sembilan belas) BUMN dengan nilai penyaluran bantuan Bina Lingkungan antara Rp 1 milyar s/d Rp 5 milyar, sisanya hanya menyalurkan bantuan dibawah Rp 1 milyar.

Berbagai macam pola kemitraan dapat diterapkan di berbagai daerah secara selektif dan ditentukan oleh kondisi pertanian yang sedang berlangsung, tingkat kemampuan petani, perusahaan pembimbing dan unsur pendukung setempat. Dengan pola kemitraan ini maka 1) produksi pertanian dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, 2) petani dapat menentukan dan memastikan pasar yang akan dituju dengan harga yang pasti dan tetap, 3) penerimaan petani dapat ditetapkan sehingga keuntungan sudah dapat dipastikan, 4) petani mudah mendapatkan peralatan dan sarana produksi, 5) petani bertambah pengetahuan dan ketrampilannya. Bagi mitra perusahaan dapat mempertahankan usahanya bahkan dapat memperluas usahanya (Syafi'i, 2001 *dalam* Laili, 2007; 6).

Ada tiga bentuk hubungan kontrak dalam contract farming yang perlu dicermati, yaitu:

1. Hubungan kontrak produksi, pihak ini terlibat penuh dalam penentuan jenis varietas, penyediaan bibit, penyediaan sarana-sarana penunjang produksi dan penentuan metode proses produksi disamping menentukan jumlah dan kualitas hasil produksi yang harus disediakan oleh pihak petani produsen.
2. Bentuk kontrak pemasaran, pihak inti hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang akan diserahkan oleh petani produsen. Biasanya dalam kontrak sejenis ini pihak inti tidak mengintrodusir metode-metode atau langkah-langkah yang harus diambil oleh petani produsen dalam proses produksi.
3. Bentuk integrasi vertikal semua tahapan proses produksi berada dalam kendali pihak pemberi kontrak. Di tingkat awal, pemberi kontrak menguasai seluruh alat produksi kecuali tenaga kerja, dan petani produsen menguasai

tenaga kerja dan ketrampiannya. Kemudian melalui kontrak petani-petani ini men jual tenaga dan ketrampilan mereka balik secara individual maupun kolektif, langsung atau tak langsung ditukar dengan hasil produksi yang saat itu juga kembali mereka serahkan kepada pemberi kontrak. Meski demikian pihak inti tidak membayar seberapa besar tenaga yang dicurahkan oleh petani-petani tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Pihak pemberi kontrak hanya memborongkan pekerjaan proses produksi untuk menghasilkan sejumlah produk yang telah ditetapkan harus disediakan oleh petani terlepas dari seberapa banyak mereka menggunakan tenaga untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Adapun hubungan usahatani kontrak (*contract farming*) informal, tanpa bukti tertulis, selama ini merugikan petani. Hubungan kontrak usahatani itu tumbuh berurat berakar secara tradisional, namun sering kali masih memposisikan petani secara lemah. Petani sulit mendapat akses terhadap pasar, tak bisa menawar harga jual, dan tidak gampang mendapat sarana produksi.

Dalam pertanian ada kemitraan *contract farming* model ini mempunyai ciri paling penting yaitu merupakan perjanjian antara petani kecil dengan penyuplai atau pengolah yang menggantikan pertukaran dipasaran bebas. Disamping itu model ini dapat menghindari penguasaan tanah secara besar-besaran yang sering terjadi. Masalah yang terjadi di negara berkembang oleh perusahaan besar (Wilson dan Karen,1985) dalam Bakhrie (2006).

Jadi dalam model *contract farming* ini terdapat suatu hubungan produksi yang mengikat petani untuk menyediakan sejumlah hasil pertaniannya dalam batasan tertentu (harga, mutu dan jumlahnya) yang seringkali tidak bisa disetarakan dengan jumlah tenaga yang harus dialokasikan. Dalam banyak kasus petani-petani plasma tidak lagi memiliki kebebasan bermain di pasar bebas untuk surplus produksi yang mereka miliki karena seringkali akses di pasar bebas tersebut tidak tersedia atau tidak mereka miliki (Bachriadi, 1996 dalam Ekawati, 2005).

Jenis pola kemitraan atau model kemitraan sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh sebab itu sebelum menjalankan kemitraan dengan pihak lain maka perlu diperhatikan model atau pola kemitraan mana yang cocok untuk digunakan sehingga dalam proses kemitraan semuanya akan berjalan dengan baik.

2.2.8 Permasalahan Kemitraan

Menurut Hafsa (1999) dalam Yusnitasari (2006), menyatakan bahwa terdapat beberapa yang menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan kemitraan yang meliputi aspek sosial budaya petani, usahatani, kelembagaan petani, permodalan, pengolahan hasil, pemasaran serta peraturan dan kebijaksanaan pemerintah yang mengatur hubungan kemitraan.

Masalah dan kendala umum dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Posisi tawar menawar (*Bergainning Position*). Dimana posisi tawar menawar petani sangat lemah terutama dalam penentuan harga produk.
2. Hubungan komplementer, pola hubungan antara inti dan plasma sering menjadi hubungan antara yang kuat dan lemah yang tidak komplementer. Sering terjadi kecenderungan bapak angkat memanfaatkan anak angkat (petani/KUD) secara berlebihan sehingga timbul kesan eksploitasi.
3. Kesamaan visi, masalah yang timbul antara lain karena adanya kesamaan visi, persepsi dan kemampuan masing-masing pihak terhadap bentuk kemitraan tersebut.

Masalah dan kendala dari pihak petani dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Sarana produksi, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan sarana produksi belum optimal apalagi kualitas dan kontinuitas belum terjamin.
2. Petani, orientasi usaha yang masih cenderung subsisten dan belum berorientasi bisnis, skala usaha yang masih belum ekonomis serta masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan.
3. Permodalan, masih terbatasnya modal sendiri serta kurang tersedianya modal/sumber-sumber permodalan untuk pengembangan usahatannya.
4. Manajemen, teknologi dan pemasaran, terbatasnya kemampuan, ketrampilan serta penggunaan dan penerapan teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatannya.
5. Infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana pendukung usahatani khususnya transportasi yang masih mahal dan sulit.

Masalah dan kendala dari pihak perusahaan dalam pengembangan kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Bahan baku, kualitas yang belum memenuhi standart. Kontinuitas yang kurang terjamin dan bahan baku maupun bahan pembantu yang relatif tinggi karena regulasi tata niaga dan sistem pemasaran yang tidak efisien.
2. Tenaga kerja, masalah tenaga kerja yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja trampil yang memiliki keterampilan dan minat yang cukup tinggi terhadap usaha yang dijalankan.
3. Modal, kurang tersedianya sumber-sumber permodalan yang aksesnya untuk pengembangan usaha, baik modal investasi maupun modal kerja serta tingkat bunga pinjaman yang masih relatif tinggi.
4. Manajemen, terbatasnya tenaga-tenaga manajemen yang memiliki kemampuan dan keterampilan pengelolaan usaha secara umum masih lemah.
5. Teknologi, masih terbatasnya aksesibilitas dan penerapan teknologi yang memadai dalam pengembangan usaha.
6. Pemasaran, masih rendahnya kualitas, tinggi harga serta kurangnya informasi pasar produk menyebabkan pemasaran terutama ekspor menjadi sangat terbatas.
7. Faktor pendukung, kondisi infrastruktur yang kurang mendukung menyebabkan transportasi dan komunikasi serta sistem informasi menjadi ma sehingga biaya produksi secara keseluruhan menjadi naik dan pada gilirannya produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasaran (baik nasional maupun internasional).

Dalam hal ini yang bisa menjadi sumber permasalahan dalam kemitraan adalah kedua belah pihak yaitu perusahaan dan petani atau kelompok tani tersebut. Sebaiknya permasalahan-permasalahan itu dapat dilalui oleh kedua belah pihak sebab semua permasalahan yang terjadi dapat mempengaruhi proses kemitraan yang terjadi antara perusahaan dan petani atau kelompok tani baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2.2.10 Faktor Penyebab Permasalahan Kemitraan Usaha

Adanya permasalahan pada pelaksanaan pola kemitraan disebabkan oleh banyak hal yaitu :

1. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh inti maupun plasma terhadap kesepakatan kerjasama yang telah dibuat baik dalam segi hak maupun kewajiban
2. Adanya perbedaan visi/orientasi, dimana perusahaan besar "*profitoriented*" sedangkan petani cenderung untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten).
3. Kondisi petani yang memiliki ketrampilan kurang, sementara perusahaan agroindustri yang bersifat *manufacture*, menuntut manajemen yang lebih mapan atau terorganisir.
4. Keterbatasan modal pada perusahaan inti.
5. Pengelolaan usaha yang lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dapat diminimalisir sehingga di dalam proses kemitraan berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tujuan pun dapat tercapai.

2.5 Perkebunan

Usaha perkebunan terdiri dari usaha budidaya perkebunan dan usaha industry. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan no. 107KPTS/2 Tahun 1999, usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman. Usaha industry perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan nilai tambah, sebagai contoh dari usaha industry perkebunan adalah ekstraksi kelapa sawit, industri gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hija, lateks dan lain sebagainya.

Pengusahaan tanaman perkebunan di Indonesia dilakukan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang terdiri dari perkebunan besar swasta dan

perkebunan besar Negara (PNP/PTP/BUMN). Menurut BPS (2005) dalam Yarsi, A. (2006) perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha dan badan hukum di atas tanah Negara yang mendapat ijin dari instansi yang berwenang diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Perkebunan besar memiliki ciri-ciri usaha antara lain: (1) Merupakan bentuk usaha pertanian berskala luas dan kompleks, (2) menggunakan areal pertanahan yang luas, (3) bersifat padat modal, (4) menggunakan tenaga kerja yang cukup besar, dengan pembagian kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi, (5) menggunakan teknologi modern, dan (6) berorientasi pada pasar. Hal ini berbeda sekali dengan perkebunan rakyat dengan ciri-ciri usaha sebagai berikut: (1) bentuk usahanya kecil, (2) penggunaan lahan terbatas, (3) tidak padat modal, (4) sumber tenaga kerja terpusat pada anggota keluarga, dan (5) lebih berorientasi pada kebutuhan subsisten (Mubyarto, 1992).

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu alternative aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan pembangunan perkebunan di Negara Indonesia menurut Siahaan (1995) dalam Yarsi, A (2006) adalah:

1. Menaikkan penerimaan devisa dan pendapatan Negara.
2. Penyediaan lapangan pekerjaan/ sumber mata pencaharian dan lapangan usaha.
3. Turut membantu dan melaksanakan kelestarian alam yang lebih terjamin.
4. Membantu usaha pemerintah dalam bidang kegiatan lainnya seperti transmigrasi, pengaturan pemilikan tanah, penggalakan koperasi, penataan desa dan sebagainya.
5. Menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan Indonesia.
6. Turut menciptakan pembangunan/ pertumbuhan ekonomi "*Growth Center*" baru.

Kebijakan pembangunan perkebunan oleh pemerintah difokuskan untuk mengembangkan perkebunan rakyat yaitu dengan pola kemitraan dengan perkebunan besar. Dalam pelaksanaan pola kemitraan ini, petani tergabung dalam suatu kelembagaan petani misalnya koperasi yang akan memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. 107KPTS2 tahun 1999 ketentuan mengenai pola usaha perkebunan adalah:

1. Pola koperasi usaha perkebunan yaitu pola pengembangan yang sahamnya seratus persen dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan.
2. Pola patungan koperasi dan investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor atau perusahaan.
3. Pola patungan investor dan koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor atau perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
4. Pola BOT (*Build, operate and Transfer*) yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor atau perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
5. Pola BTN yaitu pengembangan dimana investor atau perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkn kepada peminat atau pemilik yang tergabung dalam koperasi.

2.4 Perkebunan Tebu

2.4.1 Sejarah Perkebunan Tebu di Indonesia

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum L*) adalah satu anggota familia rumput-rumputan(Graminae) yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika, pada berbagai jenis tanah dari daratan rendah hingga ketinggian 1.400 m di atas permukaan laut (dpl). Tanaman tebu telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu oleh bangsa Persia, Cina, India dan kemudian menyusul bangsa Eropa yang memanfaatkan sebagai bahan pangan bernilai tinggi yang dianggap sebagai emas putih, yang secara berangsur mulai bergeser kedudukan bahan pemanis alam seperti madu.

Berdasarkan catatan sejarah, sekitar tahun 400-an tanaman tebu telah ditemukan tumbuh di beberapa tempat di P. Jawa, P. Sumatera, namun baru pada abad XV tanaman tersebut diusahakan secara komersial oleh sebagian imigran Cina. Diawali kedatangan bangsa Belanda di Indonesia tahun 1596 yang kemudian mendirikan perusahaan dagang *Vereeniging Oost Indische Compagnie* (VOC) pada bulan Maret 1602, mulailah terbentuknya industri pergulaan di Indonesia, yang kemudian dipacu dengan semakin meningkatnya permintaan gula dari Eropa pada saat itu.

Sejarah Industri gula di Indonesia, khususnya di Jawa penuh dengan pasang surut. Pada dekade 1930-an industri gula di Indonesia mencapai puncaknya dengan produksi gula sebesar 3 juta ton dengan areal pertanaman seluas 200.000 ha yang terkonsentrasi di Jawa. Pada masa itu terdapat +179 pabrik gula yang mampu memproduksi 14,8 ton gula/ha.

Usaha budidaya tebu di Indonesia dilakukan pada lahan sawah berpengairan dan tadah hujan serta pada lahan kering/tegalan dengan rasio 65% pada lahan tegalan dan 35% pada lahan sawah. Sampai saat ini daerah/wilayah pengembangan tebu masih terfokus di Pulau Jawa yakni di Provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Barat yang diusahakan di lahan sawah dan tegalan. Sedangkan usahatani tebu pada lahan tegalan pengembangannya diarahkan ke Luar Jawa seperti di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Kedepan Pemerintah juga telah mecanangkan rencana pengembangan ke provinsi lain yang cocok dan sesuai berdasarkan agroklimat dengan membuka peluang investasi pembangunan industri gula berbasis tebu yang terintegrasi di beberapa provinsi seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Adapun berdasarkan hasil survey P3GI potensi untuk pengembangan industri gula masih terbuka seperti di Provinsi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah seluas + 800.000 Ha. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha industri gula berbasis tebu adalah Pengelolaan pada aspek on-farm yakni penerapan kaidah teknologi pertanaman yang baik dan benar mulai dari persiapan lahan, pengolahan dan penanaman yang mengikuti kaidah masa tanam optimal, Pemilihan dan komposisi varietas bibit unggul bermutu, Penggunaan, pemeliharaan serta tebang angkut muat (panen).

Dalam budidaya tanaman tebu bibit merupakan salah satu modal (investasi) yang menentukan jumlah batang dan pertumbuhan selanjutnya hingga menjadi tebu giling beserta potensi hasil gulanya. Oleh karena itu penggunaan bibit unggul bermutu merupakan faktor produksi yang mutlak harus dipenuhi. Sehingga Pemerintah merasa perlu mengatur pengawasan peredaran bibit melalui sertifikasi yang merupakan satu proses pemberian sertifikat bibit setelah melalui

pemeriksaan, pengujian dan pengawasan untuk persyaratan dapat disalurkan dan diedarkan.

Sampai saat ini pusat Penelitian telah menghasilkan berbagai macam varietas unggul seperti PS851, PS862, PS863, PS864, PSBM901, PS921, Bululawang, PSCO902, PSJT941, Kidang Kencana, PS865, PS881, PS882 dan varietas Kentung yang merupakan varietas-varietas unggulan dengan kategori pengelompokan masak awal, masak tengah dan masak akhir sebagai salah satu penerapan manajemen pembibitan untuk menyelaraskan pelaksanaan tertib tanam dan panen. Sejauh ini pengadaan bibit tebu dilakukan melalui tahapan penjenjangan kebun pembibitan, mulai dari Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) hingga Kebun Bibit Datar (KBD) sebagai sumber bibit bagi pertanaman atau Kebun Tebu Giling (KTG). Kedepan dalam mengantisipasi ketersediaan bibit telah dicanangkan pengadaan bibit melalui tahapan kultur jaringan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam jumlah maupun waktu.

Pada aspek off-farm peranan Pabrik Gula selaku unit pengolah tebu menjadi gula kristal putih sangat menentukan. Dari proses tersebut akan dihasilkan produk berupa gula kristal putih yang dikenal dipasar dengan *plantation white sugar* atau gula pasir. Disamping hasil ikutan lainnya berupa tetes (molases) yang saat ini masih dimanfaatkan untuk bahan baku pabrik alkohol/spritus dan bumbu masak/MSG disamping hasil ikutan lainnya berupa *Particle Board*, pakan ternak, kertas dan bahan baku industri lainnya. Kegiatan pengolahan tebu menjadi gula ditempuh melalui berapa tahapan yaitu pasokan tebu ke pabrik gula, penilaian tebu, penggilingan, pemurnian nira, penguapan, pengkristalan, pengeringan dan pengemasan serta penyimpanan (ditjenbun, deptan.go.id)

2.4.2 Klasifikasi Tebu

Filum	: Angiospermae
Sub Filum	: Monocotyledoneae
Divisi	: Glumiflorae
Ordo	: Graminales
Familia	: Gramineae

Sub Familia : Panicoideae
Tribe : Andropogoneae
Sub Tribe : Saccharine
Genus : Saccharum
Spesies : *Saccharum officinarum* L.

(Benson, L. 1957).

2.4.3 Iklim dan Syarat Tumbuh

Syarat Tumbuh yang harus diperhatikan dalam budidaya Tebu adalah sebagai Berikut:

1. Kesesuaian Iklim

Daerah penyebaran tebu berada di antara 35° garis LS dan 39° garis LU. Tumbuhan ini dapat hidup pada berbagai ketinggian mulai dari pantai sampai dataran tinggi 1.400 m dpl namun mulai ketinggian 1.200 m dpl pertumbuhan menjadi lamban. Dasar yang digunakan Oldeman dalam menggolongkan iklim adalah bulan basah dan kering berturut – turut, menurut Oldeman bulan basah adalah suatu bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm dan bulan kering adalah suatu bulan dengan curah hujan lebih kurang dari 100 mm, penggolongan pada titik berat bulan basah, Oldeman mengemukakan 5 zone utama bulan basah, kelima zone tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Zone A, bulan basah yang kurang dari 9 kali berturut – turut
- b. Zone B, bulan basah 7 sampai 9 kali berturut – turut
- c. Zone C, bulan basah 5 sampai 6 kali berturut – turut.
- d. Zone D, bulan basah 3 sampai 4 kali
- e. Zone E, bulan basah yang kurang dari 3 kali

2. Sinar Matahari

Cruah hujan setiap bulan dan penyebarannya di suatu wilayah akan menentukan besarnya intensitas radiasi sinar matahari yang sangat diperlukan oleh tanaman. Dalam proses pertumbuhan tebu radiasi sinar matahari sangat besar peranannya, terutama untuk fotosintesis yang selanjutnya akan mengatur pertunasan dan pemanjangan batang. Pembentukan gula bisa dihambat oleh

cuaca yang berawan pada siang hari, maka proses fotosintesis akan terhambat akibatnya, jumlah anakan pada setiap rumpun menjadi berkurang. Lain halnya bila cuaca seperti ini terjadi di malam hari saat suhu akan naik, sehingga proses pernapasan meningkat, akibatnya akan mengurangi akumulasi gula pada batang tebu.

3. Angin

Agar tebu dapat tumbuh dengan baik, kecepatan angin idealnya tidak lebih dari 10 km/jam. Pada kecepatan angin seperti ini, suhu dan kadar CO₂ di sekitar tajuk tebu akan turun, sehingga fotosintesis tetap berlangsung dengan baik, apabila kecepatan angin melebihi 10 km / jam apalagi disertai hujan yang lebat maka tanaman tebu yang sudah tinggi akan roboh, robohnya tanaman tebu inilah salah satu penyebab turunya rendemen tebu. Pada saat tebu roboh ujung tanaman tumbuh lagi secara vertikal. Akibatnya sebagian sukrosa yang terbentuk digunakan untuk pertumbuhan tanaman, inilah penyebab turunya rendemen. Penelitian mengenai pengaruh tebu roboh terhadap rendemen telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan pada dua varietas komersial, yaitu M 442-51 (TRIS I) dan F 154 (TRIS II). Angin kering disertai suhu yang tinggi dapat meningkatkan penguapan air, sehingga merugikan tanaman tebu. Contohnya angin Bahorok di Medan dan angin Gending di Probolinggo.

4. Suhu

Suhu sangat menentukan kecepatan pertumbuhan tanaman tebu, sebab suhu terutama mempengaruhi pertumbuhan menebal dan memanjang tanaman ini. Suhu siang hari yang hangat atau panas dan suhu malam hari yang rendah diperlukan untuk proses penimbunan sukrosa pada batang tebu. Suhu optimal untuk pertumbuhan tebu berkisar antara 24° – 30° C, beda suhu musiman tidak lebih dari 6°, dan beda suhu siang dan malam hari tidak lebih dari 10°.

5. Kelembaban Udara

Pertumbuhan tanaman tebu tidak banyak dipengaruhi oleh kelembaban udara, asalkan kadar air di dalam tanah cukup tersedia. Perlu diketahui pada kelembaban tinggi akan terbentuk kabut yang dapat menghalangi radiasi sinar matahari, sehingga proses fotosintesis terhambat.

6. Kemiringan Lahan

Sifat dan keadaan tanah berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan kadar gula dalam tebu. Apabila tebu ditanam pada tanah yang banyak mengandung humus, pertumbuhannya akan baik sekali, walaupun kadar gulanya rendah. Di tanah pasir pertumbuhan tebu kurang baik, akan tetapi kadar gulanya tinggi, tebu yang ditanam di tanah masam dan tanah asin, pertumbuhannya jelek. Air gula yang dikandungnya tidak mudah dijadikan gula. Tanah lempung berkapur maupun berpasir, dan lempung liat sangat baik untuk tanaman tebu.

2.5 Perkembangan kebijakan program tebu di Indonesia

Setelah terjadinya proses nasionalisasi perusahaan asing dan belum terlihatnya stabilitas perekonomian di dalam negeri yang menunjukkan keuntungan, maka dalam perusahaan perkebunan tebu telah tercipta organisasi produksi baru yang berguna untuk menyesuaikan perubahan kondisi di pedesaan. Sistem tersebut adalah pemberian kepercayaan kepada petani untuk menjaga tanaman tebu pada lahan yang telah disewakan dan ditanami tebu. Petani kemudian memperoleh pembayaran berupa setengah bagian atau separo harga tebu yang dihasilkannya. Pada perkembangan selanjutnya sistem itu melahirkan sistem tebu rakyat.

Kira-kira pada 1950-an petani kecil tidak mau lagi menggunakan sistem maro, namun cenderung menyewakan tanahnya kepada pabrik, atau menanami tanahnya dengan tebu lalu setelah panen menjualnya ke pabrik gula. Proses aktivitas itu kemudian berkembang dan secara tidak langsung menjadi awal proses terbentuknya sebuah sistem dalam industri gula yaitu sistem tebu rakyat (Kartodirdjo dan Suryo, 1991: 169). Tebu rakyat mulai berkembang dan semakin luas lahannya setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia melalui Dinas Pertanian Rakyat. Setelah itu terjadi pula peningkatan produksi tebu yang digilingkan ke pabrik gula.

Pada 1955 telah dibentuk Yayasan Tebu Rakyat (Yatra) dengan tujuan untuk mendukung program yang tengah dikembangkan oleh pemerintah pada saat itu. Tugas Yatra adalah berusaha mendorong berkembangnya tebu rakyat dengan cara memberikan bantuan teknis dan kredit untuk mengusahakan tanaman tebu,

sedangkan tanggung jawab penanaman tebu tetap berada di tangan petani. Namun dalam prakteknya, Yatra dinilai tidak berjalan efektif, sehingga pada 1964 yayasan tersebut dibubarkan dan pabrik-pabrik kembali menjalankan sistem sewa (Mubyarto dan Daryanti, 1991:14).

Sejak perkebunan dan pabrik-pabrik dinasionalisasikan, pengusaha perkebunan dilakukan dengan cara sistem sewa. Hal itu didasari oleh kenyataan bahwa dari 55 pabrik yang beroperasi, hanya satu unit pabrik gula yang memiliki tanah konsesi sendiri. Pabrik-pabrik gula yang tidak memiliki tanah konsesi menggantungkan diri pada kesediaan petani untuk menyewakan tanah-tanahnya. Pada umumnya petani tidak merasa keberatan dengan permintaan pabrik gula tersebut asalkan dengan pertimbangan bahwa tingkat harga sewa tanah sebanding dengan hasil yang diperoleh apabila tanah tersebut ditanami padi. Ketika terjadi periode inflasi yang hebat pada tahun enam puluhan, maka nilai riil dari tanah tersebut menurun secara drastis dan mengakibatkan petani menjadi enggan menyewakan tanahnya lagi. Oleh karena munculnya permasalahan tersebut, maka pemerintah mencoba menerapkan sistem bagi hasil atau sistem sewa dalam bentuk natura, dan dengan seiring perkembangan nilai rupiah yang menunjukkan angka kestabilan maka ada kecenderungan pemberlakuan kembali sewa tanah karena sistem itu lebih sederhana (Mubyarto, 1994: 78).

Dalam perkembangannya, usaha produksi gula dengan sistem sewa tanah dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional. Ketidaksesuaian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kekurangan lahan tebu yang tergusur oleh tanaman tembakau Virginia, sehingga pabrik-pabrik gula mengalami kesulitan dalam memperoleh lahan sewaan dan akibatnya terjadi kemerosotan jumlah produksi tebu. Karena gula merupakan kebutuhan masyarakat yang penting, maka pemerintah memandang perlu dikeluarkannya peraturan pemerintah dalam penentuan dan penunjukan daerah-daerah tertentu untuk penanaman tebu.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964. Pada hakikatnya, peraturan tersebut menetapkan daerah-daerah tertentu untuk ditanami tebu, dengan pemberian sanksi pidana kepada mereka yang enggan menaatinya

(Soemardjan, 1984:53). Berdasarkan peraturan tersebut, para pemilik tanah yang ditunjuk pemerintah seolah tidak mempunyai pilihan lain selain menyewakan tanahnya kepada pabrik gula pada saat mendapat giliran. Namun program itu pun mengalami hambatan yang cukup berarti, yaitu terjadinya penurunan jumlah lahan sewaan. Keadaan itu disebabkan karena turunnya minat petani untuk menyediakan tanahnya bagi tanam tebu, rendahnya jumlah uang sewa yang ditetapkan pemerintah, dan bila dibandingkan dengan penerimaan petani dari hasil menggarap tanaman padi atau palawija dalam jangka waktu yang sama terasa sangat jauh berbeda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada 1975 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tanggal 22 April 1975 yang isinya menentukan bahwa untuk selanjutnya tanaman tebu tidak ditanam sendiri oleh pabrik gula namun diserahkan kepada petani untuk dikelola di atas tanahnya sendiri. Program itu dikenal dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan atas dikeluarkannya program itu setidaknya lebih sesuai dengan isi kandungan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 10 tahun 1960 yang menghendaki agar tanah pertanian diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri (Mubyarto, 1992: 64).

Kebijakan TRI merupakan langkah awal dari perubahan kebijakan usaha di sektor pertanian/perkebunan yang berbasis perkebunan besar menjadi inti rakyat. Dengan berjalannya program tersebut, maka terjadilah perubahan yang mendasar dalam sistem produksi gula Indonesia yang menempatkan petani sebagai pengusaha dan pabrik gula sebagai pengolahnya. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan sistem TRI adalah menjadikan petani tebu sebagai wiraswasta yang mampu berusaha secara mandiri, dalam bentuk kelompok-kelompok tani maupun koperasi petani serta memiliki kekuatan ekonomi (Mubyarto, 1994: 79).

Adapun isi dari ketentuan Inpres TRI yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasa diusahakan oleh rakyat, dan intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakan oleh petani dari masa pratanam hingga pengangkutan hasil panen tebu ke pabrik.
2. Agar pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat dapat berjalan dengan baik, maka pabrik gula berperan sebagai pimpinan kerja para petani dalam

- melakukan penyuluhan, bimbingan teknis pengusahaan tanaman tebu rakyat, penyedia bibit unggul, menyediakan dan melayani sarana kebutuhan produksi serta memberikan petunjuk dan pelayanan dalam pemberian kredit kepada para petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada di pabrik-pabrik gula.
3. Memenuhi kebutuhan dalam melayani permintaan kredit untuk usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi para petani yang memerlukan.
 4. Untuk melindungi petani tebu rakyat dari kemungkinan ijon yang merugikan dan untuk tertibnya pemasaran gula, maka bagian hasil yang menjadi hak petani dari tebu miliknya yang digilingkan di pabrik gula diberikan dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan sedemikian rupa sehingga menggairahkan usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat.
 5. Agar dari semula koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakan dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam usahanya meningkatkan produksi gula dan meningkatkan penghasilannya (Inpres RI, 1975).

TRI sejak diberlakukannya telah menuai kontroversi dan menjadi sorotan pers. Berbagai persoalan tersebut tidak saja menyangkut pada masa musim tanam di mana masalah bibit, biaya garap, dan pengorganisasian petani dalam produksi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, dan begitu pula pada saat panen, terjadi pula permasalahan dalam giliran tebang, pengangkutan, penetapan rendemen dan pemasaran gula bagian petani. Inpres tersebut bertujuan agar petani dapat mengusahakan sendiri tanaman tersebut di atas lahannya. Upaya itu ditunjang dengan adanya perluasan areal tebu di lahan sawah maupun lahan kering yang terdapat di Jawa maupun luar Jawa. Dengan adanya sistem baru itu, areal tebu mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu 1975 hingga 1980, areal tebu meningkat dari 104.777 ha menjadi 188.722 ha atau meningkat 80.17 persen. Sementara itu produksi gula meningkat dari 1.035.000 ton menjadi 1.249.000 ton atau meningkat 20.69 persen. Namun di sisi lain produktivitas mengalami penurunan kira-kira 5 persen per tahun. Hal itu berarti peningkatan produksi total tersebut hanya diakibatkan adanya peningkatan areal tanaman tebu (Mubyarto dan Daryanti, 1991:17). Produktivitas yang menurun tersebut disebabkan oleh karena petani lebih

mementingkan tanaman pangan, sehingga tanaman tebu menjadi tersampingkan, selain itu petani lebih sering menanam tebu pada lahan yang lebih rendah tingkat kesuburannya.

Sebagai pengusaha, petani tidak dibekali pengetahuan tentang pengusaha tebu, sehingga kurang terlibat dalam aktifitas penanaman tebu. Dengan kata lain pada saat itu hubungan petani dengan tanaman tebunya tidak memiliki unsur emosional. Hal tersebut menjadikan petani seolah kurang peduli terhadap tanamannya. Di sisi lain pemilihan tanah yang sempit menjadikan kurang efisiennya pengusaha tebu. Pada akhirnya kondisi seperti itu mengakibatkan terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan program TRI yaitu dengan munculnya pengusaha yang menyewa lahan petani tebu. Para pengusaha itu kemudian dikenal secara resmi sebagai petani TRI, namun dalam kenyataannya mereka menyewa tanah petani dengan jangka waktu yang lama.

Sebenarnya kegiatan penyewaan tanah dalam penanaman tebu telah dilarang sejak diberlakukannya Inpres nomor 9/1975, namun secara tidak langsung proses penyimpangan itu tetap berlanjut melalui pengusaha, baik dalam bentuk TRI (dengan Kredit) maupun TRB (non-kredit BRI). Hal yang sangat memprihatinkan pada masa itu adalah semakin banyaknya petani yang menyerahkan tanahnya kepada para pengusaha tebu (cukong) (Soemardjan, 1984: 170-171).

Pada daerah – daerah yang petaninya sejak lama mengenal usahatani tanaman tebu ketua Ketua Kelompok hanya berfungsi dalam koordinasi. Berbeda halnya dengan pengelolaan di daerah – daerah baru atau pada daerah bekas tanah sewa Pabrik Gula, dimana petani tidak biasa menanam tebu di daerah tersebut, oleh karena itu, mereka hanya menyerahkan tanahnya kepada pihak “cukong tebu”. Masalah lainnya yang menyebabkan para petani enggan menanam tebu antara lain disebabkan kebutuhan pangan yang mendesak, adanya kesempatan kerja yang lebih baik di luar tanaman tebu dengan risiko yang lebih kecil, adanya pemilik tanah yang bekerja bukan sebagai petani dan sikap mental petani yang lebih sulit dengan tanaman tertentu selain usahatani tanaman tebu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tatanan pertanian pada tanaman tebu tidak

selalu berjalan lancar walaupun telah diikuti oleh perubahan tingkat kesejahteraan petani (Sukei, 2002)

Di masa rezim Orde Baru, TRI dinyatakan sebagai "program nasional". Sebutan yang identik dengan keramat. Kemudian, sebagai sesuatu yang "dikeramatkan", TRI wajib diamalkan dan dilaksanakan. Apabila terdapat petani yang memiliki pola pemikiran yang berseberangan, maka mereka disebut sebagai penghambat pembangunan, atau biasa disebut subversif. Di era TRI, pola glabagan peninggalan tanam paksa dihidupkan kembali. Desa wajib melaksanakan TRI secara bergiliran. Namun, bagi petani gurem yang lahannya di bawah 0,25 hektar, tebu jelas tidak menguntungkan. Belum lagi risiko gagal panen yang bisa berakibat lahan harus dijual. Selain itu, masa tanamnya terlalu lama (18 bulan) dan birokrasi TRI yang berliku masih membutuhkan uang pelicin. Untuk menghindari dari kewajiban melaksanakan TRI, mereka memilih menyewakan lahannya dan memburuh kepada penyewa. Pada saat lain, mereka berangkat ke kota sebagai kuli bangunan, penarik becak, atau apa saja. Keadaan itu menyebabkan terjadinya penguasaan lahan secara besar-besaran. Pemilik uang dari kota bersekongkol dengan aparat desa, kecamatan, kabupaten, dan pabrik gula untuk menguasai lahan pertanian.

Perbedaan yang terdapat antara sewa tanah dan TRI adalah bahwa dalam sistem TRI lebih banyak pihak yang terlibat, dengan membawa kepentingannya masing-masing. Sektor swasta menjadi lebih penting dalam peranannya melakukan berbagai proses pengangkutan, pemasaran gula bagian petani dan pemberian jasa umumnya dalam bentuk produksi dan pemasaran. Hal yang paling menarik dari sistem TRI itu adalah bertambah besarnya peran pemerintah dalam penyampaian dan penerangan berbagai peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem TRI. Seharusnya pekerjaan pabrik gula menjadi lebih ringan karena tugasnya semata-mata hanya menggiling, namun pada kenyataannya justru sebaliknya pabrik gula menjadi bagian dari pemerintah yang mempunyai tugas memberikan pengarahannya tentang TRI kepada petani sekaligus membina petani itu sendiri, dan menjadi anggota terpenting dari satuan-satuan pelaksana program pemerintah yang berhubungan dengan TRI.

Pada umumnya suasana kerja di lingkungan pabrik gula menjadi kurang kondusif sejak diberlakukan sistem TRI. Banyak staf yang menginginkan percepatan pensiun, hal itu merupakan permintaan yang sulit diperkirakan dalam sistem sewa tanah sebelumnya. Ada beberapa pabrik gula yang mempunyai masalah dengan keterbatasan areal penanaman tebu, terpaksa memperoleh subsidi yang sangat besar secara terus-menerus dari pabrik lain yang memiliki efisiensi ekonomi tinggi (Mubyarto, 1994: 80,83). Manajemen pabrik gula sendiri masih tetap seperti saat abad kolonial. Saat panen raya tiba, masalah lama muncul kembali. Ratusan truk pengangkut tebu harus sabar bermalam menunggu giliran membongkar muatannya di pabrik gula. Masalahnya makin bertambah runyam karena oknum pabrik gula ikut "bermain" dalam menekan rendemen tebu rakyat. Belum lagi monopoli pemasaran tetes tebu rakyat oleh pabrik gula.

Memang tidak semua petani menerima ampas tebu semata. Namun, mata rantai TRI, sejak instruksi penanaman tebu hingga panen di kebun maupun penggilingannya di pabrik, telah diubah menjadi pemerasan struktural. Melalui inpres program TRI itu swasembada gula secara nasional memang meningkat. Namun, di sisi lain, tingkat pendapatan petani tidaklah menggembirakan. Pemaksaan-pemaksaan kepada petani untuk menanam tebu sering diikuti unsur power struktur dengan latar kepentingan politik birokrasi tertentu yang dapat diindikasikan dengan adanya intimidasi dan stigma "pembangkrang", "anti pembangunan", dan "partisipan organisasi terlarang" yang ditujukan kepada petani apabila menolak program TRI.

Banyaknya kendala yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan TRI, telah mendorong pabrik-pabrik gula untuk melakukan pengembangan sistem-sistem alternatif dalam upayanya memperoleh lahan yang memadai produktivitas menanam tebu. Salah satu sistem yang dikembangkan adalah program Kerja Sama Operasional (KSO). Sistem KSO lahir sebagai upaya mengatasi terbatasnya lahan TRI, dampak lanjutan dari keterbatasan lahan TRI menyebabkan pabrik gula kekurangan bahan baku dan apabila keadaan itu dibiarkan, maka bukan tidak mungkin pabrik gula akan bangkrut. Terdapat dua macam KSO, yaitu KSO pengolahan lahan dan KSO pengadaan bahan baku tebu giling. Dalam KSO jenis pertama, pada awal kerjasama dengan pabrik gula petani menerima IPL (Imbalan

Penggunaan Lahan) senilai ku (kwintal) gula yang diperoleh per hektar selanjutnya petani pemilik lahan berkerjasama dengan pabrik gula mengelola lahannya untuk ditanami tebu atas biaya pabrik gula. Pabrik gula menjamin produksi minimal 80ku gula per hektar, dan seandainya produktivitas per hektar tidak mencapai 80 ku maka risiko ditanggung pabrik gula. Sebaliknya apabila produktivitas per hektar mencapai lebih dari 80 ku, petani berhak memperoleh 25 persen dari kelebihanannya dan hal itu berlaku pula untuk KSO di lahan sawah, sedangkan KSO lahan tegalan IPL yang berhak diterima petani senilai 8,5 ku hingga 12 ku per hektar. Pada KSO jenis kedua, pabrik gula memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, biaya garap, atau tebang maupun pengangkutan tebu. Besarnya bantuan tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan petani serta penilaian pabrik gula. Pada saat panen, petani menerima bagian gula setelah dipotong jumlah bantuan pabrik dan ditambah besarnya bunga sekitar 1.5 persen per bulan. Seperti halnya TRI, ternyata KSO pun mengalami berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan modal yang dimiliki pabrik gula. Namun program KSO itu memiliki keuntungan, di antaranya petani terhindar dari risiko mengalami kerugian, sedangkan pabrik gula memperoleh keuntungan dengan adanya kepastian memperoleh bahan baku yang berkualitas. Secara sepintas program KSO mempunyai kemiripan dengan sistem sewa, namun ada beberapa perbedaan prinsip. Pertama, pada sistem sewa petani tidak terlibat dalam proses produksi, sedangkan dalam program KSO keterlibatan petani dalam proses produksi cukup tinggi. Kedua, dalam sistem sewa tidak ada hak petani untuk menerima kelebihan produksi, sedangkan dalam program KSO petani menerima $\frac{1}{4}$ kelebihan batas produksi. Ketertarikan petani pada sistem KSO disebabkan adanya IPL dalam jumlah yang pasti dan diberikan pada saat penyerahan lahan. Di samping itu petani tidak dibebankan untuk menanggung resiko apa pun sebab segala biaya produksi ditanggung oleh pabrik gula. Selain itu dalam proses tanam hingga panen, petani masih bisa bekerja di atas lahannya sendiri atau menjadi buruh, pimpinan kerja, atau pengawas (Kompas, 29 Oktober 1991).

Beberapa tahun semenjak TRI diberlakukan banyak pabrik gula mulai goyah akibat akumulasi dari berbagai macam permasalahan yang dideritanya. Apalagi sebagian besar pabrik gula di pulau Jawa mengandalkan tebu rakyat

karena hanya sebagian kecil yang memiliki lahan sendiri dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Pada masa awal pengorganisasian PTP menjadi PTP Nusantara (1993-1996), sejumlah pabrik gula terpaksa ditutup akibat lahan tebunya tidak dapat memenuhi target. Usia mesin giling yang sudah tua, karena semenjak dinasionalisasikan hampir seluruh mesin tersebut belum pernah diganti. Hal itu membuat sebagian besar pabrik gula di Indonesia berjalan tidak efisien. Kondisi itu menjadi lebih buruk dengan mengalirnya gula impor yang murah, berbeda dengan gula produk dalam negeri yang selalu dibebani biaya produksi yang tinggi sehingga diperlukan kebijakann pemerintah agar gula lokal dapat bersaing di pasar.



III. KERANGKAN KONSEP PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap kemitraan usaha selalu diharapkan tidak ada pihak yang diuntungkan di ataskerugian pihak lain yang merupakan mitra usahanya. Semua pihak yang bermitra harus merasakan keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari kemitraan sehingga kemitraan dapat berjalan langgeng. Pola kemitraan diterapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha pertanian serta meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang dikarenakan adanya kepastian dalam jaminan pasar maupun aspek permodalan serta transfer teknologi yang dibutuhkan.

Sejalan dengan adanya pola kemitraan yang terjalin konsep saling menguntungkan antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang dibutuhkan secara positif akan menciptakan suatu keharmonisan dalam program – program yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan yang selanjutnya menurut Anonymous (1995) dalam Catur (2012), pola kemitraan yang dilakukan harus dapat memunyai manfaat yang sebesar-besarnya pada :

1. Petani : dalam hal-hal tertentu dapat membantu segi permodalan, sarana produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinerja usahatani serta adanya jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.
2. Perusahaan : dapat tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari petani mitra usaha dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sehingga keuntungan meningkat.
3. Pemerintah : meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usahatani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustrial serta meningkatkan penerimaan negara dari usahatani dan perusahaan pertanian.

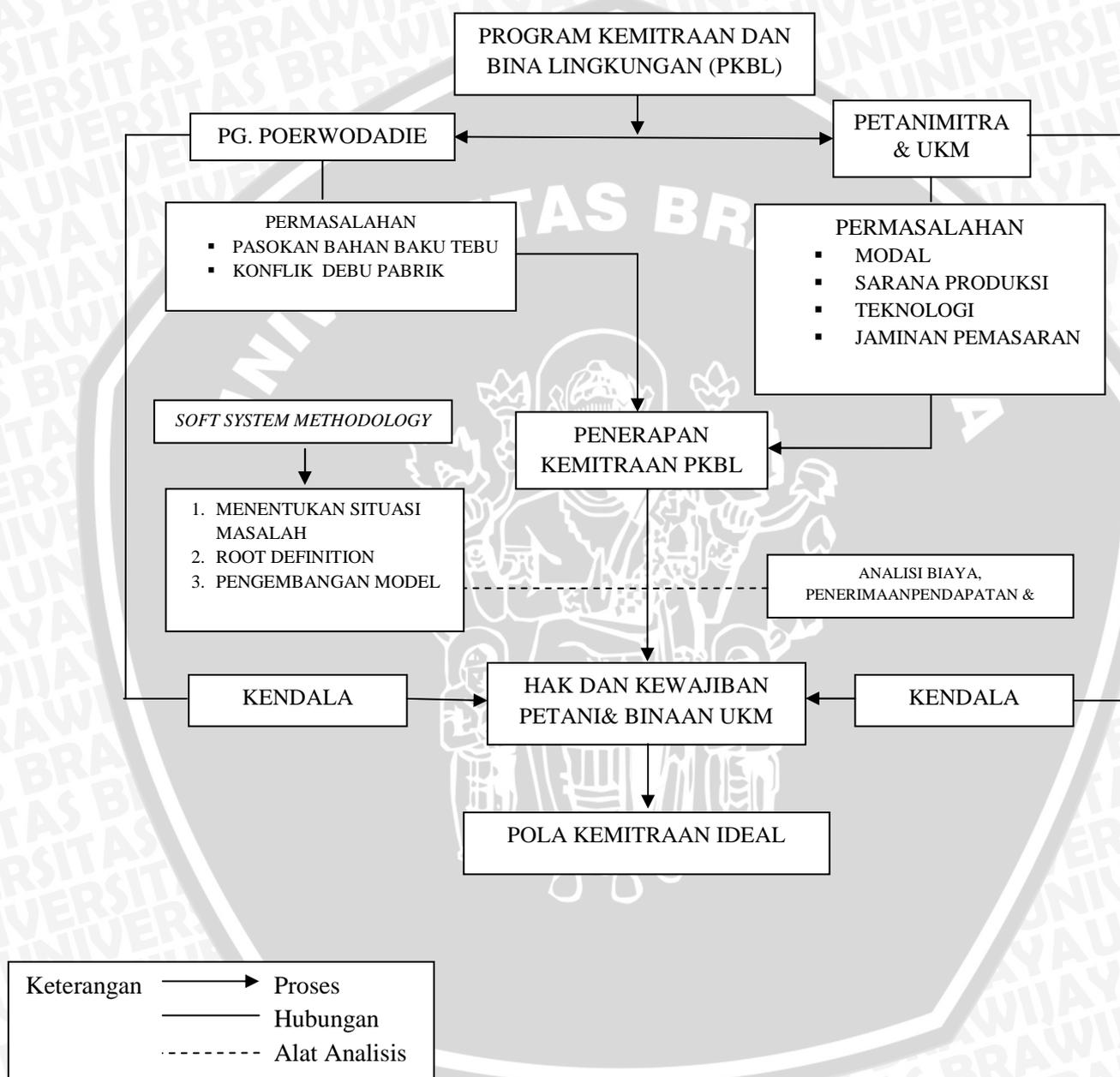
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karisma (2012) dimana terdapat hak dan kewajiban dalam mengikuti pola kemitraan yang terjalin antara petani sawit dan PT. Malaya Sawit Katulisitwa, hal ini mengindikasikan bahawasanya terdapat aspek ketergantungan yang berdampak positif dari masing – masing pihak.

PG. Poerwodadie sejalan dengan tujuannya dalam mendukung program swasembada gula 2014 berupaya dalam mencapai target produksi gula dibawah naungan BUMN PTPN XI, dalam satu wilayah kerja yang berada di antara 4 PG lainnya serta penggunaan lahan yang masih didominasi oleh komoditas lainya dan juga tidak adanya HGU mengharuskan PG. Poerwodadie jeli dalam menyikapi hal tersebut, berbagai langkah persuasif dalam rangka memenuhi target produksi gula dilakukan yang melibatkan petani tebu sebagai mitra PG yang dikarenakan sebagian mayoritas pasokan tebu PG berasal dari TR (tebu rakyat), berbagai permasalahan muncul ketika tiba saat musim tebang tiba dimana pasokan awal giling melebihi dari kapasitas pabrik sehingga petani tebu memilih menggilingkan tebu ke PG lain dengan pertimbangan harga, hal tersebut tidak sejalan dengan aspek kemitraan yang sudah terjalin dimana petani yang sudah tergabung dalam kemitraan dengan PG diharuskan menggilingkan tebu yang ditebang di PG yang sudah menjalin kerjasama.

Dalam melakukan kemitraan terdapat hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PG. Poerwodadie dan Petani Mitra, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Dengan adanya fungsi kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan proses kemitraan dan proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pengembangan usaha perkebunan melalui *contract farming* yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi dan sumber daya manusia dari mengikuti program kemitraan yang dibentuk dan pada akhirnya dapat terwujudnya hubungan kemitraan yang ideal.

Sejalan dengan hubungan kemitraan yang berpengaruh dalam peningkatan produktivitas serta keteraturan dalam pasokan bahan baku yang berdampak pada proses produksi gula PG, penerapan kemitraan PKBL diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi serta sumberdaya manusia dari petani yang mengikuti kemitraan dan saling mengatasi masalah yang dihadapi oleh PG. Poerwodadie dan Petani Mitra yang pada akhirnya dapat tercipta hubungan kemitraan yang ideal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dari proses Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ada di PG. Poerwodadie, kerangka penelitian penelitian disajikan dalam paradigma pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka pemikiran kajian usaha sistem perkebunan tebu pola program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)

3.2 Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya hubungan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di tingkat PG. Poerwodadie.
2. Petani yang diteliti adalah petani tebu yang menjadi mitra / petani binaan PG. Poerwodadie.
3. Masyarakat yang diteliti adalah masyarakat yang terdaftar dalam program PKBL PG. Poerwodadie dan yang mengikuti binaan UKM.
4. Masalah yang diteliti adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pola kemitraan PKBL antara PG. Poerwodadie dan masyarakat serta petani tebu binaan PG. Poerwodadie.
5. Output dari penelitian ini adalah hubungan pola kemitraan PKBL yang ideal dengan melihat tingkat kesejahteraan masyarakat penerima UKM serta petani tebu binaan dari PG. Poerwodadie.
6. Pada penelitian ini tahapan *Soft System Methodology* hanya pada tahapan pengembangan model.

3.4 Definisi Dan Pengukuran Variabel.

1. Kemitraan PKBL adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh pihak PG. Poerwodadie dan petani mitra dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membersarkan.
2. Proses kemitraan adalah runtutan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kemitraan dari kegiatan sosialisasi program, pendaftaran, pemeriksaan lahan, pelaksanaan *land clearing*, pelaksanaan budidaya, bantuan teknis budidaya, pengelolaan hasil panen dan jaminan pemasaran dimana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program rintisan BUMN setara CSR dalam rangka kepedulian perusahaan dalam bentuk pencairan modal, pendampingan serta penguatan usaha mikro.

3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU UKM nomor 20 tahun 2008)..
5. Bina Lingkungan merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap komunitas lokal yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, khususnya yang berada di sekitar unit usaha PG. Poerwodadie.
6. Kelompok tani adalah wadah atau organisasi kelompok petani peserta program PKBL yang berada dalam satu hamparan wilayah kerja PG. Poerwodadie.
7. Petani (informan) adalah petani yang dipilih oleh pewawancara untuk menjawab pertanyaan (kuisisioner) dalam suatu penelitian. Petani informan ini berasal dari kelompok tani yang melaksanakan program PKBL.
8. PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, suatu program dari pemerintah pusat melalui perusahaan BUMN yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang berada di sekitar unit usaha, program tersebut merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.
9. Biaya produksi adalah total biaya yang diperlukan dalam proses budidaya tebu yang dikeluarkan oleh petani yang meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, transportasi dan lain – lain yang dinyatakan dalam rupiah.
10. Produksi adalah hasil fisik dari usahatani tebu yang diperoleh yang dinyatakan dalam satuan Kwintal (Kw).
11. Efisiensi ushatani tebu adalah kondisi usaha petani tebu ketika tingkat produksi yang dihasilkan dicapai dengan biaya produksi minimum dalam satuan Kilogram (Kg).

12. Produktivitas usahatani tebu adalah hasil panen tebu dengan satuan Kwintal (Kw).
13. Luas areal adalah sebidang tanah yang digarap petani dalam berusahatani tebu dengan Pabrik Gula yang dinyatakan dalam hektar (Ha)



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan Bungin (2001) penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkasakan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Istilah penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor *dalam* Moleong (2002) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Marc (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya. Demikian juga pendapat Azwar (2007) yang mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan kuantitatif akan tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir yang umum dan argumental. Dalam hal ini peneliti menjelaskan sistem usaha perkebunan tebu melalui pola kemitraan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, kabupaten Magetan.

4.2 Lokasi Penelitian

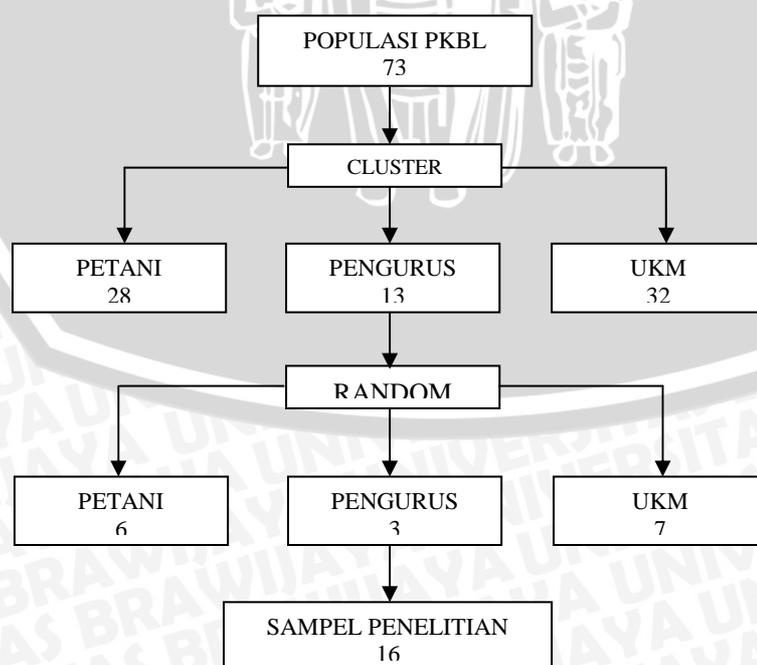
Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja yaitu di PG. Poerwodadie yang berlokasi di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan Jawa Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada PG. Poerwodadie yang menjadi fasilitator dan selaku avalist dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan program tersebut sudah berjalan dengan melibatkan

stakeholder setempat. Dengan adanya banyak pihak yang terlibat di dalamnya maka program tersebut menjadi menarik dalam melakukan penelitian yang dikarenakan akan terjadi perbedaan pemahaman dan persepsi masyarakat akan proses dari program yang berjalan.

4.3 Teknik Penentuan Responden

Penentuan sampel terdiri dari petani penerima Program PKBL dalam bentuk bantuan kredit usahatani tebu, masyarakat penerima bantuan UKM dan pengurus PKBL PG. Poerwodadie. Penentuan sampel dari masing – masing kelompok dilakukan dengan menggunakan teknik *Cluster Random Sampling* (acak sederhana). Sumarsimi (2006) menyatakan dalam teknik pengambilan sampel secara random bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15 % atau 20-25 %. Sampel sebesar 20-25 % diharapkan cukup representatif untuk memperoleh data berkaitan dengan masalah penelitian ini. Jumlah populasi dari petani dan masyarakat penerima PKBL adalah 73 orang yang terdiri dari penerima program kemitraan kredit tebu sebanyak 28, UKM 32 serta pengurus PKBL dari PG. Poerwodadie sebanyak 13, jadi total sampel petani penerima kredit tebu 6 orang dan masyarakat penerima program UKM adalah 7 dan pengurus PKBL PG. Poerwodadie 3 orang sehingga total sampel yang digunakan adalah 16 orang.

Gambar 3. Tahapan *cluster random sampling* Sampel Penelitian



4.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu data dari peranan ketua PKBL di PG. Poerwodadie dalam menganalisis dan menjelaskan tujuan program, peranan pemimpin dalam menjalankan dan target program tersebut, peranan penanggung jawab pengurus PKBL di PG. Poerwodadie dalam menyediakan kredit usahatani tebu, pemenuhan sarana produksi, penyampaian informasi teknologi baru, TIM 9 yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mediator dalam memfasilitasi masyarakat dengan PG. Poerwodadie. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada di lokasi penelitian, yaitu data yang berasal dari PG. Poerwodadie, kantor Desa dan Kecamatan serta dari pengurus PKBL.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara :

1. Wawancara Dengan Menggunakan Kuisisioner.

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Singarimbun dan Effendi, 1995). Sedangkan menurut Bungin (2001), wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sangat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sebagian dari masyarakat setempat yang bermatapencaharian sebagai petani tebu yang mengikuti pelaksanaan program PKBL dengan cara wawancara mendalam secara langsung dengan responden yang bersangkutan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yaitu data mengenai pelaksanaan pola kemitraan yang dibentuk antara PG. Poerwodadie dengan petani tebu mitra.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2008). Dua di antara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh data situasi di daerah penelitian. Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh data situasi di daerah penelitian. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dilakukan di daerah penelitian dengan cara penglihatan langsung terhadap petani tebu dan masyarakat yang mengikuti serta meneriam PKBL. Metode observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan memberikan data – data tambahan untuk melengkapi serta memperkuat data – data yang telah diperoleh dari metode wawancara yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Pengamatan dengan dokumentasi merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen. Menurut Faisal (1981), metode dokumentasi yaitu metode dimana sumber informasinya berupa bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini peneliti tinggal mentransfer bahan – bahan tertulis yang relevan pada lembaran – lembaran isian yang telah disiapkan atau merekam sebagaimana adanya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik di tingkat perusahaan dan petani. Data sekunder yang dimaksud adalah mengenai kondisi umum daerah penelitian yaitu wilayah PG. Poerwodadie yang meliputi :

- a) Dari hasil observasi dan hasil wawancara secara langsung pada responden (petani tebu)
- b) Dari kantor desa maupun kecamatan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Dta yang diambil berupa kondisi sumber daya manusia, keadaan umum di tempat penelitian seperti jumlah penduduk, umur, tingkat pendidikan, keadaan pertanian, dan lain – lain.

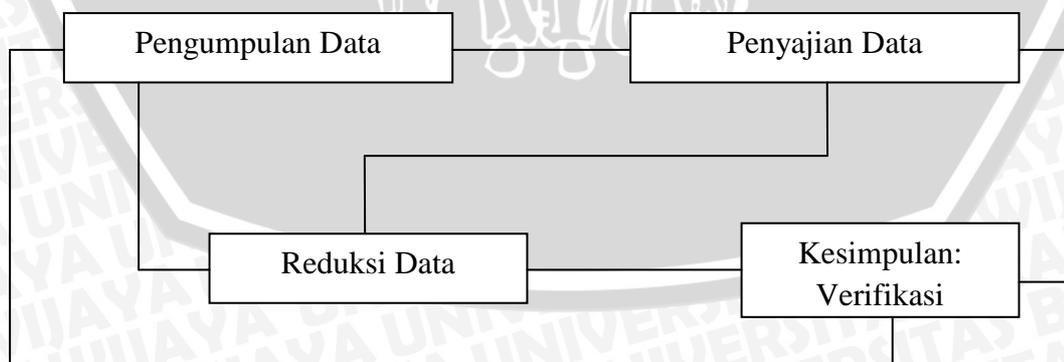
4.6 Metode Analisis Data

4.6.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapang mengenai hubungan antara fenomena – fenomena yang terjadi di lapang (Singarimbun dan Effendi, 1987). Analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (1992), dimana hal – hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kira – kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata – kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan seperti digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Pengumpulan Data (Miles dan Huberman, 1992)

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, sedangkan data yang tidak perlu disortir agar memberikan

kemudahan dalam penampilan, menyajikan dan mencari keterangan yang berguna. Kegiatan dalam mereduksi data meliputi:

- a. *Editing*, merupakan penelitian kembali catatan – catatan yang diperoleh di lapang.
 - b. *Coding*, merupakan usaha mengklarifikasi atau mengelompokan jawaban – jawaban responden menurut macamnya.
 - c. Tabulasi, merupakan proses – proses penyusunan data dalam bentuk tabel.
2. Penyajian data diartikan sebagai data yang dipilih kemudian dikelompokan dan disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan fokus permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat direduksi. Penyajian – penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, dan jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari kategori – kategori data yang direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab fokus permasalahan (Miles dan Huberman, 1992)

Data yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan (memberikan gambaran yang mendalam) fenomena sosial yang terjadi di masyarakat keadaan di lapang dalam bentuk kalimat atau kata – kata untuk menggambarkan suatu keadaan, fenomena, dan fakta di lapangan secara alamiah apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya (Arikunto, 2002)

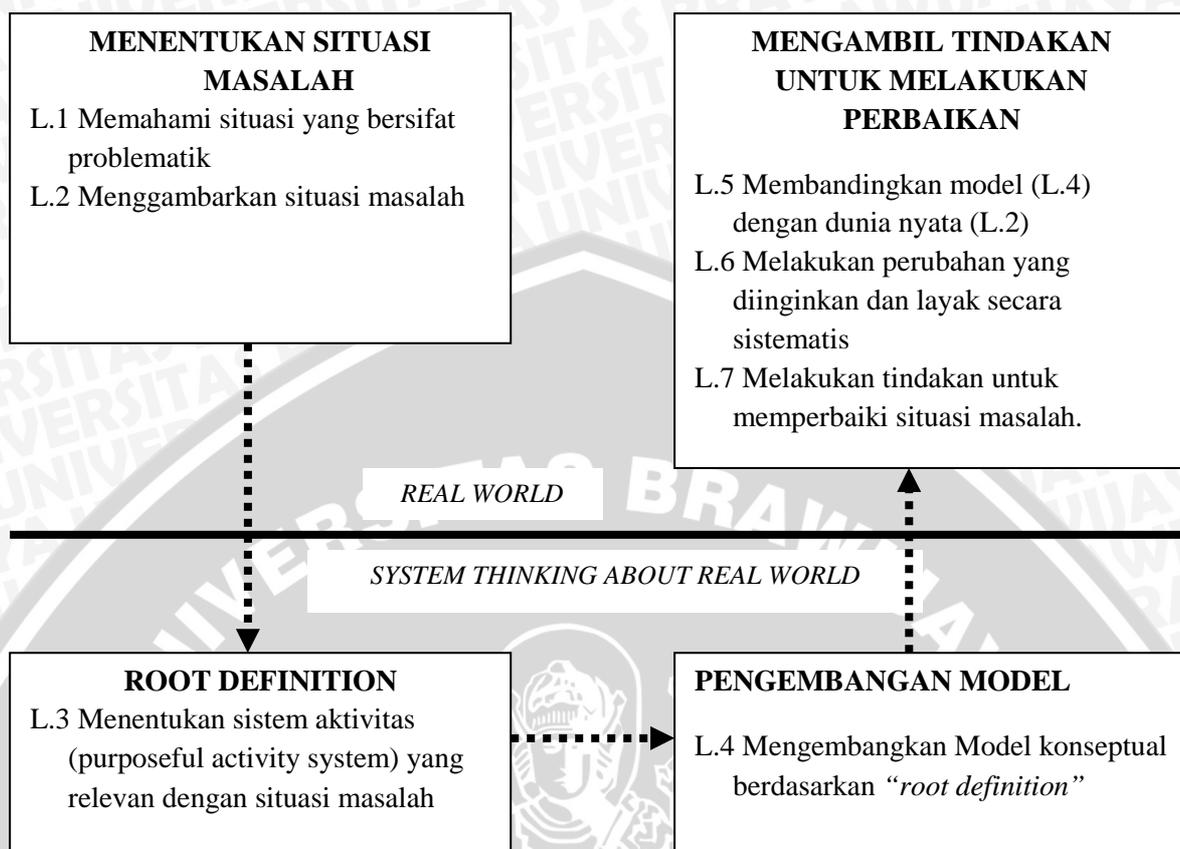
Hasil deskriptif kualitatif tersebut akan diperoleh dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbentuk data kualitatif berdasarkan wawancara dengan responden meliputi variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan pola kemitraan seperti proses pembentukan kemitraan, tujuan pelaksanaan kemitraan, proses pemenuhan hak dan kewajiban, serta proses pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi yang bersangkutan yaitu di wilayah kerja PG. Poerwodadie, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

4.6.2 Soft System Methodology

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah *Soft System Methodology* (SSM) dimana metode ini merupakan teknik untuk menganalisis dan mencari solusi atas sistem aktivitas manusia dengan tujuan utamanya untuk membuat konsep model, memperbaiki tindakan pragmatis, mencari kompromi, maupun pembelajaran bersama dan partisipatif seperti penelitian tindakan kelas, pengembangan organisasi dan pengembangan komunitas. *Soft System Methodology* merupakan metodologi yang digunakan untuk mendukung strukturisasi pemikiran dalam masalah organisasi dan komunitas yang kompleks. Terhadap masalah ini *Soft System Methodology* adalah proses untuk mengidentifikasi merumuskan akar permasalahan dan pemecahannya, menemukan dan mempertemukan pendapat para pihak yang terlibat seperti pelaksana, pengambil keputusan, pengguna, dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pandangan umum masyarakat, politik, sosial dan budaya.

Soft System Methodology memperlakukan individu sebagai unit satuan organisasi atau komunitas yang mempunyai perbedaan dan kesamaan serta mengasumsikan bahwa setiap individu akan melihat dunia secara berbeda yang akan mengarah pada pemahaman yang bervariasi dan evaluasi situasi apapun yang menyebabkan pada gilirannya ide – ide yang berbeda untuk tindakan positif. Ide – ide tidak selalu bertentangan satu sama lain (umumnya ada kemungkinan akan beberapa tumpang tindih, tetapi mereka mungkin berbeda cukup untuk membuat perbedaan masalah serius ketika memutuskan suatu tindakan (Mat Sahudi, 2012).

Soft System Methodology dikembangkan dari pemikiran serba sistem dimana sebuah metodologi untuk memahami masalah – masalah sulit yang ada di dalam organisasi atau komunitas dan mempunyai kontradiksi internal serta menyediakan struktur yang direkayasa untuk mengatasi kesulitan tersebut. Model dasar dari *Soft System Methodology* adalah model tujuh tahap dimana yang menjadi situs penting dalam metode ini adalah perbandingan antara model konseptual dan dunia nyata, model tujuh tahap tersebut sebagai berikut :



Gambar 4. langkah soft system methodology (Peter Checkland, 1960 dalam Matsahudi 2012).

Tahap 1 & 2 **Find out** (menemukan).

Menggunakan *rich picture* dan metode / teknik penstrukturan masalah dalam mencari situasi masalah sebagai langkah awal dalam mencari *problem situation* dari awal pelaksanaan program PKBL yang berjalan serta menemukan fakta – fakta di lapang.

Tahap 3 **Formulate Root Definition of Relevant System** (memformulasi **Root Definition** dari Sistem Relevan).

Mengidentifikasi stakeholders yang terlibat mulai dari PG. Poerwodadie sebagai penanggung jawab program dan petani mitra sebagai penerima program PKBL, proses transformasi dari pengetahuan yang diberikan selama program berjalan, *Weltanschauung* (cara pandang) petani dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, dan lingkungan untuk kemudian membangun definisi sistem aktivitas

manusia yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi masalah yang terjadi dari program PKBL.

Tahap 4 ***Build conceptual models*** (membangun model konseptual).

Berdasarkan Root Definition untuk setiap elemen yang didefinisikan, maka kemudian membangun model konseptual yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ideal. Dalam tahap ini menjadi modal dasar dalam menentukan strategi kebijakan baru yang akan memperbaiki kekurangan selama program kemitraan berlangsung.

Tahap 5 ***Compare models and reality*** (membandingkan model dengan realitas).

Membandingkan model sistem konseptual yang dibuat dengan apa yang terjadi di dunia nyata (*real world*). Penentuan model konsep akan disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di tingkat petani mitra akan timbul *gap*, dari permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Tahap 6 ***Define feasible and desirable change*** (menetapkan perubahan yang layak).

Membuat debat publik dalam rangka mengidentifikasi perubahan yang layak serta menjadi bahan masukan program PKBL ke depan menjadi lebih baik

Tahap 7 ***Take action*** (melakukan tindakan).

Membangun rencana aksi untuk memperbaiki situasi dari semua permasalahan yang ada dan mengembangkan dari konsep model yang dibentuk

4.6.3 Analisis biaya usahatani

Analisis biaya usahatani dihitung dengan cara menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan selama petani melakukan usahatani tebu dengan rumus sebagai berikut :

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan :

TC : total biaya usahatani (Rp/proses produksi)

TFC : biaya tetap usahatani (Rp/proses produksi)

TVC : biaya tidak tetap usahatani (Rp/proses produksi)

Biaya yang diperhitungkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada produksi yang dilakukan petani. Biaya tetap yang

diperhitungkan adalah biaya pajak lahan, biaya irigasi, dan biaya sewa lahan. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang dilakukan. Biaya variabel yang dihitung meliputi biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain.

1. Analisis penerimaan usahatani

Penerimaan adalah keseluruhan penerimaan yang diperoleh petani sebelum dikurangi biaya-biaya produksi yang dikeluarkan petani. Dalam penelitian ini penerimaan diperoleh dari dua macam yaitu penerimaan dari unsur gula dan penerimaan dari unsur tetes. Penerimaan dari unsur gula diperoleh dari hasil kali antara jumlah produksi tebu dikali rendemen dikali harga gula lelang yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan penerimaan dari unsur tetes diperoleh dari hasil kali antara jumlah kuintal tebu yang diproduksi dengan uang pengganti tetes per kuintal. Perhitungan penerimaan usahatani dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$TR_{gula} = Q \times \text{Rendemen} \times P_{gula}$$

Keterangan :

- TR_{gula} : total penerimaan dari unsur gula (Rp)
 P : harga lelang gula (Rp/ kg)
 Q : jumlah produksi tebu (Kw)
 Rendemen : jumlah gula yang terkandung dalam 100 kg (%)

$$TR_{tetes} = Q \times P_{tetes}$$

Keterangan :

- TR_{tetes} :total penerimaan dari unsur tetes (Rp)
 P :harga/ uang ganti tetes per kuintal tebu (Rp/ kuintal)
 Q : jumlah produksi tebu (kg)

2. Analisis pendapatan usahatani

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan usahatani tebu. Pendapatan usahatani tebu adalah selisih antara penerimaan dan total biaya. Secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan :

π : keuntungan atau pendapatan (Rp/proses produksi)

TR : total penerimaan (Rp/proses produksi)

TC : total biaya (Rp/proses produksi)

3. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah suatu usaha agroindustri ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha agroindustri tersebut dan besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil itu. Efisiensi usaha agar bisa ditentukan dengan menghitung atau *cost ratio* yaitu hubungan antara usaha agroindustri dengan tingkat biaya produksi (Soekartawi, 1996).

Untuk mengukur tingkat efisiensi usaha digunakan analisis R/C Ratio. R/C Ratio adalah singkatan dari *Return Cost Ratio* atau dikenal sebagai perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya secara matematik, dapat ditulis sebagai berikut

$$R/C \text{ Ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Dimana : TR = Total Penerimaan (Total Revenue) atau Pendapatan Kotor

TC = Total Biaya (Total Cost) atau total biaya produksi

Apabila analisis memberikan nilai R/C Ratio lebih besar dari 1 maka usaha tersebut efisien dan menguntungkan, bila nilai R/C Ratio sama dengan 1 maka tidak menguntungkan dan tidak merugikan (impas) sedangkan R/C Ratio kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak efisien dan tidak menguntungkan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sejarah Perusahaan

Pabrik Gula Poerwodadie yang berlokasi di Desa Palem, Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1832 yang saat itu bernama “*Nederlands Hendel Maatschapij*” (NHM) dan berlokasi di desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Karesidenan Madiun.

Pada tahun 1959 diambil alih Pemerintah Republik Indonesia dan pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), selanjutnya pada tahun 1967 berubah menjadi PPN Baru yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Berdasarkan PP No. 14/tahun 1968 pada tahun 1968 statusnya diubah menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang membawahi beberapa pabrik gula di satu karesidenan dengan nama “Inspeksi Perusahaan Perkebunan Negara”. Sejak tahun 1968 itu pula PG Poerwodadie yang terletak satu karesidenan dengan PG Soedhono, PG Redjosarie, PG Pagottan, dan PG Kanigoro bergabung dalam satu badan hukum yaitu Perusahaan Negara Perkebunan XX (PNP XX) yang dipimpin oleh Direksi dan berkantor pusat di Surabaya.

Status PNP berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) pada tahun 1985 dan PNP XX berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara XX (Persero). Pada tanggal 11 Maret 1996 PTP XX (Persero) bersama PTP lainnya dibubarkan. Berdasarkan PP No. 16/1996 tanggal 14 Februari 1996 dibentuk PTP Nusantara XI (Persero) yang merupakan gabungan eks PTP XX (Persero) dengan PTP XXIV-XXV (Persero). PTP Nusantara XI (Persero) dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan di Jalan Merak No. 1 Surabaya hingga saat ini.

Pada tahun 2011, PG Poerwodadie merencanakan menggiling tebu sebanyak 297.229,8 ton (tebu sendiri 84.479,8 ton dan tebu rakyat 212.750,0 ton) yang diperoleh dari areal seluas 3.969,2 ha (TS 1.064,2 ha dan TR 2.905,0 ha). Areal tidak hanya mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Magetan, namun juga di Kabupaten Bojonegoro. Gula dihasilkan diproyeksikan mencapai 20.783,7 ton (milik PG 11.361,3 ton dan milik petani 9.422,4 ton) dan tetes 13.375,4

ton. Kapasitas PG 2.300,0 tth (tidak termasuk jam berhenti) atau 2.057,2 tth sudah termasuk jam berhenti.

Sadar pentingnya tebu rakyat dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, PG Poerwodadie berupaya memberikan yang terbaik untuk petani. Sejumlah kebun peragaan diselenggarakan dengan maksud dapat menjadi wahana pembelajaran, baik bagi petugas PG maupun petani, tentang praktek budidaya terbaik (*best agricultural practices*). Adanya kebun peragaan juga memungkinkan para petani berinteraksi dengan PG terkait upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Arah yang ingin dicapai produktivitas rata-rata 8 ton hablur per hektar antara lain direalisasikan melalui penataan masa tanam, penataan varietas (menuju komposisi ideal antara masak awal, tengah, dan akhir 30-40-30 % pada TG 2010/11), kecukupan *agroinputs*, dan perbaikan manajemen tebang-angkut.

Adanya Litbang Wilayah Barat yang berpusat di PG Poerwodadie, memungkinkan adopsi dan diseminasi teknologi berjalan lebih cepat. Sedangkan untuk mengatasi kemungkinan pencemaran akibat aktivitas pabrik yang potensial mengganggu masyarakat, PG Poerwodadie terus berupaya memperbaiki instalasi pengolahan limbah secara terpadu, baik untuk limbah padat, cair maupun udara. Harapan selanjutnya adalah industri ramah lingkungan (*environmental friendly*).

5.2 Keadaan Umum Daerah Penelitian.

a. Topografi

Tinggi di atas permukaan laut : +91 m dpl

Jenis tanah : Grumosol, Aluvial, dan Regosol.

Jenis tanah yang bervariasi yang terdiri dari Grumosol, Aluvial, dan Regosol mendominasi di lahan tebu yang berada pada wilayah Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro (perluasan lahan), dari penggunaan lahan tersebut didominasi oleh penggunaan lahan sawah yang produktivitasnya lebih besar dibandingkan dengan penggunaan lahan tegalan.

b. Iklim

Iklim di PG Poerwodadie termasuk zone C yaitu agak basah dan D sedang, keadaan iklim selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Iklim kurun waktu 10 tahun

Tahun	Curah hujan (mm/tahun)	Hari Hujan (hari)	Bulan Kering (bulan)
2000	1719	122	5
2001	1899	210	4
2002	2210	125	6
2003	1409	108	4
2004	2053	97	6
2005	1125	60	1
2006	1618	110	4
2007	1696	82	3
2008	1765	98	3
2009	1604	98	2
2010	2236	160	3

Sumber : data primer, 2012

Iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tebu, keadaan bulan basah pada awal penanaman mendukung pertumbuhan vegetatif tebu, akan tetapi apabila bulan basah terjadi sepanjang tahun akan berdampak buruk bagi tanaman tebu yang akan menurunkan rendemen dan rentan terhadap serangan penyakit penggerek batang. Berdasarkan tabel iklim di atas curah hujan berfluktuasi dari tahun ke tahun, curah hujan tertinggi pada tahun 2010 dengan curah hujan 2236 mm/tahun, berdasarkan fenomena tersebut produksi rendemen tebu menurun dan mengalami penurunan produktivitas dikarenakan hujan turun sepanjang tahun.

c. Pengairan

Sistem pengairan kebun di PG. Poerwodadie meliputi irigasi teknis 5%, pompa 90%, dan tadah hujan 5%. Pada daerah perluasan lahan di Kabupaten Bojonegoro penggunaan air hanya bergantung pada awal turunnya hujan dan penanaman baru dilakukan, karena hanya menggantungkan pada air hujan.

d. Prasarana Pendukung

Sumber air pabrik	: Dam Jungke
Sumber bahan baku pendukung	: TS (Tebu Sendiri) dan TR (Tebu Rakyat)
Kelas Jalan	: III
Fasilitas Sosial	: Klinik, Masjid, Lapangan Bola, Lapangan Tenis, Gedung Olahraga, Taman kanak – kanak dan Balai Pertemuan.
Wilayah lahan	: Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro

Dengan sarana dan prasarana yang didukung sistem pengairan, wilayah kebun, dan sumber bahan baku, menjadi pendukung produksi PG. Poerwodadie, selain itu wilayah PG yang terletak 15 km dari pusat kabupaten menjadikan pelaksanaan program kemitraan UKM mudah mengakses birokrasi serta kemudahan akses informasi bagi mitra binaan sehingga program PKBL baik dari bidang kemitraan petani tebu dan mitra binaan berjalan lancar.

5.3 STRUKTUR ORGANISASI PG. POERWODADIE

Dalam kegiatan produksinya PG. Poerwodadie di bawah direksi PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berkedudukan di Surabaya menetapkan bahwa untuk melaksanakan kegiatannya Adimistratur PG. Poerwodadie dibantu oleh Kepala bagian Administrasi Keuangan dan Umum (AKU), Kepala bagian tanaman, Kepala bagian instalasi, dan Kepala bagian pengolahan.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di PG. Poerwodadie adalah:

1. Administratur

Administratur merupakan pimpinan tertinggi di PG. Poerwodadie dan bertanggung jawab kepada direksi dan dibantu oleh beberapa kepala bagian.

2. Kepala Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum (AKU)

Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan administrasi, pengelolaan anggaran dan biaya produksi, pengawasan pembelian dan penjualan serta pengawasan hasil produksi gula. AKU terdiri dari beberapa bagian yaitu: RC Pembukuan, RC Keuangan, Kepala Gudang, RC SDM & Umum dan PAKAM.

3. Kepala Bagian Tanaman

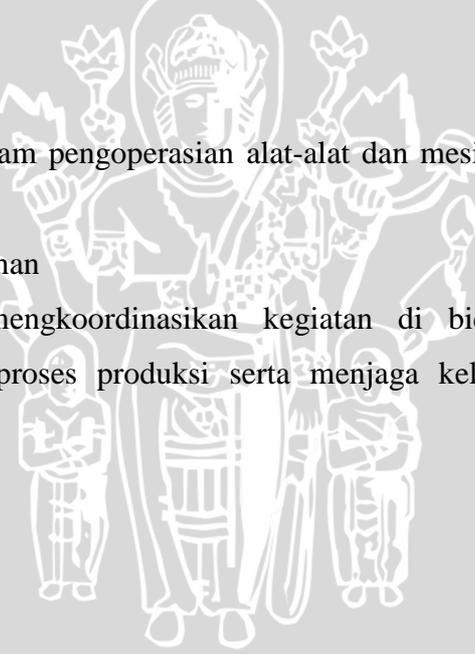
Bagian ini bertanggung jawab terhadap areal, kultur, teknis atau mekanisasi, pembibitan, riset dan pengembangan, tebang dan angkut tanaman tebu. Yang terdiri dari: Kepala Tanaman Rayon A, Kepala Tanaman Rayon B, Kepala Tanaman Rayon C, setiap Kepala Tanaman Rayon memiliki beberapa SKW (Sinder Kebun Wilayah), dan Koordinator Litbang (penelitian dan pengembangan).

4. Kepala Bagian Instalasi

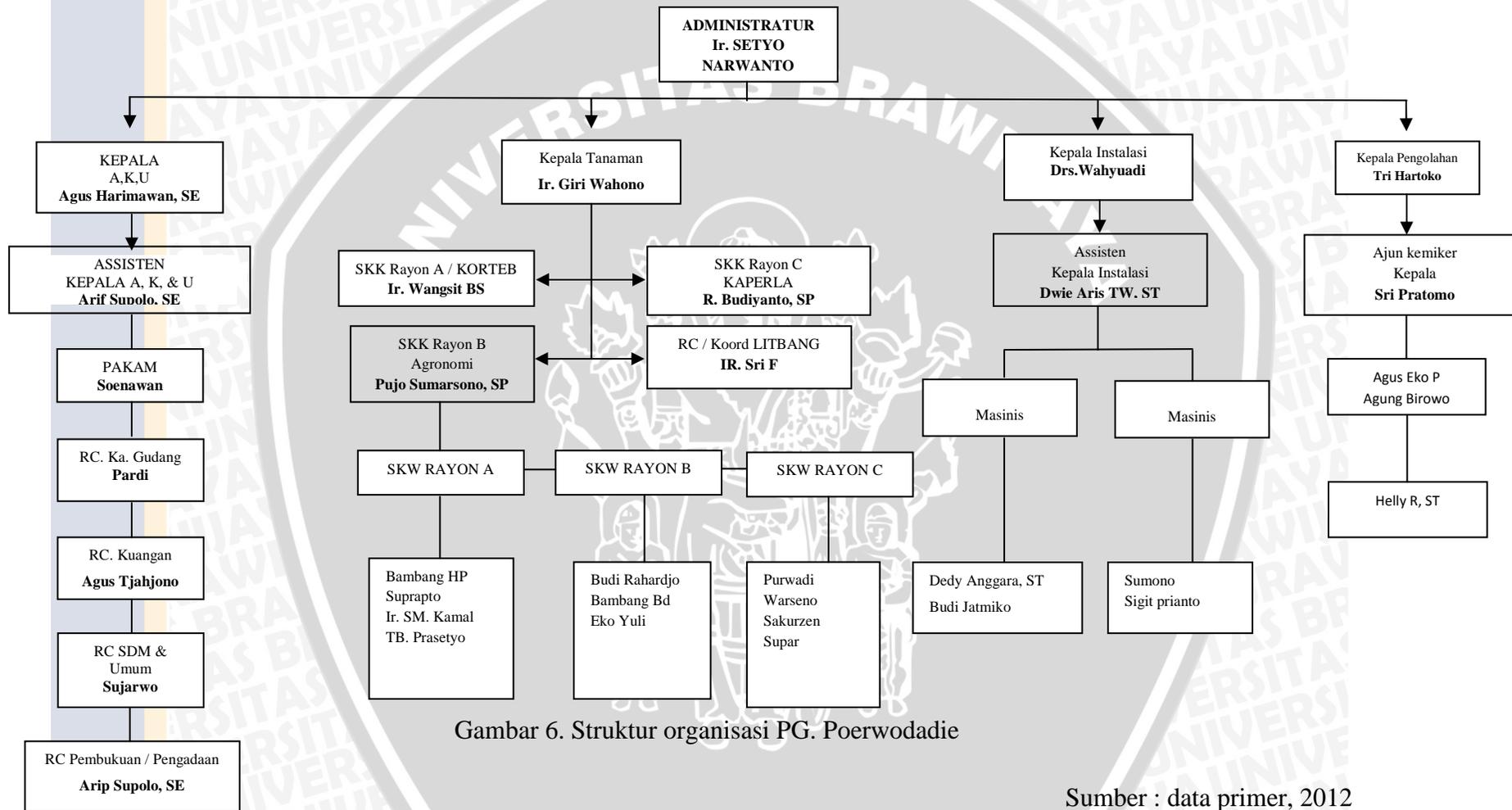
Bertanggung jawab dalam pengoperasian alat-alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi.

5. Kepala Bagian Pengolahan

Bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengolahan, peningkatan efisiensi proses produksi serta menjaga kelangsungan proses produksi.



STRUKTUR ORGANISASI PG. POERWODADIE



Gambar 6. Struktur organisasi PG. Poerwodadie

Sumber : data primer, 2012

5.4 VISI DAN MISI

Visi

Menjadikan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) sebagai perusahaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan stakeholders secara berkesinambungan.

Misi

Menyelenggarakan usaha agribisnis, khususnya yang berbasis tebu melalui pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.5 KETENAGAKERJAAN

Pabrik gula Poerwodadie melakukan kegiatan produksi pada bulan Mei hingga Oktober. Periode ini dikenal dengan dalam masa giling (DMG), sedangkan di luar masa ini disebut luar masa giling (LMG). Pembagian status karyawan PG Poerwodadie sebagai berikut :

Tabel 2. Formasi Karyawan PG Poerwodadie LMG/DMG 2012

No	Uraian	Status Karyawan									Jml	
		Karyawan Tetap		Musim			Borong			Sesuai RKAP '11		
		Gol. III/IV	Gol. I/II	12 Bln	PKWT DMG	LMG & DMG	Out Sorching	Vol. Pekerjaan				
1	LMG	30	333	-	5	-	77	-	10	60	515	
2	DMG	30	332	310	5	59	77	245	11	169	1238	

Sumber : data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas komposisi karyawan menjadi beberapa bagian yaitu status karyawan tetap yang berasal dari direksi dalam kegiatan perekrutan dan menjadi staff di PG yang terdiri dari Golongan III/IV dan Golongan I/II untuk DMG (Dalam Masa Giling) dan LMG (Luar Masa Giling), sedangkan PKWT

adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terdiri dari pegawai dalam masa giling dan selama 12 bulan, tenaga borong merupakan pegawai pabrik yang tidak terikat dan didominasi dalam waktu masa giling dimana pabrik sedang beroperasi. Sedangkan pegawai *outsorcing*nya terdiri dari 10 pegawai luar masa giling dan 11 pada dalam masa giling. Jumlah tenaga kerja total untuk karyawan Dalam Masa Giling (DMG) adalah sebanyak 1238 dan Luar Masa Giling (LMG) sebanyak 515.

5.6 KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Kesejahteraan karyawan adalah tanggung jawab perusahaan supaya meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan tersebut dilakukan dengan member upah tambahan selain gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tambahan upah tersebut sebagai berikut :

1. Tunjangan Hari Raya (THR).
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada karyawan pada akhir bulan yang sesuai dengan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) yaitu pada waktu lebaran idul fitri, THR diberikan kepada semua karyawan baik muslim maupun non muslim dari karyawan PG.
2. Imbalan jasa bila perusahaan mendapatkan laba.
Imbalan/Bonus diberikan kepada semua karyawan pada waktu akhir giling dimana besaran bonus bergantung pada target produksi yang terealisasi.
3. Perawatan dan kesehatan sesuai dengan golongan masing-masing.
PG menyediakan poliklinik untuk memenuhi kebutuhan pasien karyawan baik dalam masa giling maupun dari luar masa giling.
4. Pakaian dinas setahun sekali.
Pakaian dinas diberikan kepada karyawan yang sesuai dengan keputusan direksi dalam penentuan hari seragam dan pemberian dilakukan di masing-masing PG.
5. Rumah dinas bagi pimpinan.
Bagi karyawan/staff PG diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah dinas milik PG selama menjabat ssebagai karyawan PG. Poerwodadie

6. Cuti tahunan dan cuti panjang.
cuti tahunan diberikan bagi karyawan pada 12 bulan masa kerja dan cuti panjang apabila melaksanakan ibadah haji.
7. Gula “icip-icip”
Dalam masa giling karyawan diperbolehkan untuk mencicipi gula dengan batasan tidak dibawa pulang kerumah, karyawan bebas untuk menikmati gula dari PG di tempa kerja.

5.7 PRODUKSI

Pada tahun 2010, PG Poerwodadie merencanakan menggiling tebu sebanyak 26.8491,6 ton (tebu sendiri 95900,0 ton dan tebu rakyat 172591.6 ton) yang diperoleh dari areal seluas 3465.5 ha (TS 1175.0 ha dan TR 2300.5 ha). Areal tidak hanya mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Magetan, namun juga di Kabupaten Bojonegoro. Gula dihasilkan diproyeksikan mencapai 21316.3 ton (milik PG 12978.5 ton dan milik petani 4314.9 ton) dan tetes 21316.3 ton. Kapasitas PG 2312 tth (tidak termasuk jam berhenti) atau 2056.4 tth sudah termasuk jam berhenti.

Pada grafik dibawah ini ditunjukkan data luas area PG Poerwodadie dari tahun 2000 – 2010 sebagai berikut:



Gambar 6. Luas area lahan PG. Poerwodadie dalam satuan Ha

Sumber : data primer, 2012

Grafik tersebut terjadi pergerakan yang signifikan naik pada tahun 2000 sebesar 3919,18 Ha ke tahun 2001 4320,08 Ha yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2002 begitu seterusnya hingga pada puncaknya tahun 2008 sebesar 5180,81 Ha dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 3884 Ha. PG. Poerwodadie sendiri untuk penggunaan lahan 70 % TR (tebu rakyat) dan TS (tebu sendiri) yang pengelolaanya diawasi dan dilaksanakan oleh PG, sehingga faktor naik turunnya proporsi luas lahan yang digunakan dipengaruhi oleh sewa lahan yang setiap masa tanam tebu mengalami fluktuasi harga sewa lahan, selain itu PG. Poerwodadie tidak mempunyai HGU (Hak Guna Usaha) seperti pada PG lain.

Tabel 3. Data Penggunaan Lahan Budidaya Tanaman Tebu (Ha)

Tahun	Tegalan	Sawah
2000	1275.67	1746.27
2001	1234.32	1980.43
2002	1005.04	1102.99
2003	783.38	1962.25
2004	776.67	2139.89
2005	749.23	2180.83
2006	707.10	2100.26
2007	673.26	1803.29
2008	664.14	1717.99
2009	402.83	1356.41
2010	376.22	791.66

Sumber : data primer, 2012

Dari data tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah luasan penggunaan lahan tegalan dan sawah dalam kurun waktu 10 tahun dihitung dari tahun 2000 sampai dengan 2010, terdapat penurunan jumlah luasan pada tegalan dari 1275.67 (16,06 %) Ha pada tahun 2000 dan menurun sebesar 1234.32 (15, 54 %) Ha pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2001, penurunan tersebut juga terus berlangsung pada tahun – tahun berikutnya hingga pada tahun 2010 sebesar 376.22 Ha (4,73 %), sedangkan pada lahan sawah pada tahun 2000 sebesar 1746.27 Ha (9,24 %) dan terjadi penurunan pada tahun – tahun berikutnya hingga

pada tahun 2010 sebesar 791.66 (4,19 %). Dari kedua penggunaan lahan tersebut terjadi penurunan, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah penurunan target produksi giling PG yang menyesuaikan dengan keadaan iklim dalam kurun waktu 10 tahun yang berubah sehingga penggunaan lahan baik pada lahan tegalan dan sawah mengalami penurunan secara drastis, selain itu baik dari TR dan TS mengalami kesulitan dalam sewa lahan untuk budidaya tebu hal tersebut dikarenakan pemilik lahan lebih pada budidaya selain tebu (padi dan jagung), untuk mengatasi kesulitan lahan maka PG membuka perluasan lahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

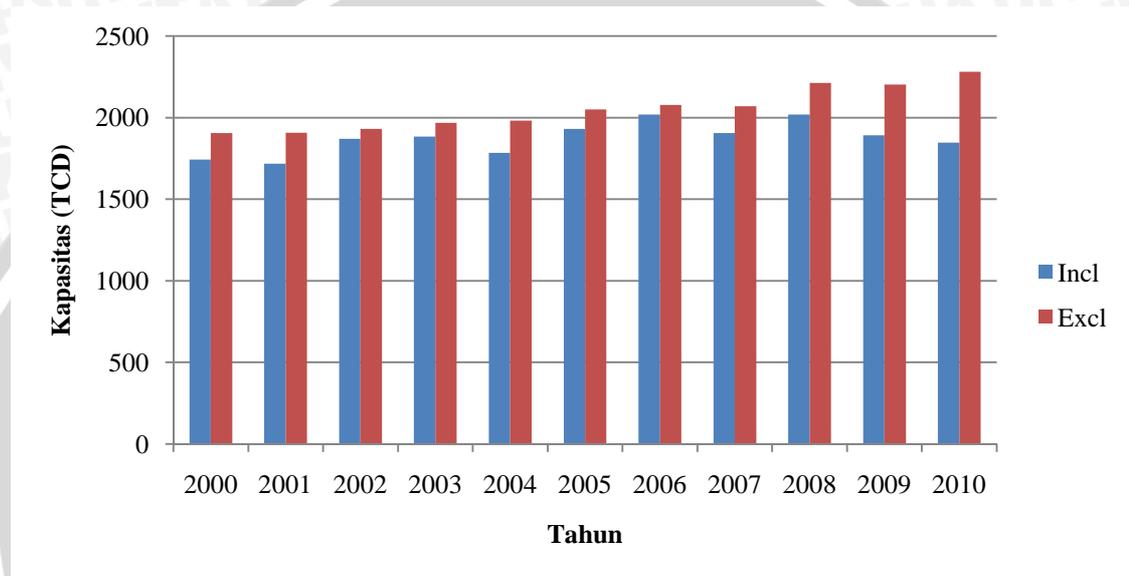
Tabel 4. Data Komposisi Tanaman Tebu (Ha)

Tahun	PC	%	Ratoon	%	Total
2000	1856.29	47.36	2062.85	52.64	3919.14
2001	1183.51	27.40	3136.57	72.60	4320.08
2002	1526.48	37.14	2583.77	62.86	4110.25
2003	1424.11	39.08	2220.3	60.92	3644.41
2004	1707.66	43.24	2241.16	56.76	3948.82
2005	1527.84	37.27	2571.3	62.73	4099.14
2006	1598.54	39.23	2476.61	60.77	4075.15
2007	1902.87	40.39	2808.35	59.61	4711.22
2008	1801.24	34.77	3379.57	65.23	5180.81
2009	1324.33	31.14	2927.96	68.86	4252.29
2010	1203.16	30.98	2680.84	69.02	3884.00

Sumber : data primer, 2012

Tabel 4 di atas merupakan data komposisi tanaman tebu untuk PC (tanaman baru) dan ratoon (tanaman kepras) dari tahun 2000 hingga tahun 2010, untuk komposisi tanaman baru tahun 2000 sebesar 1856.29 (47.36 %) pada interval tahun berikutnya mengalami penurunan untuk tanaman baru hingga pada tahun 2010 komposisi tanaman baru tersisa 1203.16 Ha (30.98 %), sedangkan untuk komposisi tanaman ratoon dari tahun 2000 sebesar 2062.85 Ha (52.64 %) dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga pada tahun 2010 sebesar 2680.84 Ha (69.02 %).

Dari kedua komposisi di atas dari tanaman baru dan tanaman ratoon berbanding terbalik, hal ini dikarenakan untuk tanaman baru memerlukan pengadaan bibit baru yang memerlukan biaya usahatani yang lebih besar daripada tanaman ratoon yang bisa menggunakan tanaman dari tanaman tebu giling sebelumnya sehingga biaya usahatani pada musim tanam bisa ditekan, akan tetapi tanaman kepras hanya dibatasi 2 kali kepras yang diakibatkan tingkat rendemen tebu yang menurun sehingga memerlukan penggunaan bibit baru.

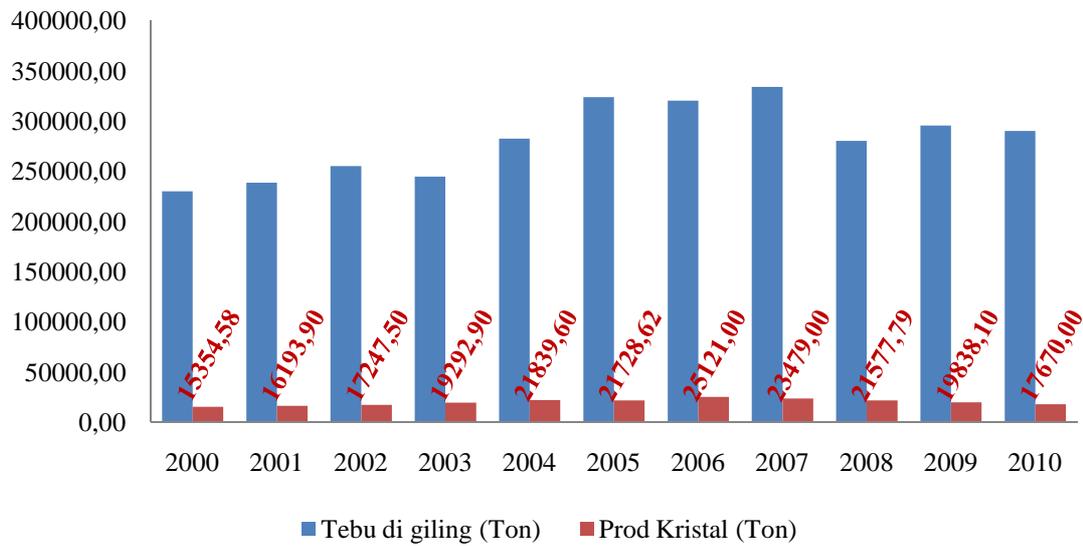


Gambar 8. Grafik Kapasitas giling (TCD) tahun 2000 – 2010

Sumber : data primer, 2012

Grafik tersebut merupakan kapasitas giling antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 dimana terdapat kapasitas inklusif stop yang merupakan kapasitas giling yang dicapai dalam sehari yang terdapat jam berhenti, sedangkan eksklusif sendiri merupakan kapasitas giling yang tidak terdapat jam berhenti dalam kurun waktu 24 jam.

Pada tahun 2000 hingga kapasitas tahun 2010 terdapat fluktuasi antara kapasitas inklusif dan eksklusif dimana kapasitas tersebut berada pada interval 1500 dan 2000 TCD, dalam beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah efisiensi mesin dimana adanya pemberlakuan jam berhenti untuk kegiatan *maintenance* di semua stasiun gilingan sehingga mempengaruhi kapasitas giling tersebut

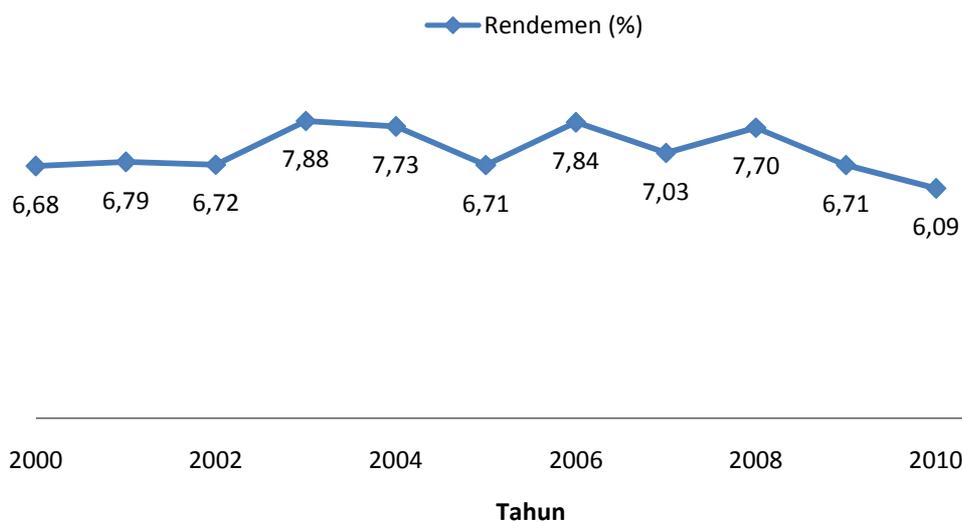


Gambar 9. Grafik Jumlah Tebu di giling dan Produksi Kristal Tahun 2000 – 2010.

Sumber : data primer, 2012

Di dalam grafik di atas menunjukkan jumlah tebu digiling dan produksi kristal tahun 2000 – 2010, dapat dilihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah tebu digiling dan produksi kristal yang dihasilkan, adanya perbedaan tersebut berasal dari input bahan baku sendiri yaitu tebu yang masuk di meja tebu yang selanjutnya digiling melalui 11 stasiun gilingan yang ada di pabrik gula, selain itu faktor rendemen tebu juga menjadi faktor penting, produksi tebu digiling tertinggi terdapat pada tahun 2007 dan produksi kristal yang dihasilkan 23.479 ton. Hal tersebut berawal dari input on farm yang juga dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca pada masa tanam tebu serta jumlah tebu yang digiling di PG. Poerwodadie.

Jenis tanaman yang diusahakan di wilayah PG. Poerwodadie terdiri dari Padi, Jagung dan Umbi-umbian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku tebu maka satu musim sebelum musim tanam tebu sudah dilakukan kegiatan sewa lahan, semakin dekat waktu sewa terhadap musim tanam harga yang diberikan semakin besar dari harga normal rata-rata 10 juta/Ha. Pola tanam yang dilakukan masyarakat petani dari tahun ke tahun adalah Tebu-Palawija-Tebu, hal tersebut bisa berubah menjadi Palawija-Tebu-Palawija kondisi tersebut biasanya disesuaikan dengan pranoto mongso (curah hujan) & harga sewa lahan.



Gambar 10. Nilai perkembangan rendemen tebu tahun 2000 – 2010

Sumber : data primer, 2012

Grafik di atas merupakan nilai perkembangan rendemen tebu pada tahun 2000 – 2010, pada grafik tersebut mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga tahun 2010, pada grafik tersebut mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga tahun 2010, rendemen tertinggi terdapat pada tahun 2003 sebesar 7,88 % dan rendemen terendah pada tahun 2010 sebesar 6,09 %. Adanya fluktuasi tingkat rendemen disebabkan dari jumlah input tebu digiling serta kandungan rendemen tebu, selain itu efisiensi pabrik gula merupakan faktor penting dikarenakan umur mesin di Pabrik Gula yang tergolong tua dan kurangnya peremajaan mesin gilingan, dapat disimpulkan bahwasanya tingkat rendemen dipengaruhi oleh kegiatan *on farm* yaitu pada saat awal tanam dan tebang yang merupakan bahan baku utama serta *off farm* yang berasal dari kegiatan produksi Pabrik Gula.

6.1 Karakteristik Responden

6.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan keberlangsungan responden PKBL dalam menjalankan kegiatan dan aturan pokok adalah umur. Hal ini disebabkan umur merupakan faktor demografi yang penting dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan serta mengetahui tingkat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, selain itu umur juga merupakan faktor penting dalam penyerapan teknologi informasi yang semakin berkembang. Umur sendiri merupakan lamanya hidup responden yang dihitung sejak lahirnya sampai dilakukannya penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Indikator umur dipilih dengan pertimbangan bahwasanya umur mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan program PKBL. Kematangan umur biasanya akan berdampak pada kinerja dan pengalaman, semakin tua akan semakin mendapatkan pengalaman yang dirintis dari awal pelaksanaan program PKBL baik dalam bidang UKM maupun dalam ushatani tebu. Pengelompokan keadaan penduduk berdasarkan umur dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak responden dalam usia produktif dan lanjut usia (tidak produktif). Karakteristik responden berdasarkan umur disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	30-40 Tahun	4	26,66
2	41-50 Tahun	8	46,66
3	> 50 Tahun	4	26,66
Total		16	100,00

Sumber : Analisis data primer 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang mempunyai umur produktif yaitu yang berumur < 50 tahun sebanyak 11 atau sebesar 73,32 %, umur tersebut merupakan umur produktif yang bisa menerima hal dan informasi baru sehingga dapat mengembangkan perencanaan untuk meningkatkan taraf

hidup yang lebih baik. Sedangkan responden yang berumur > 50 tahun sebanyak 4 jiwa atau sebesar 26,66% jiwa.

6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tolak ukur yang dapat dijadikan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau daya tangkap untuk dapat menginterpretasikan setiap informasi yang diterimanya (Soekartawi, 1998). Oleh karena itu pendidikan juga merupakan salah satu tolak ukur di dalam menentukan kadar intelektualitas seseorang. Dalam bidang pertanian tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi dalam menerima hal baru (inovasi). Pendidikan akan mengarahkan pada inovasi-inovasi yang mengarahkan petani maupun pelaku UKM kedalam inovasi yang menguntungkan bagi mereka, oleh karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang untuk menjadi lebih baik. Dengan melihat tingkat pendidikan responden, diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kesadaran pelaku UKM dalam pengembalian kredit bantuan PKBL dan efektivitas petani dalam usahatani tebu. Hal tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan (Lulusan)	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	SD	1	6,6%
2	SMP	2	13,3%
3	SMA	5	26,6%
4	SARJANA	7	46,6%
5	PASCA SARJANA	1	6,6%
TOTAL		16	100%

Sumber : Analisis data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan bervariasi mulai dari tingkat SD sampai dengan PASCA SARJANA, akan tetapi prosentase tingkat pendidikan tertinggi berada pada tingkat sarjana yaitu sebesar 46,6%. Untuk tingkat pendidikan SD sebesar 6,6%, tingkat pendidikan SMP sebesar 13,3%, tingkat pendidikan SMA sebesar 26,6%, tingkat pendidikan PASCA SARJANA 6,6%. Tingginya pendidikan akan mempengaruhi dalam menerima informasi baru serta kebijakan dalam mengambil suatu kebijakan dalam program

PKBL, prosentase terbesar dari tingkat sarjana merupakan sebagian pengurus dari PKBL yang berada di tingkat PG. Poerwodadie. Dari jumlah responden dapat diketahui jenis pekerjaan terdiri dari Karyawan PG sebanyak 3 orang, wirausaha 7 orang dan petani tebu sebanyak 6 orang.

6.1.3 Luas Lahan

Luas lahan selalu berkaitan dengan usahatani, semakin luas lahan yang dimiliki akan berpengaruh pada tingkat produksi yang dihasilkan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari usahatani yang dilakukan oleh petani. Luas lahan dalam penelitian ini adalah luas lahan yang digarap oleh petani, terdapat dua jenis lahan yang diusahakan yaitu lahan sawah dan lahan tegalan yang masing-masing dikategorikan dalam penggunaan lahan tebu dan non tebu (serealia). Rata-rata luas lahan petani dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 7. Presentase Luas Lahan Petani responden yang menggunakan kredit PKBL di PG. Poerwodadie, Desa Pelem Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

No	Luas Lahan (Ha)	Lahan Sawah	%	Lahan Tegalan	%	TOTAL %
1	37	36,5	98,64	0,5	1,35	100
2	8,5	8,5	100	0	0	100
3	20	115	95,83	5	4,1	100
4	37	36,5	114,06	0,5	1,35	100
5	33	150	79,78	38	20,21	100
6	12	8	66,66	4	33,33	100
TOTAL		354,5	-	43	-	-

Sumber : Analisis data primer 2012

Berdasarkan tabel di atas pengelolaan lahan didominasi lahan sawah dengan prosentase tertinggi 32,44% dengan luas lahan 120 Ha sedangkan pada lahan tegalan hanya 10%, begitu juga dengan luasan lahan yang lain, luas lahan dipengaruhi oleh sumber modal yang digunakan serta kepemilikan lahan dari petani, berdasarkan penelitian yang dilakukan petani yang memiliki luas lahan besar memiliki kemudahan dalam akses permodalan dengan pinjaman yang besar dikarenakan mempunyai jaminan dengan luas lahan yang dimiliki. Prosentase luas

lahan sawah yang besar dikarenakan output yang dihasilkan optimal dibandingkan dengan lahan tegalan, akan tetapi terjadi selisih harga sewa antara lahan sawah dengan lahan tegalan, semakin tingginya harga sewa lahan sawah dikarenakan pada wilayah PG. Poerwodadie penggunaan lahan didominasi dengan tanaman sereal (Padi dan Jagung).

6.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

6.2.1 Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi agar menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Program Kemitraan adalah fasilitas pinjaman baru untuk kebutuhan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada calon mitra binaan yang *feasible* namun belum *bankable*. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

1. Bentuk Program

Program Kemitraan dilakukan dengan memberikan pinjaman modal pengembangan usaha dan pengenalan teknologi-teknologi baru yang dapat membantu dalam pengembangan usaha tersebut. Meskipun ada sedikit faktor hibah, namun dana yang diturunkan kepada mitra binaan pada Program Kemitraan yang dibuat bersifat pinjaman dan mitra binaan wajib mengembalikan dana tersebut. Oleh karena itu, pengelola harus selektif dalam memilih calon anak angkat/mitra binaan agar dana yang digulirkan dapat kembali dan lancar pengembaliannya.

Ada beberapa jenis bantuan yang ditawarkan dalam Program Kemitraan. Diantaranya yaitu berupa modal, peralatan, tanaman, dan biaya garap. Besarnya plafon permohonan dana bantuan yang diloloskan sebesar 50% dari plafon yang diajukan atau tidak melebihi besarnya dana maksimal yang ditetapkan oleh pengelola yaitu sebesar 25 juta rupiah. Apabila dana yang diajukan melebihi

plafon maksimal, maka kekurangannya disarankan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya, misalnya PMUK atau KKP-e.

1.2 Syarat dan Tata Cara Pinjaman

Ada beberapa syarat usaha yang harus dipenuhi oleh mitra binaan dalam Program Kemitraan. Syarat/ kriteria tersebut bertujuan agar dana yang digulirkantepat pada sasaran program. Kriteria UKM yang dapat menjadi mitra binaan:

- a) Kekayaan bersih / Aset maksimal senilai Rp.200.000.000,- (di luar tanah dan bangunan
- b) Milik Warga Negara Indonesia
- c) Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki /berafiliasi dengan usaha menengah/besar
- d) Perusahaan Perorangan yang berbadan hukum/tidak, termasuk Koperasi
- e) Telah kegiatan usaha minimal 1 tahun
- f) Mempunyai potensi & prospek untuk dikembangkan

Untuk dapat memperoleh pinjaman modal pengembangan usaha maupun modalbiaya garap pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PG PoerwodadieMagetan, maka mitra binaan harus membuat proposal permohonan bantuanpinjaman yang memuat data pribadi sesuai KTP, data usaha, data keuangan (catatankeuangan 3 bulan terakhir, rencana penggunaan dana), melampirkan foto copi KTP, Kartu Keluarga, pas photo ukuran 3x4, denah lokasi usaha, buku tabungan, laporankeuanagn praktis, dan membuat surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjamandari BUMN/ perusahaan lain.

Setelah dana pinjaman diterima oleh mitra binaan, maka mitra binaan harusmemenuhi kewajibannya kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Pengurus PKBL PG Poerwodadie.
- 2) Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib.
- 3) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada PengurusPKBL PG Poerwodadie.

Bantuan pinjaman modal usaha diberikan untuk membantu UKM-UKM dan Koperasi yang berlokasi di sekitar pabrik untuk pengembangan usaha mereka. Saat ini jenis usaha yang sudah dibina yaitu berupa toko pracangan, taylor, ternak, budidaya jamur, warung makan, warnet, counter Hp, foto copy, kerajinan genteng, jual beli sepeda motor, kerajinan batu gips, industry tahu dan simpan pinjam dikoperasi karyawan PG Poerwodadie. Sesuai dengan Peraturan Menteri 05 BAB IV Pasal.12 ayat(3), tingkat bunga yang dibebankan kepada mitra binaan yang mengambil pinjaman baik untuk bantuan pengembangan usaha untuk UKM dan koperasi maupun bantuan biaya garap untuk petani inti adalah sebesar 6-7% per tahun dari limit pinjaman. Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan untuk pinjaman pengembangan usaha antara 2-3 tahun. Sedangkan jangka waktu pengembalian pinjaman untuk bantuan biaya garap hanya satu tahun. Bantuan yang di dropping untuk petani inti antara Rp 4.300.000 sampai dengan Rp 12.500.000 per hektarnya. Besarnya dana yang di dropping untuk koperasi adalah antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000. Sedangkan untuk pengembangan UKM dana maksimal yang dapat diberikan kepada mitra binaan yaitu Rp 25.000.000. Jangka waktu yang diberikan kepada mitra binaan pengembangan usaha adalah antara 2-3 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun. Sedangkan untuk petani inti jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 7%. Perbedaan tingkat bunga pinjaman tersebut dilakukan agar tingkat bunga yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga disamakan dengan tingkat bunga pada KKP-e. angsuran pertama dibayarkan setelah tiga bulan dana pinjaman diterima oleh mitra binaan.

1.3 Sektor Usaha

Sasaran utama dalam program ini yaitu UKM dan Koperasi. Kriteria usaha yang dapat dibiayai oleh program ini harus merupakan usaha yang produktif baik itu usaha di bidang barang maupun jasa. Mitra binaan yang mengambil dana bantuan pengembangan usaha berasal dari anggota keluarga karyawan, saudara karyawan, maupun tetangga karyawan PG Poerwodadie Magetan. Selain UKM,

objek pemerimabantuan juga diambil dari beberapa petani yang menjadi mitra PG Poerwodadie. Petani yang diterima menjadi mitra binaan sebagian besar diambil dari petani-petani yang masuk menjadi petani inti. Artinya, skala usahatani menurut kuantitas sudah cukup besar. Namun tidak menutup kemungkinan pula untuk pengusaha-pengusahakecil juga disetujui menjadi mitra binaan program ini. Mitra binaan dalam program ini biasanya disebut dengan anak angkat.

Bantuan peralatan diberikan kepada koperasi karyawan PG Poerwodadie berupa traktor dan bantuan berupa bibit diberikan kepada petani jambu mete di Bojonegoro. Sedangkan bantuan biaya garap diberikan kepada para petani inti PG Poerwodadie. Dana yang di droopping digunakan untuk biaya garap TRK I dan II. Pada periode 2011/2012 ada 29 orang petani yang diberikan bantuan. Untuk dapat menjadi mitra binaan, para petani inti tersebut sebelumnya telah dipilih oleh pengurus PKBL dan diberikan sosialisasi mengenai program tersebut. Setelah petani setuju, perwakilan petani dengan bimbingan pengurus PKBL membuat surat permohonan pengajuan menjadi mitra binaan yang berisi data pribadi dan luas lahan yang didaftarkan.

1.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan, ada beberapa kendala yang dialami baik dari internal pengurus maupun mitra binaan sendiri. Pengurus PKBL adalah karyawan PG yang ditunjuk oleh Administratur secara langsung guna menjalankan program tersebut, tetapi di sisi lain tugas mereka sebagai karyawan dalam pabrik masih harus dilakukan. Hal ini kemudian mewajibkan pengurus PKBL harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengemban tugas ganda tersebut. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan PKBL ternyata masih belum bisa berjalan secara maksimal. Kegiatan pendampingan kepada mitra binaan menjadi kurang. Hal ini menyebabkan tingkat perkembangan UKM binaan menjadi lambat bahkan cenderung stagnan. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan pengurus juga mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman mitra binaan terhadap program. Membuat dana yang dipinjamkan menjadi tidak tepat kegunaan. Dana tersebut tidak benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha sepenuhnya oleh sebagian mitra binaan. Akhirnya ada beberapa pinjaman yang menunggak dan bahkan tidak kembali. Selain lambatnya perkembangan usaha, ada

pula beberapa UKM yang mengalami pailit sehingga pinjaman yang diberikan tidak dapat dilunasi oleh mitrabinaan. Apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman, baik petanimaupun pemilik UKM lainnya maka Seksi Penagihan akan melakukan peninjauan dan membantu di dalam proses penyelesaiannya. Setelah itu mitra binaan dan petugas membuat surat pernyataan. Mitra binaan yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman diwajibkan melapor kepada pengurus. Dari hasil peninjauan lapang terkait kondisi mitra binaan yang mengalami masalah pembayaran, pengurus kemudian memutuskan untuk memberikan denda atau tidak atas penunggakan tersebut.

Besarnya denda disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diambil tapi jumlahnya diputuskan dengan melihat kondisi keuangan mitra binaan itu sendiri. Denda tersebut sangat jarang diberikan karena jumlah mitra binaan yang menunggak sangat sedikit dan memang kondisi usaha mereka juga sedang mengalami penurunan. Pada pencairan pinjaman tahun 2008, ada dua UKM pailit. Pinjaman untuk pengembangan usaha yang diberikan masing-masing sebesar Rp 8.000.000 dan jatuh tempo pengembalian pinjaman sampai dengan tahun 2010. Setelah dilakukan peninjauan oleh pengurus, melihat kondisi ekonomi mitra binaan tersebut yang benar-benar tidak mampu akhirnya pengurus membuat kebijakan memberikan waktu sampai dengan batas yang tidak ditentukan kepada mitra binaan tersebut untuk mengembalikan pinjamannya. Sampai saat ini sisa dana yang belum dikembalikan oleh kedua UKM tersebut sebesar Rp 9.666.668. Melihat data evaluasi Program Kemitraan per 30 Juni 2011 yang dapat dilihat pada lampiran, sejauh ini pelaksanaan Program Kemitraan di PG Poerwodadi berjalan cukup baik. Dana yang diturunkan dapat terus bergulir setiap tahunnya. Pengembalian kredit pun berjalan relative lancar. Pengembalian pinjaman per 30 Juli 2011 mencapai sebesar 85%.

6.2.2 Program Bina Lingkungan

Bina Lingkungan merupakan suatu program sosial yang dilakukan oleh PGPoerwodadie. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan. Bantuan yang diberikan berupa materiil, pelatihan dan pembinaan. Dana yang diturunkan bersifat hibah. Artinya dana diberikan dan penerima tidak perlu mengembalikan dana bantuan tersebut. dana yang dipakai diambil dari 2% dana yang digunakan dalam kegiatan PKBL itu sendiri.

1) Objek Bantuan

Obyek Bantuan yang dapat diberikan berupa bantuan-bantuan sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat. Bantuan yang diberikan pada Program Bina Lingkungan adalah: Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah serta Pelestarian Alam.

2) Tata Cara Pengajuan Bantuan

Untuk bantuan bencana alam, peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan langsung diberikan kepada masyarakat. Sedangkan bantuan pengembangan prasarana dan sarana dan bantuan tempat ibadah, pemohon diwajibkan membuat proposal permohonan bantuan kepada pengurus PKBL.

Bagi masyarakat yang hendak mengajukan bantuan, pemohon diwajibkan membuat proposal permohonan bantuan yang memuat data pemohon (perorangan, kelompok, lembaga, atau panitia), data progress kegiatan objek calon penerima bantuan, rencana penyelesaian pekerjaan atau kegiatan, rencana kebutuhan dana dari pekerjaan atau kegiatan secara rinci.

3) Sektor Bantuan

Dalam pelaksanaannya, program ini bekerja sama dengan beberapa instansi lain untuk menyalurkan bantuan. Diantaranya adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, LMI cabang Magetan dan Puskesmas Karangrejo. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran bantuan itu sendiri.

Realisasi bantuan pada Program BinaLingkungan yang telah dilakukan oleh PKBL PG Poerwodadie meliputi:

1) Bantuan Bencana Alam Bantuan bencana alam diberikan kepada para korban banjir di Jiwan pada tahun 2004 dan di Bojonegoro dan Ngawi pada Desember tahun 2007 lalu. Bantuan diberikan kepada korban banjir luapan sungai bengawan solo. Selain dana dari PKBL itu sendiri, kegiatan ini juga didukung oleh BUMN Peduli pusat

2) Bantuan Prasarana Pendidikan

Bantuan yang diberikan berupa renovasi gedung dan pembangunan taman bacaan plus fungsi. Renovasi gedung diberikan kepada TK MELATI bulan Mei 2006, April 2007, dan Februari 20011. Selain renovasi gedung, bantuan juga diberikan kepada warga desa baluk berupa taman baca plus fungsi. Latar bekalang didirikannya taman baca ini adalah untuk mengupayakan tersedianya sarana bacaan bagi siswa RA Roudotul Ulum di Desa Baluk agar terbiasa membaca sejak dini, mengenalkan buku-buku islami dan membuka cakrawala siswa dengan ilmu pengetahuan. Dana yang diberikan untuk pembangunan adalah sebesar Rp 10.000.000. dana ini memang lebih kecil dari dana yang diajukan oleh panitia pembangunan sebesar Rp 19.730.000.

3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan kesehatan rutin diberikan tiap tahunnya oleh PKBL PG Poerwodadie kepada masyarakat yang berada di area kerja PG. Bantuan yang diberikan berupa:

a) Khitanan Massal

Khitanan massal sudah mulai diberikan sejak awal PKBL dilaksanakan yaitu sejak tahun 2004 dan sampai sekarang kegiatan tersebut masih rutin dilakukan setiap tahunnya. Peserta khitan adalah anak-anak yang berasal dari wilayah kerja PG Poerwodadie. Pada awal pelaksanaan tahun 2004, peserta khitan sebanyak 126 anak sedangkan pada tahun berikutnya animo masyarakat terhadap kegiatan ini meningkat. Khitanan diikuti oleh lebih dari 200 anak pada tiap pelaksanaannya.

b) Fogging

PG. Poerwodadie juga memberikan bantuan dana kesehatan kepada masyarakat di Kelurahan Manisrejo pada bulan Juli 2010 untuk melaksanakan fogging sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit DBD. Bantuan diberikan berupa uang tunai satu juta rupiah tersebut diterimakan langsung kepada aparat Kelurahan Manisrejo.

c) Pekan Kesehatan Ibu Dan Anak

Dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat terhadap aktivitas Posyandu, PG Poerwodadie bekerjasama dengan Puskesmas Karangrejo menggelar acara sosial Pekan Kesehatan Ibu dan Anak. Bertempat di Balai Pertemuan Pabrik Gula, beragam acara di laksanakan mulai sosialisasi kesehatan ibu dan anak, menimbang berat bayi, imunisasi, pemberian makanan tambahan dan paket khusus untuk balita kurang gizi hingga lomba balita sehat.

d) Bantuan Sarana Dan Prasana Umum Perbaikan sarana dan prasarana masyarakat sekitar PG Poerwodadie juga menjadi perhatian utama dalam Program Bina Lingkungan. Bantuan yang diberikan berupa pengecoran jalan di Desa Banjar Panjang, Kuwon, Pelem, Pulutan, Bangunsari, Temenggungan, Temboro, Tapen, Mangkujayan, Subontoro dan Bayem Taman pada tahun 2004. Pada tahun tersebut juga dilakukan rehabilitasi kantor lurah Desa Manisrejo, perbaikan jembatan di Desa Gandu, dan pembuatan pagar makam di Desa Pandeyan. Pada tahun 2006 bantuan sarana dan prasarana umum yang diberikan berupa pembangunan MCK untuk warga Kelurahan Manisrejo. Pengerasan jalan Kelurahan Karangrejo dan pembuatan sumur artesis di Desa Pelem. Tahun berikutnya dilakukan pengerasan jalan di Desa Mantren dan pembuatan sumur artesis untuk warga Desa Pelem.

e) Bantuan Tempat Ibadah

Bantuan perbaikan tempat ibadah merupakan bantuan yang paling banyak diberikan dalam Program Bina Lingkungan. Setiap tahun bantuan ini selalu diberikan. Hal inilah yang membuat pengurus PKBL jenuh. Ada lebih dari 13 tempat ibadah dan 2 pesantren telah dibantu dalam proses perbaikannya oleh program Bina Lingkungan ini. Pada tahun 2004, Bina Lingkungan memberikan bantuan untuk rehabilitasi masjid dan mushola di Desa gebyog, pelem, gerih, Ngasinan, Arjosari, Klagen, Karangrejo, dan Temenggungan. Selain itu sumbangan juga diberikan kepada Pesantren Al Fatah di Desa Temboro dan

Pesantren An Nur di Desa Jungke. Dana yang dikeluarkan pada tahun 2004 sebesar Rp 22.261.500. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dilakukan perbaikan kepada Gereja Pelem dan Masjid Baiturrohman Pelem. Perbaikan Masjid Baitul Muttaqin dilakukan pada tahun 2010 dan tahun 2011 dilakukan perbaikan untuk masjid Al Idhar.

f) Bantuan Pelatihan Dan Pembinaan

Pembinaan Dan Pelatihan Untuk Mitra Binaan untuk Petani Tebu Rakyat yang diberikan berupa pelatihan dan pengenalan terhadap inovasi-inovasi baru dalam hal usahatani tebu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mitra binaan dalam berusaha agar produktivitas tebu yang ditanam dapat meningkat sehingga laba yang dihasilkan pun juga dapat meningkat. Pelatihan yang diberikan biasanya berupa sosialisasi teknik budidaya tebu maupun penanganan pasca panen pada bulan maret 2008. Pelatihan diberikan karena dalam praktek budidaya yang dilakukan oleh petani sering ditemukan beberapa penyimpangan yang mengakibatkan ketidak optimalan produksi.

g) Bantuan Bibit Tanaman Dalam Rangka Penghijauan Kabupaten Magetan Dalam upaya melestarikan lingkungan dan ikut meminimalisir dampak dari global warming, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2010 PG. Poerwodadie menyerahkan bantuan 1.000 bibit pohon ke desa Ginuk dan Ngariboyo yang mempunyai mata air di Kecamatan Karas. Jenis bibit yang diberikan diantaranya adalah jenis sawo kecik, beringin, jati, sengon, sukun dan mahoni. Penanaman bibit ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara dan akar pepohonan tersebut mampu menahan air tanah sehingga mata air tersebut tidak sampai mati dan kering. Bibit pohon tersebut ditanam di titik-titik dekat mata air di desa Ginuk. Oleh warga setempat air yang keluar dibuat semacam kolam dari batu untuk menampungnya.

h) Bantuan Santunan Anak Kurang Mampu PG. Poerwodadie melalui Takmir Masjid Baiturrohman – Magetan Jawa Timur menggandeng lembaga zakat yang ada untuk bersinergi menjadi solusi bagi beberapa siswa yang berpotensi tetapi terdesak oleh kondisi ekonomi yang minim. Acara yang diadakan bersama dengan Yayasan Dana Sosial al Falah Surabaya ini memberikan beasiswa anak yatim kepada anak dan dua anak kurang mampu. Program yang masih dalam proses adalah beasiswa untuk anak dhuafa dan bantuan guru TPA. Selain kegiatan diatas, menjelang penutupan daftar ulang tahun ajaran 2011, PKBL PG Poerwodadie juga

memberikan beasiswa kepada anak- anak kurang mampu yang ada di sekitar pabrik. Kegiatan ini dilatarbelakangi tersiarnya kabar seorang warga yang harus dipenjara karena terjerat suatu kasus penggelapan BPKB untuk membayar SPP. Menggalang kerjasama dengan lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya dan Lembaga Manajemen Infak Cabang Magetan, tim PKBL PG Poerwodadie magetan memberikan bantuan beasiswa kepada keluarga tersebut.

i) Pasar murah

PG Poerwodadie sebagai salah satu BUMN, menyalurkan bantuan gula secara cuma-cuma kepada masyarakat desa sekitar. Zakat dan bazaar gula murah dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga ditingkat konsumen. Setiap tahunnya, minimal 2 ton gula disalurkan kepada masyarakat. Pasar murah digelar di Alun-alun Magetan dan desa-desa yang masuk ke dalam area PG Poerwodadie. Untuk menghindari ketidakmerataan distribusi, setiap pembeli hanya mendapatkan jatah maksimal pembelian sebesar 5 kilogram. Harga yang ditawarkan yaitu Rp 8400 perkilonya. Setiap desa yang menjadi titik pasar murah diberi jatah 500 kilo. Pada tahun 2009, sekitar 6460 kilogram (6,4 ton) gula pasir disalurkan melalui instansi desa untuk dibagikan kepada masyarakat masing-masing desa. Tercatat ada 14 kecamatan yang menerima bantuan gula tersebut dengan 4 desa terdekat yang mendapat prioritas lebih dalam penyalurannya, yaitu Kelurahan Manisrejo, Desa Pelem, Mantren, dan Karangrejo.

j) Bedah Rumah Warga

Bedah rumah diberikan kepada Subariyah, warga desa manisrejo pada 13 maret 2010. Selain Subariyah, sudah ada beberapa permohonan bedah rumah yang sedang diproses oleh pengurus PKBL PG Poerwodadie Magetan

6.3 Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Tebu pada program PKBL

6.3.1 Biaya Usahatani Tebu

Biaya usahatani adalah semua biaya yang dikeluarkan langsung oleh petani dalam satu musim tanam, biaya usahatani terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dan biaya operasional. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani serta menghitung besarnya penerimaan dan pendapatan dalam melakukan kegiatan usahatani tebu pada sistem PKBL. Dalam analisis usahatani, biaya usahatani dihitung dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani berdasarkan rata-rata luasan per hektar. Perhitungan dilakukan dalam satu musim tanam dengan jumlah responden petani sejumlah 6 orang yang merupakan sampel dari petani yang tergabung dalam KPTR Gunung Madu PG.Poerwodadie.

1. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan, dalam penelitian yang dilakukan diketahui dari biaya tetap adalah sewa lahan dimana petani tebu PKBL menggunakan sewa pada lahan sawah maupun pada lahan tegalan, harga pada lahan sawah lebih tinggi daripada lahan tegalan dimana terjadi perbedaan produktivitas yang dihasilkan dari masing-masing penggunaan lahan.

Tabel 8 Rata-rata Biaya Tetap per Ha Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

No	Keterangan	Nilai (Rp/Ha)	Prosentase (%)
1.	Sewa Lahan	12.000.000,00	90,90
2.	Biaya Pajak Lahan	1.200.000,00	9.10
TOTAL		13.200.000,00	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Sewa lahan oleh petani dilakukan dengan cara menyewa dari petani yang berada di wilayah PG. Poerwodadie yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan. Sewa lahan dilakukan dari awal periode tanam satu tahun sebelum kegiatan

usahatani tebu, hal tersebut dilakukan agar mendapatkan harga yang murah, apabila kegiatan menyewa dekat dengan masa tanam dan dilakukan pada lahan sawah maka akan terjadi kenaikan harga rata-rata biaya sewa lahan per Ha Rp 12.000.000,00 sedangkan.

1. Sewa Lahan

Sewa lahan merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menyewa lahan, sebagian besar petani responden melakukan sewa lahan dibandingkan dengan lahan milik sendiri. Lahan yang disewa terdiri dari lahan sawah dan tegalan, akan tetapi mayoritas petani responden memilih lahan sawah dikarenakan produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan lahan tegalan meskipun sewa lahan sawah lebih mahal daripada lahan tegalan.

2. Biaya Pajak Lahan

Biaya pajak lahan merupakan biaya yang tetap yang ditanggung petani selain biaya sewa. Pada tabel 8 didapatkan hasil biaya pajak lahan 10% dari biaya sewa per Ha yaitu sebesar Rp 1.200.000,00, besarnya sewa lahan disesuaikan dengan kondisi masa tanam, pada saat memasuki masa tanam tebu pada lahan sawah terjadi kenaikan harga dibanding dengan satu periode tanam sebelumnya, petani lebih memilih melakukan sewa lahan pada periode musim tanam selanjutnya untuk menghindari kenaikan harga sewa lahan

2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi yang dihasilkan, pada penelitian ini diketahui untuk biaya variabel usahatani tebu kredit PKBL meliputi biaya pupuk, biaya bibit, biaya tenaga kerja baik pria maupun wanita pada pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, penyulaman, gulud dan biaya herbisida, biaya pengairan dan biaya tebang angkut.

Tabel 9. Rata-rata Biaya Variabel Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

No	Rincian Biaya Variabel	Nilai (Rp/Ha)	Prosentase (%)
1.	Pupuk (Za, Phonska Petroganik)	5.514.033,00	29,6365
2.	Bibit	4.080.000,00	21,929
3.	Irigasi	3.000.000,00	16,1242
4.	Tenaga Kerja	6.011.500,00	32,3103
Jumlah Biaya Variabel		18.605.533,00	100

Sumber : Analisis data primer 2012

1. Pupuk

Pupuk yang digunakan oleh petani terdiri dari pupuk kimia dan pupuk organik, pupuk kimia digunakan untuk mensuplai kebutuhan nutrisi tanaman selama pertumbuhan, pupuk kimia terdiri dari Phonska dan Za dengan komposisi

2. Bibit

Bibit yang digunakan oleh petani responden terdiri dari jenis BL dan 867, berdasarkan data kuisisioner, penggunaan bibit BL lebih mendominasi dibandingkan bibit jenis 867, karakteristik jenis BL lebih dipilih disesuaikan dengan kondisi lahan. Harga bibit BL adalah Rp 60.000,00/Kw, akan tetapi ada juga petani yang menanam sendiri bibit jenis BL dengan sistem Kebun Bibit Datar (KBD) yaitu kebun/lahan yang digunakan khusus untuk pembibitan dengan perbandingan 1:10 (satu Ha bibit untuk 10 Ha lahan)

3. Irigasi

Pengairan dilakukan pada saat awal penanaman bibit tebu/dengan menggunakan tanaman baru PC, pengairan dilakukan rata-rata selama 12 jam/hari, pengairan dilakukan dengan melihat curah hujan yang turun selama masa pertumbuhan tebu.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usahatani ini terbagi menjadi dua yaitu tenaga kerja pria dan wanita, tenaga kerja pria digunakan dalam kegiatan pengolahan lahan dan pemeliharaan yang meliputi penyulaman, pemberian air, pemeliharaan saluran, pemupukan, pembumbunan, penyiangan dan tenaga

kerja tebang angkut. Sedangkan tenaga kerja wanita digunakan untuk kegiatan penanaman, dalam sistem upah terbagi menjadi dua yaitu sistem upah harian dan borongan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai biaya tenaga kerja untuk investasi dan biaya tenaga kerja produksi.

a. Pengolahan Lahan

Biaya tenaga kerja pengolahan lahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengolah lahan yang digunakan untuk penanaman tebu, pengolahan dilakukan pada lahan dengan tanaman PC/tanaman baru, pengolahan dilakukan dengan menggunakan traktor yang disewa dari Koperasi Tebu Rakyat dengan biaya sewa 1,75 Jt/Ha.

b. Penanamam

Biaya tenaga kerja penanaman adalah biaya yang dikeluarkan dalam satu kali dalam satu musim tanam selama kegiatan usahatani tebu berlangsung. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja wanita dengan sistem harian dengan jumlah hari kerja 3 hari dan menggunakan 40 orang wanita/Ha. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk upah penanaman bibit tebu adalah Rp 3.600.000,00/Ha

c. Pemupukan

Tenaga kerja pemupukan dilakukan pada dua tahapana yaitu pada awal penanaman dan masa masa pertumbuhan tanaman, tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja harian dengan upah Rp 15.000,00/6 jam/orang dengan tenaga kerja pria sebanyak 10 orang/Ha selama 2 hari, jadi total keseluruhan biaya tenaga kerja pemupukan adalah Rp 300.000,00/Ha.

d. Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman tebu. Rata-rata biaya tenaga kerja untuk kegiatan penyiangan adalah Rp 15.000,00/6 jam/orang dengan tenaga kerja sebanyak 3 orang selama 2 hari, jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatann penyiangan adalah Rp 90.000,00/Ha

e. Sulam

Kegiatan penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit tanaman tebu yang mati dengan bibit baru. Rata-rata tenaga kerja untuk kegiatan penyiangan adalah Rp 15.000,00/6 jam/orang dengan tenaga kerja sebanyak 3 orang selama 2 hari,

jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyiangan adalah Rp 90.000,00/Ha

f. Gulud

Pengguludan bertujuan untuk memberikan tempat untuk bibit tebu yang akan ditanam, dalam kegiatan pengguludan rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah Rp 300.000,00/Ha.

6.3.2 Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam usahatani yang tidak berkaitan langsung dalam proses budidaya tebu akan tetapi dapat mengurangi pendapatannya. biaya lain-lain ini disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Rata-rata Biaya Lain-Lain Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

No	Rincian Biaya Lain-Lain	Total
1	Biaya tebang angkut	7.351.583,00
2	Fee KOPERASI	80.069,00
3	Hutang ke PG	4.203.634,00
4	Bunga Kredit PKBL	10.548.708,00
Jumlah Biaya Lain-Lain		22.183.995,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Biaya lain-lain dalam penelitian ini meliputi biaya tebang angkut, bunga kredit, fee KUD dan hutang petani kepada PG, jumlah biaya lain-lain sebesar Rp 22.183.995,00. Berikut ini dijelaskan rincian biaya lain-lain.

a. Biaya tebang angkut

Kegiatan tebang angkut meliputi kegiatan tebang yaitu memotong bagian tebu mengikat dengan 8-10 ikatan dengan ketentuan MBS (Manis, Bersih dan Segar) dan kegiatan angkut yaitu mengangkut tebu yang diikat ke dalam truk pengangkut yang kemudian disetor ke PG, rata-rata biaya tebang angkut sebesar Rp 7.351.583,00 dengan rincian Rp 1.700,00 untuk biaya tebang dan Rp 3000,00 untuk biaya pengangkutan.

b. Fee KOPERASI

Fee KOPERASI ini adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk KOPERASI yang menaunginya yaitu KPTR Gunung Madu yang ditanggung petani dengan



membayar sebesar Rp 20/Kg dari gula yang didapatkan oleh petani, besarnya *fee* rata-rata sebesar Rp 80.069,00

c. Hutang Petani ke PG.

Hutang petani ke PG merupakan biaya yang dibayar petani untuk penggantian harga karung gula SHS petani yaitu sebesar Rp. 1.050,00/kg gula. Pembayaran hutang ini dibayar dengan pemotongan hasil pendapatan petani di akhir masa giling, semakin banyak gula yang di dapatkan petani semakin banyak pula hutang penggantian karung gula petani tebu.

d. Bunga Kredit PKBL

Besarnya bunga kredit pada PKBL sebesar 7 % dari total kredit yang terdiri dari pupuk, bibit, sewa traktor dan biaya garap. Bunga ini dibayar petani dengan pemotongan diakhir mereka mendapatkan hasil dari tebang, bunga kredit yang diterima petani PKBL sebesar 10.548.708,00.



6.3.3 Total Biaya

Total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam usahataniya terdiri dari beberapa biaya seperti biaya tetap, biaya variabel dan biaya lain-lain. Rata-rata biaya total per Ha yang dikeluarkan oleh petani dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Rata-rata Total Biaya Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

No	Rincian Total Biaya	(Rp/ha)
1	Biaya sewa lahan	12.000.000,00
	Biaya pajak lahan	1.200.000,00
	Jumlah biaya tetap	13.200.000,00
2	Biaya bibit	4.080.000,00
	Biaya pupuk	5.514.033,00
	Biaya tenaga kerja	6.011.500,00
	Biaya irigasi	3.000.000,00
	Jumlah biaya variabel	18.605.533,00
3	Biaya tebang angkut	7.351.583,00
	Fee KOPERASI	80.069,00
	Hutang petani ke PG	4.203.634,00
	Bunga Kredit PKBL	10.548.708,00
	Jumlah Biaya lain-lain	22.183.995,00
	Total biaya usahatani	51.232.512,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Pada tabel dijelaskan total biaya dari masing-masing biaya tetap, biaya variabel dan biaya lain-lain, pada biaya tetap sebesar Rp 13.200.000,00 yang diperoleh dari penjumlahan antara sewa lahan dan pajak lahan, kemudian biaya variabel sebesar Rp 18.605.533,00 yang terdiri dari biaya pupuk, bibit, tenaga kerja, irigasi dan tebang angkut, kemudian biaya lain-lain yang terdiri dari biaya tebang angkut, fee KOPERASI, hutang petani ke PG dan Bunga kredit PKBL sebesar 7%, sehingga total biaya usahatani diperoleh sebesar Rp 51.232.512,00, total biaya usahatani tersebut yang kemudian dikeluarkan petani per hektar dalam melakukan usahatani tebu pada kredit PKBL.

6.3.4 Penerimaan Usahatani Tebu

Tabel 12. Rata-rata Penerimaan Usahatani Tebu PetaniPKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan

No	Rincian Penerimaan	(Rp/ha, %, Kg, Kw)
1	Produksi tebu/Ha	1.564,17 Kw
2	Rendemen SHS	4,64%
3	Produksi Gula	7.256,76 Kg
4	Penerimaan dari unsur gula	Rp.61.164.547,53
5	Harga tetes	Rp.1850
6	Penerimaan dari unsur tetes	Rp.2.893.708,33
Total Penerimaan		Rp.64.058.255,87

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Penerimaan usahatani pada pola PKBL didapatkan dari perkalian jumlah produksi yang dihasilkan dari satu periode musim tanam dengan jumlah rendemen gula yang ditentukan oleh pabrik gula dikalikan dengan harga lelang gula, disamping penerimaan dari unsur gula, petani juga mendapatkan penerimaan dari unsur tetes yang didapatkan dari perkalian jumlah produksi tebu dengan harga / uang ganti tetes per kuintal tebu. Rata-rata jumlah produksi tebu pada musim giling 2011 sebesar 1.564 Kw/Ha. Rata-rata rendemen yang diberikan kepada petani sebesar 7,02%, tingkat rendemen dipengaruhi oleh jumlah tebu yang masuk ke PG, besarnya rendemen ditentukan oleh PG sebagai pertimbangan dalam menentukan sistem bagi hasil oleh PG dan Petani, selain itu penerimaan juga didapat dari harga lelang gula yang diadakan selama periodik mingguan dari keputusan dewan direksi pusat, harga lelang gula pada musim giling 2011 sebesar Rp 8.340,00/Kg. Penerimaan dari unsur tetes diberikan sebagai kompensasi bagi hasil petani dan PG dalam menjual gula, rata-rata penerimaan tetes musim giling 2011 adalah Rp 1.850,00/Kw nilai besaran dari tetes didapatkan dari penentuan yang berasal dari PG. Jadi dapat diperoleh total penerimaan usahatani sebesar Rp.64.058.255,87 (perhitungan terdapat pada lampiran 8)

6.3.5 Pendapatan Usahatani Tebu

Analisis pendapatan usahatani tebu digunakan dalam menghitung besarnya pendapatan petani yang mengambil kredit PKBL dalam satu musim giling, analisis pendapatan usahatani tebu diperoleh dari selisih antara penerimaan yang didapat dari musim giling 2011 dan total biaya selama kegiatan usahatani, berdasarkan perhitungan pada total biaya dan total penerimaan, rincian perhitungan total biayadiperoleh sebesar Rp 51.232.512,00sedangkan total penerimaan diperoleh sebesar Rp.64.058.255,87maka pendapatan usahatani tebu diperoleh sebesar Rp 12.825.744,00/Ha. Rincian dapat dilihatpada tabel 13 dibawah.

Tabel 13. Rata-rata Pendapatan Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

Total Penerimaan (Rp/Ha)	Total Biaya (Rp/Ha)	Total Pendapatan (Rp/Ha)
Rp.64.058.255,87	51.232.512,00	12.825.744,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

6.3.6 Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah suatu usaha agroindustri ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha agroindustri tersebut dan besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil itu. Efisiensi usaha agar bisa ditentukan dengan menghitung atau *cost ratio*yaitu hubungan antara usaha agroindustri dengan tingkat biaya produksi. Efisiensi dari usatani tebu PKBL dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. R/C Ratio Usahatani Tebu Petani PKBL satu musim tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

Total Penerimaan (Rp/Ha)	Total Biaya (Rp/Ha)	R/C Ratio
64.058.255,87	51.232.512,00	1,25

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Dalam perhitungan efisiensi digunakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam, dalam perhitungan yang

dilakukan diperoleh total penerimaan sebesar Rp.64.058.255,87 dan total biaya sebesar Rp 51.232.512,00, maka dapat diperoleh perhitungan sebesar 1,25 dimana setiap penambahan modal sebesar Rp 100,00 akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 125,00 dan berdasarkan kriteria apabila R/C Ratio lebih dari 1 maka usahatani dengan menggunakan kredit PKBL efisien dan menguntungkan.



6.4 Soft System Methodology

Terlepas dari aspek usahatani tebu pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam analisis selanjutnya menganalisis mengenai permasalahan dalam unit UKM mitra binaan, dimana dari masing-masing mitra binaan yang terdapat dalam sektor UKM terdapat permasalahan kompleks yang timbul baik dari intern unit mitra binaan maupun dari pelaksanaan dari tingkat pengurus hingga pada solusi penyelesaian. Berikut akan dijelaskan dimulai dari tahapan permasalahan awal, menentukan akar permasalahan yang muncul selama mengikuti program PKBL, dan menentukan model yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6.4.1 Menentukan Situasi Masalah

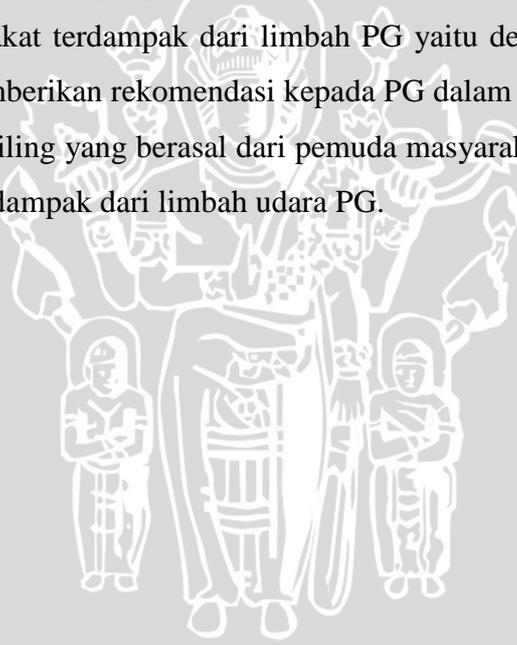
1. Rich Picture

Elemen dalam permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PKBL dan fenomena yang berkembang di PG. Poerwodadie dalam bidang kemitraan yang terjalin dan situasi permasalahan. *Rich Picture* pada gambar 11 menggambarkan permasalahan yang mudah dimengerti dan jelas dari batasan perbagian dari elemen yang ada pada lingkup pelaksana dan masyarakat yang berisi aliran informasi mengenai aktivitas yang berjalan dari orang yang terkait dengan pihak eksternal dan internal yang berkepentingan dan konflik. Bagian yang terpenting dari *Rich Picture* adalah proses perpindahan dari berpikir mengenai situasi permasalahan ke berpikir mengenai apa yang dapat dilakukan terkait dengan situasi permasalahan.

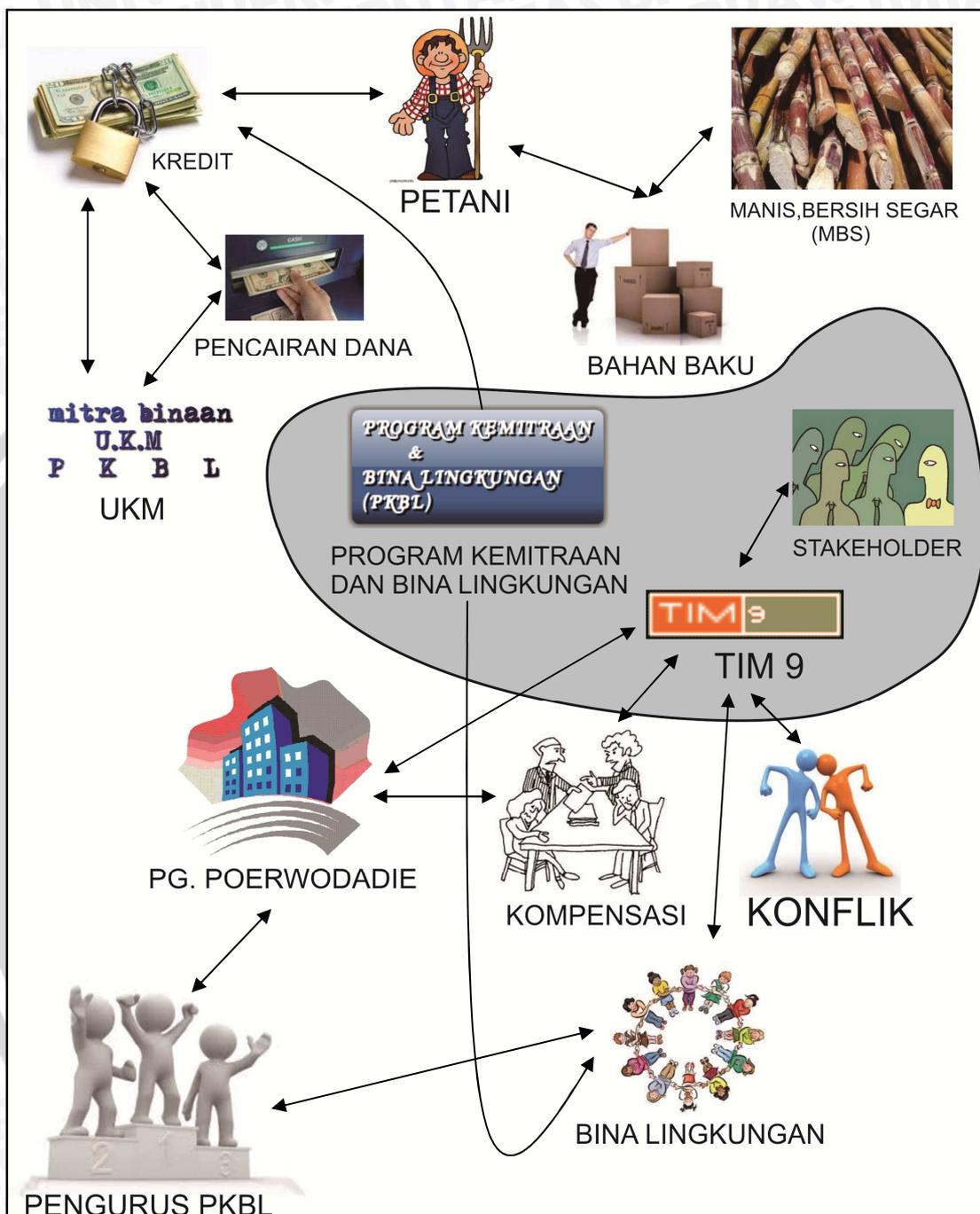
Pada gambar yang berada di tengah yaitu pelaksanaan PKBL menjadi fokus *Rich Picture* yang selanjutnya dikaitkan dengan tanda panah yang menunjukkan keterkaitan antar elemen yang bersangkutan yaitu program kemitraan dan bidang bina lingkungan, arah panah PKBL menuju kredit berada pada tengah antara mitra binaan UKM dan Petani dan dihubungkan dengan gambar pencairan dana, keterkaitan anak panah tersebut menunjukkan adanya relasi yang kuat yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, dalam pelaksanaannya kredit diberikan pada sektor usahatani tebu dan bantuan modal pada mitra binaan UKM. Pada arah panah dari gambar petani mengarah pada bahan baku dan dihubungkan langsung

dengan gambar PG, hal ini menunjukkan bahwa setelah pencairan kredit berjalan dan dimulai usahatani tebu maka petani akan menghasilkan baha baku dalam bentuk tebu giling yang selanjutnya disetorkan ke PG.Poerwodadie dengan arah panah pada gambar MBS (Manis Bersih dan Segar) yang merupakan standar dari bahan baku tebu giling.

Selanjutnya pada arah panah dari fokus PKBL pada tengah yang megarah pada program Bina Lingkungan yang dua arah panah mengarah pada gambar Bina Lingkungan yaitu TIM 9 dan Pengurus PKBL, gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaanya Bina Lingkungan dijalankan oleh pengurus PG. Poerwodadie dengan penerima masyarakat baik pada bidang kesehatan, sosial, pendidikan maupun bantuan sarana dan prasarana, sedangkan TIM 9 merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memfasilitasi dari konflik yang berkembang antara PG dan masyarakat terdampak dari limbah PG yaitu debu udara (*fly ass*), selanjutnya TIM 9 memberikan rekomendasi kepada PG dalam penyediaan tenaga kerja PG dalam masa giling yang berasal dari pemuda masyarakat manisrejo yang merupakan wilayah terdampak dari limbah udara PG.



Gambar 11. Rich Picture pelaksanaan PKBL PG. Poerwodadie



6.4.2 Root Definition

Root definition merupakan deskripsi verbal yang ringkas namun padat mengenai esensi dari sistem. Root definition yang baik seharusnya mengandung kehadiran 6 karakteristik khusus: CATWOE yaitu Client, Actor, Transformation, Weltanschauung, Owner dan Environment.

Tabel 13. Karakteristik CATWOE pelaksanaan PKBL di PG. Poerwodadie.

No	Root Definition	Keterangan
1.	CLIENT	Masyarakat lingkungan PG, Mitra Binaan UKM
2.	ACTOR	TIM 9, Pengurus PKBL
3.	TRANSFORMATION	Implementasi Program
4.	WELTANSCHAUUNG	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai jalan menuju keselarasan hubungan PG. Poerwodadie dengan lingkungan dan masyarakat di wilayah PG. Poerwodadie
5.	OWNER	PG. Poerwodadie
6.	ENVIRONMENT	SK Menteri BUMN No 236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003

1. *Client*

Client adalah pihak yang terkena dampak atas aktivitas program PKBL di PG. Poerwodadie Magetan, program PKBL melibatkan berbagai macam pihak mulai dari intern pengurus PKBL dari PG, Petani PKBL, mitra binaan UKM serta masyarakat di wilayah kerja PG. Dalam karakteristik Client terdapat 2 macam bahasan inti, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan atas sistem dan pelaksanaan program PKBL, pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan program terdiri dari petani tebu yang mendapatkan bantuan kredit PKBL dimana sebagai tambahan modal dalam usahatani tebu, meskipun tidak memenuhi kapasitas modal yang seharusnya dibutuhkan oleh petani tebu akan tetapi bantuan kredit dapat membantu menutup biaya produksi selama musim tanam disamping bantuan kredit KKP-E dan PMUK. Pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan PKBL dikarenakan program ini

bertujuan untuk menselaraskan hubungan antara pelaksana program yaitu PG. Poerwodadie dengan penerima program petani, mitra UKM dan masyarakat lingkungan PG. Poerwodadie, akan tetapi tidak dapat dihindari dari semua pelaksanaan program yang berjalan pasti terdapat kendala dan pihak-pihak yang memang merasa dirugikan dalam pelaksanaannya, pada kenyataannya bukan dari program PKBL akan tetapi pada *fly ass*(debu pabrik) yang keluar dari cerobong asap, ada pihak yang memang merasa sangat dirugikan dalam hal ini, salah satu landasan PKBL dari PG. Poerwodadie dalam pelaksanaannya juga menanggulangi atas dampak-dampak dari limbah pabrik, berbeda dengan penanganan pasca limbah dari penggunaan air dari DAM Jungke yang mensuplai kebutuhan air PG dan digunakan masyarakat sekitar untuk mengairi lahan sawah, pemberian air ini dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh PG dan sebaliknya PG harus membayar retribusi air pada pemerintah kabupaten Magetan Rp 64.000.000,00/bulan selama masa giling, kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam rangka menjalinj hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

2. Actor

Agen perubahan terdapat dalam karakteristik kedua yaitu actor dimana proses transformasi berada pada pihak inti selain pada pihak yang terkena dampak langsung, actor dalam pelaksanaan PKBL terdapat pada TIM 9 dan Pengurus Internal PKBL yang ada di PG. Poerwodadie. TIM 9 merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili aspirasi masyarakat di sekitar PG. Poerwodadie yang merasakan dampak negatif dari *flying Ass*(debu pabrik) yang lurus mengarah ke utara ke bagian wilayah kelurahan manisrejo. Berbagai macam permasalahan yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan program direspon secara cepat dari perwakilan masyarakat dalam TIM 9 yang dibentuk dari stakeholder, kecenderungan pihak PG dalam memilih perwakilan masyarakat tertentu sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pabrik dianggap langkah diskriminatif terhadap pihak tertentu, langkah awal TIM 9 dalam memahami kondisi tersebut agar supaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis tanpa adanya pihak yang dirugikan dan berjalan sesuai dengan prosedur yang memang harus dijalankan, pihak tertentu yang dimaksud adalah

yang paling dominan dalam menyuarakan protes terhadap *fly ash* pabrik, sebagai langkah partisipatif PG memberikan kompensasi terhadap pihak tertentu, hal tersebut dianggap mengganjal dikarenakan tidak sesuai dengan landasan kegotongroyongan masyarakat yang memang mendapatkan kondisi dan dampak yang sama sebagai akibat dari limbah debu dari PG. Poerwodadie, TIM 9 terus berupaya keras dalam memantau persiapan pelaksanaan giling mulai dari kesiapan alat hingga memantau kondisi sebelum giling dengan mengadakan sosialisasi yang melibatkan anggota dewan dan pihak PG. Poerwodadie, hal ini dilakukan sebagai tindakan dalam bukti PG. Poerwodadie dalam menangani konflik yang berkembang sebagai akibat adanya dampak debu pabrik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihak PG debu yang dihasilkan merupakan debu yang berasal dari pasokan bahan baku tebu yang masuk di PG. Yang tidak memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, Segar), kondisi tersebut diawali dari tingkatan *on farm* di lahan pada saat tebang, kondisi ini menyebabkan kerugian di PG dan berimbas pada masyarakat yang terkena dampak limbah, kondisi seperti ini mendapatkan perhatian serius dalam melakukan tindakan preventif dengan melakukan *transfer knowledge* kepada petani bahwa sesuai dengan standar bahan baku yang masuk ke penggilingan haruslah Manis, Bersih dan Segar.

3. *Transformation*

Dengan terlaksananya kebijakan PKBL yang berada di tingkat PG dan melibatkan pihak penerima yaitu petani tebu PKBL, mitra binaan UKM dan masyarakat di lingkungan PG, maka proses transformasi berjalan sesuai dengan tahapannya, adanya unsur pembinaan secara teknis dalam pencapaian tujuan melalui pelatihan dan bantuan infrastruktur dengan melibatkan pihak-pihak dari tingkat kelurahan hingga anggota dewan dan dari pihak PG hingga direksi pusat, dalam pelaksanaannya PKBL merupakan program yang *soft* dalam artian kebijakan ini merupakan bentuk kompensasi terhadap semua dampak yang diakibatkan dari proses produksi PG dan bantuan yang memang mempunyai dasar yang jelas dari kementerian BUMN. Dengan adanya pihak yang heterogen membuat pelaksanaan program ini menjadi persepsi yang beragam, akan tetapi bukti nyata yang ada di lapangan dengan terselenggaranya

program bantuan baik fisik maupun non fisik, hal ini merupakan suatu pencitraan positif dalam melakukan suatu kebijakan bantuan.

4. *Weltanschauung (world view)*

Perkembangan fenomena sosial di masyarakat berkembang seiring dengan pengetahuan, teknologi dan informasi yang berkembang pesat, tuntutan akan kehidupan yang layak di tingkat petani dan masyarakat hidup secara berdampingan dengan PG membuat kebijakan juga mengalami perubahan yang terkadang tidak sesuai dengan prosedural, akan tetapi semua ketetapan prosedur yang diwajibkan sesuai dengan kondisi riil di lapang menyesuaikan fenomena dan keadaan yang berkembang, karena tidak semua kebijakan pusat akan sesuai dengan keadaan riil di lapang yang mempunyai pandangan heterogen dari berbagai lapisan masyarakat.

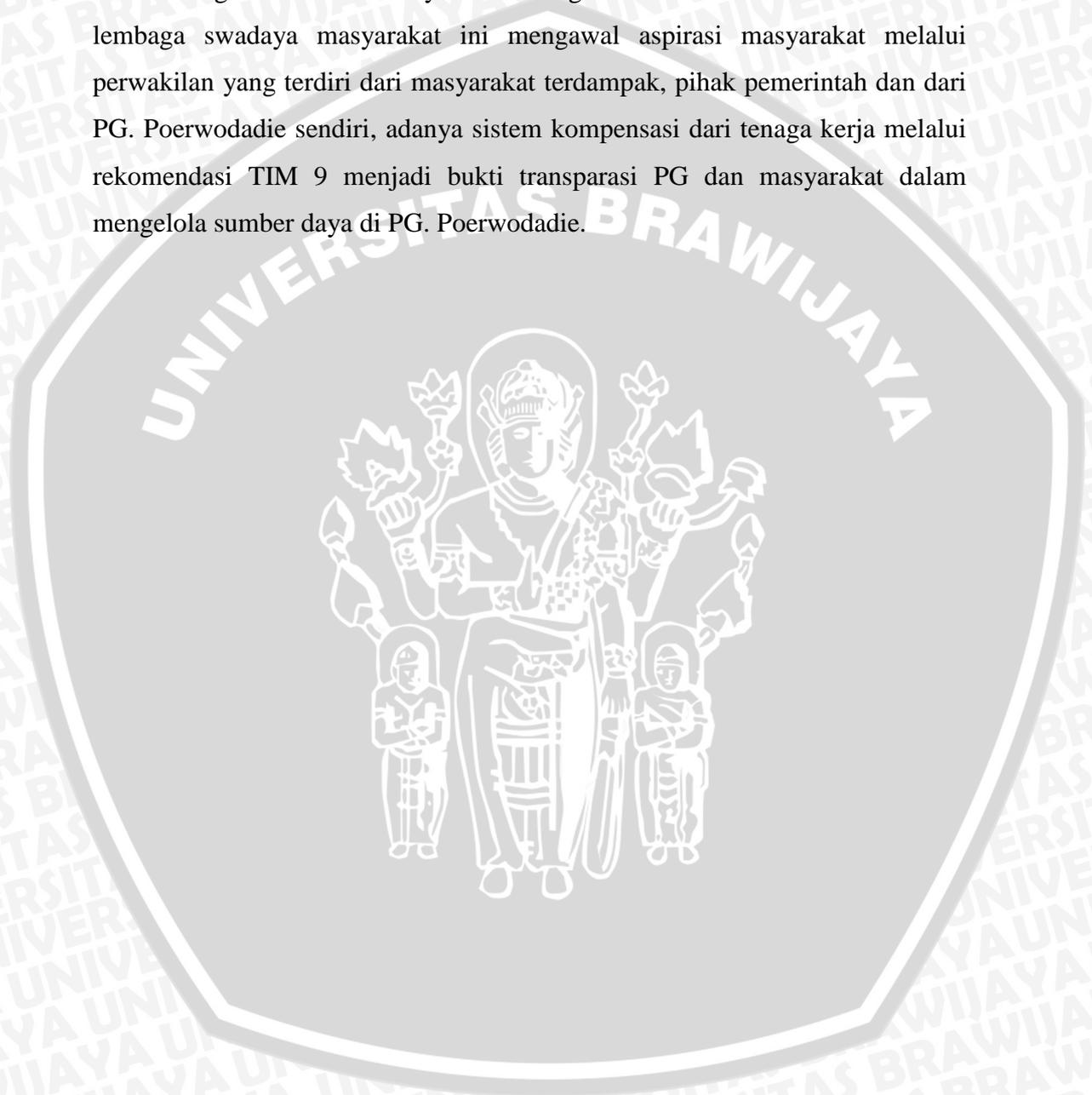
5. *Owner*

PG. Poerwodadie sebagai pelaksana kebijakan PKBL mempunyai kewajiban penuh dalam monitoring dan evaluasi dari aspek kredit petani tebu dan kegiatan UKM binaan, kewajiban 2% laba perusahaan menjadi hak dari penerima kebijakan menjadi dasar yang diibaratkan ibu dan anak sebagai bentuk perhatian untuk lebih mengembangkan kewajiban dalam bermitra, tanggung jawab PG yang besar terhadap pemenuhan konsumsi gula nasional dibawah naungan PTPN XI dan menjadi sumber penghasilan dari pekerja dalam masa giling dan luar masa giling, sejak pabrik dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda sudah menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan menjadi bagian dari produksi gula meskipun terdapat masa kerja paksa, kendala tersebut berlangsung hingga sekarang dimana berkembangnya kondisi masyarakat dan meningkatnya teknologi informasi, untuk dapat menjalankan program kebijakan yang menjadi tanggungan PG. Poerwodadie.

6. *Environment*

Dari kesemuanya karakteristik dari *root definition* di atas, pada tahapan ini lebih mengarah pada fitur, alat, kebijakan dari lingkungan yang akan membantu dalam pelaksanaan PKBL, arah kebijakan yang ditunjang oleh teknologi, ekonomi, sosial dan politik. Kemudahan dalam akses informasi melalui peningkatan kapasitas pengetahuan teknis budidaya tebu pada

perwakilan petani PKBL yang berasal dari Koperasi Tebu Rakyat (KPTR), aspek fitur ekonomi bisa dilihat pada penambahan modal ushatani tebu dikarenakan PG. Poerwodadie menyediakan akses kredit KKP-E, PMUK dan PKBL yang bervariasi pada setiap besaran jenis pinjaman kredit. Aspek politik berkembang setelah diadakanya monitoring dan evaluasi oleh TIM 9 dimana lembaga swadaya masyarakat ini mengawal aspirasi masyarakat melalui perwakilan yang terdiri dari masyarakat terdampak, pihak pemerintah dan dari PG. Poerwodadie sendiri, adanya sistem kompensasi dari tenaga kerja melalui rekomendasi TIM 9 menjadi bukti transparansi PG dan masyarakat dalam mengelola sumber daya di PG. Poerwodadie.



Berdasarkan karakteristik dari CATWOE di atas maka dapat disimpulkan Root Definition menjadi:

“Program Kemitran dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh PG. Poerwodadie sebagai jalan menuju keselarasan terhadap Masyarakat Lingkungan PG dan Mitra Binaan UKM dengan Pengurus PKBL dalam melaksanakan program dengan landasan SK Menteri BUMN No 236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003”

6.4.3 Model Konseptual

Model Konseptual yang relevan digunakan dalam permasalahan dalam UKM mitra Binaan PKBL PG. Poerwodadie adalah menggunakan model kluster dalam sentra UKM PKBL. Pada realita yang terjadi lapangan model yang ada merupakan model sentra dimana masing-masing unit masih berdiri berdasarkan bidangnya dan masih belum berkembang menjadi model kluster dimana identitas dan daya saing belum muncul dari unit UKM yang mengikuti mitra binaan PKBL. Model kluster dalam mitra binaan UKM PKBL dikelompokkan dengan unit usaha lain yang memiliki kompetensi yang berbeda akan tetapi masih dalam wilayah kerja PG. Poerwodadie dengan institusi bentukan secara bersama dengan organisasi lain dengan meningkatkan daya saing, spesialisasi dan pembentukan identitas dari unit UKM PKBL.

Adapun tahapan karakteristik pada konsep kluster dalam sentra UKM PKBL terdiri dari sisi internal dan eksternal. Berikut ini merupakan sisi internal dan eksternal dari konsep kluster pada UKM PKBL.

Internal :

1) Konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/pengelompokan *spatial*

Dari unit usaha dalam UKM mitra binaan yang masih berdiri sendiri, PG. Poerwodadie dalam hal ini pengurus PKBL sebagai hilir pelaksana program kepada mitra Binaan menjadi inovator dalam pendampingan unit usaha, dalam kewajiban sebagai inovator dalam rangka pengelompokan *spatial* dari unit usaha haruslah proaktif dengan kegiatan monitoring dan evaluasi periodik.

Pengelompokan *spatial* ini merupakan tahapan awal dalam pembentukan klaster dimana kemudian setelah unit usaha bergabung akan terjadi interaksi antar perusahaan dimana PKBL dalam mitra binaan menjadi fasilitator dengan interaksi antar unit usaha yang telah dikelompokan.

2) Interaksi antar unit UKM (*network/supply chain*).

Komponen yang sudah terbentuk dalam pengelompokan *spatial* kemudian berkembang diantara masing-masing unit usaha mitra binaan UKM dalam pemenuhan bahan baku ataupun dalam interaksi yang bersifat transaksional maupun teknis.

3) Kombinasi sumberdaya dan kompetensi antar perusahaan yang berinteraksi.

Setelah terjadi interaksi pada unit-unit mitra binaan UKM, maka tahapan dalam pembentukan klaster selanjutnya unit usaha tersebut dilakukan pengelompokan inti berdasarkan bidang dari unit usaha yang dijalankan (toko pracangan dengan toko pracangan, jamur tiram dengan ternak ayam petelur, jahit dengan koperasi karyawan), sedangkan ada unit yang berdiri sendiri yaitu counter HP, fotokopi dan tukang cukur. Pengelompokan tersebut disatukan berdasarkan kompetensi dari masing-masing unit usaha dari mitra binaan UKM PKBL PG. Poerwodadie.

4) Pembentukan dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung yang berfungsi membantu klaster secara keseluruhan.

Setelah diketahui kompetensi dari masing-masing UKM yang telah dikelompokan berdasarkan *spatial* dan terjadi interaksi antar *spatial* terhadap inovator, maka terbentuklah institusi bersama dari UKM yang sesuai dengan kompetensi dan keunggulan serta kesamaan unit yang ada yang kemudian mampu menumbuhkan unsur interaksi antar perusahaan yang lebih dinamis dan kemauan untuk melakukan kombinasi sumberdaya/kompetensi dari masing-masing anggota sentra UKM, upaya dalam percepatan yang diharapkan dapat membuat sentra UKM yang difasilitasi berkembang ke arah klaster dengan lebih cepat.

Eksternal :

1. *Economic Specialization*

Dalam membuat peningkatan dari spesialisasi unit UKM harus membuat daya saing yang berbeda dengan karakteristik dari UKM yang sama dan sejenis pada daerah lain agar mengarahkan produk pada kualitas yang lebih tinggi.

2. *Competitiveness*

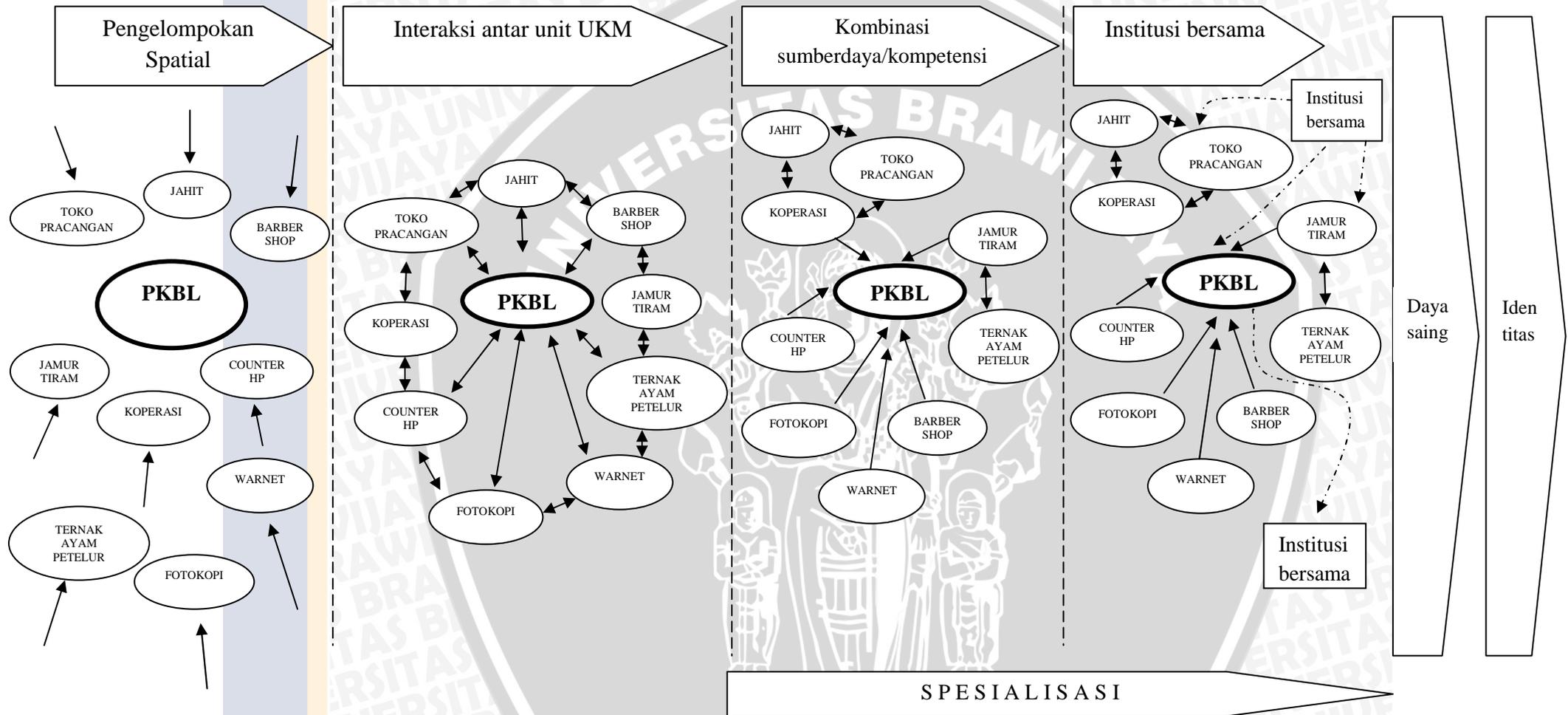
Mitra binaan usaha UKM yang dijalankan selain mempunyai keunggulan dalam daya saing, maka harus berorientasi pada inovasi dan adopsi terhadap perkembangan produk yang dihasilkan.

3. *Identity*

Jika daya saing produk dari mitra binaan UKM dapat dipertahankan dan diunggulkan, maka pada tahapan eksternal pembentukan klaster masuk pada pembentukan identitas produk.



Gambar 11. Ilustrasi pembentukan klaster pada mitra binaan UKM PKBL.



Pada gambar ilustrasi pembentukan klaster di atas tahapan awal dimuali dengan pengelompokan *spatial* dari unit UKM yang ada pada kegiatan pelaksanaan PKBL pada mitra binaan UKM, unit yang ada terdiri dari Toko Pracangan, Jahit, Barber Shop, Budidaya Jamur Tiram, Koperasi Karyawan, Counter HP, Ternak Ayam Petelur, Fotokopi dan Warung Internet (Warnet), tahapan awal ini mendeskripsikan dari masing-masing karkteristik yang kemudian adanya interaksi dari unit UKM yang ada terhadap inovator dalam hal ini adalah implementasi PKBL pada mitra binaan UKM, Inovator membuat suatu aturan yang menjadi tumpuan dari UKM mitra binaan terhadap produk yang dihasilkan, inovator membuat suatu inovasi baru terhadap produk yang dimana kemudian antara unit UKM pada pengelompokan *spatial* ini mempunyai kombinasi sumberdaya dan kompetensi sendiri dari produk yang dihasilkan. Pada tahapan kompetensi unit UKM dikelompokan berdasarkan bidangnya masing-masing yaitu pada klaster I terdiri dari Jahit, Koperasi dan Toko Pracangan, Klaster II terdiri dari Jamur Tiram dan Ternak Ayam Petelur, dan klaster yang berdiri sendiri yaitu pada counter HP, Fotokopi, Warnet dan Barber Shop.

Kedekatan *spatial* pada pengelompokan klaster ini kemudian diikuti oleh interaksi antar perusahaan untuk mendukung produk sentra. Interaksi dan komitmen ini kemudian diikuti dengan kemauan mengkombinasikan sumberdaya dan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu, UKM mitra binaan perlu membentuk satu atau lebih institusi bersama dimana kemudian dapat menghasilkan daya saing dan identitas yang berbeda dalam menghasilkan produk UKM.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

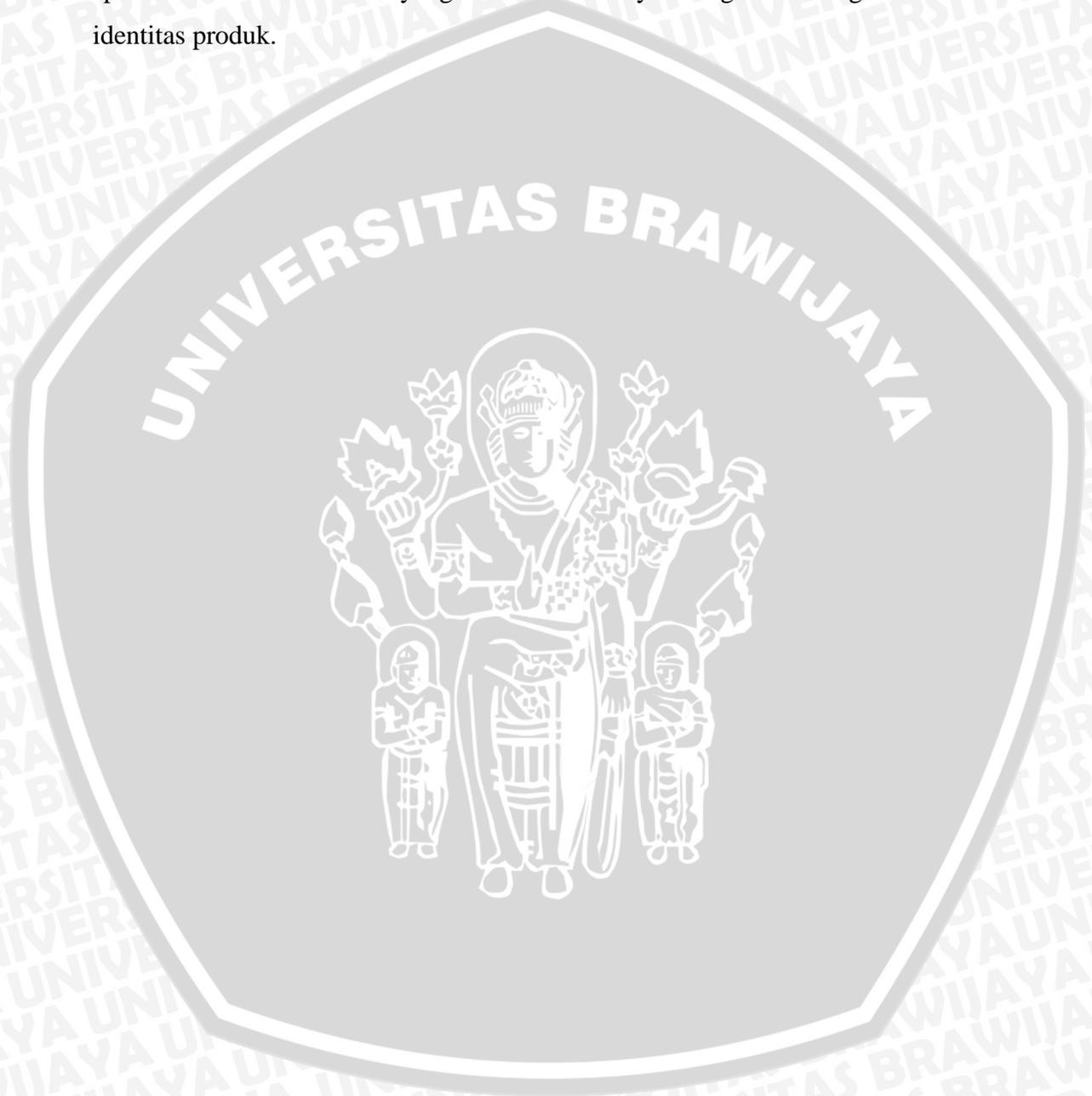
7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam lingkup BUMN di tingkat pelaksanaan PG. Poerwodadie. Program berjalan dengan dua aspek yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan yang meliputi aspek pemberian kredit kepada petani tebu PKBL dengan besaran paket Rp 12.500.000,00/Ha. kredit PKBL dipilih petani tebu PG. Poerwodadie sebagai tambahan dalam biaya garap selain kredit yang disediakan yaitu KKP-E dan PMUK. Bidang Bina Lingkungan mencakup objek bantuan yang terdiri dari bantuan sosial bencana alam, pendidikan, kesehatan dan pengembangan sarana dan prasarana umum serta pelestarian alam, adapun tata cara pengajuan untuk kegiatan sosial bencana alam, pendidikan dan kesehatan diberikan secara langsung sedangkan pada bantuan tempat ibadah, sarana dan prasarana umum bantuan didahului dengan pengajuan proposal, sedangkan sektor bantuan bekerjasama pada instansi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSA), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Magetan dan Puskesmas Karangrejo, hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah penyaluran bantuan program.
2. Berdasarkan perhitungan Usahatani pada kredit PKBL didapatkan hasil Penerimaan usahatani tebu terdiri dari penerimaan dari unsur gula Rp.61.164.547,53 dan penerimaan dari unsur tetes Rp.2.893.708,33 jadi total penerimaan sebesar Rp.64.058.255,87/Ha, untuk total biaya didapatkan hasil Rp.51.232.512,00, sehingga pendapatan usahatani tebu diperoleh sebesar Rp. 12.825.744,00/Ha. Setelah mengetahui biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani tebu maka dapat diketahui efisiensi R/C ratio dari hasil tersebut sebesar 1,25 dimana setiap tambahan modal Rp 100 maka akan didapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 125, hasil tersebut dalam usahatani tebu dengan bantuan kredit program PKBL efisien dan menguntungkan.



3. Model konseptual yang cocok untuk mengatasi permasalahan di lingkup mitra binaan UKM PKBL adalah model klaster, dimana tahapan pembentukan diawali dengan adanya pengelompokan *spatial*, interaksi antar perusahaan, kombinasi sumberdaya/kompetensi, institusi bersama, sehingga terbentuk spesialisasi model klaster yang membentuk daya saing dan menghasilkan identitas produk.



7.2 Saran

1. Pencairan pada bantuan paket kredit usahatani tebu sebaiknya dilakukan dengan tunai langsung sesuai dengan paket biaya garap yang diajukan petani PKBL, selama program berjalan bantuan turun bertahap hal ini menghambat petani dalam menambah biaya garap usahatani tebu, apabila bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan petani maka pasokan bahan baku tebu yang masuk ke PG tidak mengalami kendala baik dalam kualitas maupun kuantitas, dan petani loyal terhadap PG. Poerwodadie dalam memenuhi pasokan bahan baku tebu. Pemberian modal kerja yang lancar tidak ada kendala dalam pencairan dan bagi hasil yang transparan akan meningkatkan produksi sehingga petani mampu mengembalikan pinjaman dengan atau tanpa bunga, hal ini berdasarkan pola kemitraan yarnen dimana prosedur yang sederhana dalam pemberian bantuan baik dalam biaya garap, hal ini akan memberikan stimulus terhadap mitra binaan sehingga tidak terjadi kredit macet (*non performing loan*).
2. Pengajuan dana pada sektor mitra binaan UKM selama program berlangsung dibatasi pada dana *plafon* yang tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan oleh mitra binaan, hal ini dapat menghambat sektor UKM dalam mengembangkan dalam model klaster dimana terjadi spesialisasi produk, sehingga kebutuhan akan dana seharusnya lancar dan tidak terkendala, oleh karena itu pencairan dana seharusnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh mitra binaan melalui pengajuan proposal.
3. Berdasarkan model klaster yang telah dibentuk, maka dapat menciptakan upaya kerjasama antara unit UKM dan menciptakan kesempatan tumbuhnya ruang belajar secara kolektif untuk meningkatkan kualitas produk sehingga mengarahkan ke segmen pasar yang lebih menguntungkan.